



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2019





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : Inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2019 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 27 Maret 2020

INSPEKTUR,

Drs. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601211 198203 1 007

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Grafik	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Dasar hukum.....	2
1.4. Kondisi Daerah Sumatera Barat.....	3
1.5. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	7
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja	31
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	32
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.....	36
Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	37
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	44
Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	52
Sasaran 2.1.2 Meningkatkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	61
Sasaran 2.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	69
Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat	77
Sasaran 3.1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	89
Sasaran 4.1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	103
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	109
Sasaran 4.1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	117
Sasaran 4.1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	123

Sasaran 5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	140
Sasaran 5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	145
Sasaran 5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	150
Sasaran 5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	156
Sasaran 5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	165
Sasaran 5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	174
Sasaran 5.2.3	Menurunnya risiko bencana	178
3.4. Realisasi Anggaran		183
BAB IV PENUTUP.....		186
LAMPIRAN		
1.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	
2.	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 bertujuan untuk menginformasikan dan mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019. Kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan ini adalah kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga memuat informasi tentang hambatan/kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan serta evaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Padang, Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tkhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 tujuan dan 18 sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan 23 indikator kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan 5 misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Analisa terhadap 7 tujuan dan 18 sasaran strategis tersebut memberikan informasi terkait kinerja yang dicapai, hambatan/kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan serta evaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

Pencapaian 7 tujuan dan 18 sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 menunjukkan 8 sasaran strategis (44,44%) mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 9 sasaran strategis (50%) mencapai keberhasilan dengan kategori sangat baik dan 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori cukup. Sasaran strategis dengan capaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan capaian 342,29% dan yang terendah adalah sasaran meningkatnya nilai ekspor (68,06%).

Pencapaian 7 tujuan dan 18 sasaran strategis selama tahun 2019 berdasarkan misi diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pencapaian Misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama” dan “Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan”. Masing-masing tujuan tersebut memiliki 1 sasaran yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83
1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83
2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	33	100
2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	2.1.1 Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	33	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 1					97,92

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja utama adalah 97,92%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 2 Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pencapaian Misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi”. Tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		71	65,63	92,44
1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		1.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	70	76,69	109,56
		1.2.2	Indeks e-Government	2,8	2,78	99,29
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	80	84,47	105,59
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 2						102,3

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja utama adalah 102,3%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berakarakter, dan Berkualitas Tinggi.

Pencapaian Misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tujuan tersebut memiliki 2 sasaran strategis yang diukur dengan 3 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		71,7	71,73	100,04
1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1.1.1	Harapan lama sekolah	14,63	13,95	95,35
		1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,79	8,76	99,66
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,22	69,01	99,70
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 3						98,24

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 98,24%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah.

Pencapaian Misi 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,83	5,05	86,62
		Indeks Gini		0,328	0,307	106,40
1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	45,44	45,29	99,67
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	4,02	13,76	342,29
1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1.967,38	1.339,03	68,06
1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	1.4.1	Tingkat Kemiskinan	6,15	6,29	97,72
		1.4.2	Tingkat Pengangguran	6,03	5,33	111,61
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 4						143,87

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja utama adalah 143,87%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Pencapaian Misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah” dan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. Tujuan tersebut memiliki 7 sasaran strategis yang diukur dengan 8 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap		37	40	108,11
		Rasio Elektrifikasi		99,17	95,82	96,62
1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	40	108,11
1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,17	95,82	96,62
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	62,40	63,95	102,48
1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	53,67	55,23	102,91
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		69,518	77,082	110,88
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1	Indeks Kualitas Air	65,65	77,37	117,85
		2.1.2	Indeks Kualitas Udara	83,05	89,45	107,71
2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	69,52	67,59	97,22

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2.3	Menurunnya risiko bencana	2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	74	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 5						104,1

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja utama adalah 104,1%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	9
---	---

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	18
Tabel 2.2	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.....	19
Tabel 2.3	Perubahan (Revisi) Perjanjian Kinerja	20
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	32
Tabel 3.3. 1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.1.....	36
Tabel 3.3. 2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1	38
Tabel 3.3. 3	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan	39
Tabel 3.3. 4	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.2.....	43
Tabel 3.3. 5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2.1	45
Tabel 3.3. 6	Karya budaya Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2019	45
Tabel 3.3. 7	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional	46
Tabel 3.3. 8	Perkembangan Penerapan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019	49
Tabel 3.3. 9	Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018-2019.....	50
Tabel 3.3. 10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1	52
Tabel 3.3. 11	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.....	54
Tabel 3.3. 12	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP	58
Tabel 3.3. 13	Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan Prediket Nilai Akuntabilitas Kinerja AA, A dan BB tahun 2019	58
Tabel 3.3. 14	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019	59
Tabel 3.3. 15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2	62
Tabel 3.3. 16	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.....	63
Tabel 3.3. 17	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks e-government/SPBE.....	66
Tabel 3.3. 18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3.	69
Tabel 3.3. 19	Rincian Hasil Survei IKM Tahun 2019	70
Tabel 3.3. 20	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik.....	71
Tabel 3.3. 21	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2019	74
Tabel 3.3. 22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1	77
Tabel 3.3. 23	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja harapan lama sekolah	80
Tabel 3.3. 24	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata lama sekolah.....	83
Tabel 3.3. 25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2	90
Tabel 3.3. 26	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup	91
Tabel 3.3. 27	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.1.....	96
Tabel 3.3. 28	PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2010 (triliun rupiah) Tahun 2017-2018.....	98
Tabel 3.3. 29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1	104
Tabel 3.3. 30	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Jumlah pendapatan perkapita (Rp. Juta)/PDRB per kapita	105
Tabel 3.3. 31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2	110
Tabel 3.3. 32	Realisasi PMA dan PMDN tahun 2019 berdasarkan sektor usaha	110
Tabel 3.3. 33	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase pertumbuhan investasi	113
Tabel 3.3. 34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.3	117

Tabel 3.3. 35	Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2016-2019.....	118
Tabel 3.3. 36	Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019.....	119
Tabel 3.3. 37	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja peningkatan nilai ekspor	120
Tabel 3.3. 38	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.4	124
Tabel 3.3. 39	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja tingkat kemiskinan	127
Tabel 3.3. 40	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Sumatera Barat 2017-2019	132
Tabel 3.3. 41	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	133
Tabel 3.3. 42	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran	134
Tabel 3.3. 43	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.1.....	139
Tabel 3.3. 44	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1	141
Tabel 3.3. 45	Ruas Jalan Provinsi Tahun 2019 dalam kondisi mantap $\geq 72\%$	142
Tabel 3.3. 46	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Jumlah Ruas Jalan Antar Daerah yang Terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap.....	143
Tabel 3.3. 47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.2	146
Tabel 3.3. 48	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi.....	147
Tabel 3.3. 49	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rata-Rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	150
Tabel 3.3. 50	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase Rata-Rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air.....	151
Tabel 3.3. 51	Daerah Irigasi yang direhabilitasi di tahun 2019.....	153
Tabel 3.3. 52	Pembangunan infrastruktur Perlindungan dari daya rusak air tahun 2019	154
Tabel 3.3. 53	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.4	157
Tabel 3.3. 54	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	157
Tabel 3.3. 55	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.2.....	162
Tabel 3.3. 56	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1	165
Tabel 3.3. 57	Kategori dan Kisaran Indeks Kualitas Air	166
Tabel 3.3. 58	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air	167
Tabel 3.3. 59	Kategori dan Kisaran Indeks Kualitas Udara	170
Tabel 3.3. 60	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara.....	171
Tabel 3.3. 61	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.2	174
Tabel 3.3. 62	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Tutupan Hutan/IKTL	175
Tabel 3.3. 63	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.3	179
Tabel 3.3. 64	Kejadian bencana tahun 2019 di Sumatera Barat.....	180
Tabel 3.3. 65	Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	180
Tabel 3.4 1.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019.....	184

Daftar Grafik

Grafik 1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari Tahun 2011-2016	6
Grafik 2	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019.....	7
Grafik 3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019.....	14
Grafik 4	Komposisi Aparatur Berdasarkan Golongan	15
Grafik 5	Rekapitulasi Capaian 23 Indikator Kinerja Tahun 2019.....	35
Grafik 6	Indeks Kerukunan Provinsi di Indonesia Tahun 2019	40
Grafik 7	IPM Kabupaten/kota se Sumatera Barat.....	75
Grafik 8	IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat.....	75
Grafik 9	Perkembangan Harapan Lama Sekolah tahun 2015-2019	79
Grafik 10	Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019	79
Grafik 11	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2015-2019	81
Grafik 12	Perkembangan rata-rata lama sekolah tahun 2015-2019.....	82
Grafik 13	Rata-rata Lama Sekolah kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019	83
Grafik 14	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	84
Grafik 15	Angka Partisipasi Sekolah Sumatera Barat tahun 2015-2019	85
Grafik 16	Angka Partisipasi Kasar Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	86
Grafik 17	Angka Partisipasi Murni berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015-2019	86
Grafik 18	Perkembangan angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2015-2019	90
Grafik 19	Angka harapan hidup kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019.....	91
Grafik 20	Perbandingan Angka harapan hidup Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2015-2019	92
Grafik 21	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (%)	99
Grafik 22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2019 (%) ...	100
Grafik 23	Tren indeks/rasio gini perkotaan dan perdesaan Sumatera Barat 2016-2019	101
Grafik 24	Indeks gini Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019	102
Grafik 25	PDRB perkapita menurut Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019 (Juta Rupiah)	106
Grafik 26	Negara Penyumbang PMA Terbesar Tahun 2019	112
Grafik 27	Kabupaten/Kota Penerima PMA Terbesar Tahun 2019	112
Grafik 28	Kabupaten/Kota Penerima PMDN terbesar Tahun 2019.....	113
Grafik 29	Perbandingan Nilai Ekspor di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2019	121
Grafik 30	Daftar Komoditi Makanan yang memberi sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan September 2019.....	126
Grafik 31	Daftar Komoditi Non Makanan yang memberi Sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan September 2019.....	126
Grafik 32	Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019	128
Grafik 33	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan (%).....	133
Grafik 34	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Agustus 2019.....	135
Grafik 35	Persentase penduduk bekerja menurut kegiatan Formal/Informal (2017-2019).....	136
Grafik 36	Rasio Elektrifikasi kabupaten/kota se Sumatera Barat Tahun 2019	147
Grafik 37	Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019	148
Grafik 38	Akses air minum 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019	159
Grafik 39	Akses sanitasi 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019	160
Grafik 40	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni kabupaten/kota Tahun 2019.....	160
Grafik 41	Nilai Indeks Kualitas Air 10 Sungai yang dipantau.....	167
Grafik 42	Perbandingan indeks kualitas air Sumatera Barat dengan Nasional.....	168
Grafik 43	Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019	171

Grafik 44	Perbandingan IKU Sumatera Barat dan Nasional 2017-2019.....	172
Grafik 45	Perbandingan Indeks tutupan lahan/IKTL Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2016-2019.....	176
Grafik 46	Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019.....	183

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Laporan kinerja ini menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, hambatan/kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja serta mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah :

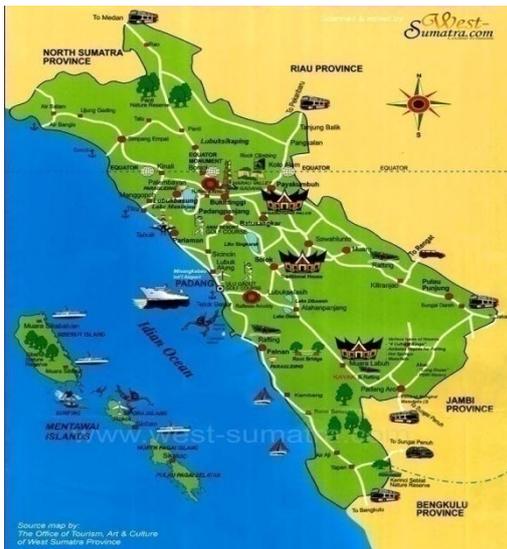
- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang.
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. KONDISI DAERAH SUMATERA BARAT

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi



Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara (LU), sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan (LS), dan antara $98^{\circ} 36'$ sampai $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur (BT). Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah $\pm 42.297,30 \text{ km}^2$ atau setara dengan 2,21% dari luas Republik Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. Provinsi Sumatera Barat berada di Pulau Sumatera yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km^2 , sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 23 Km^2 . Sumatera Barat memiliki 391 gugusan pulau dengan jumlah terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan Kabupaten Agam mempunyai pulau paling sedikit.

1.4.1.2. Topografi

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian >3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), areal dengan ketinggian 100-500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500-1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000-1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500–2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl. Dataran rendah (< 500 m dpl) tercatat hanya 45%, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32% dan 23% daerah dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bagian Timur Sumatera Barat.

1.4.1.3. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

1.4.1.4. Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai

Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi ini berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

1.4.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan *hortikultura*.

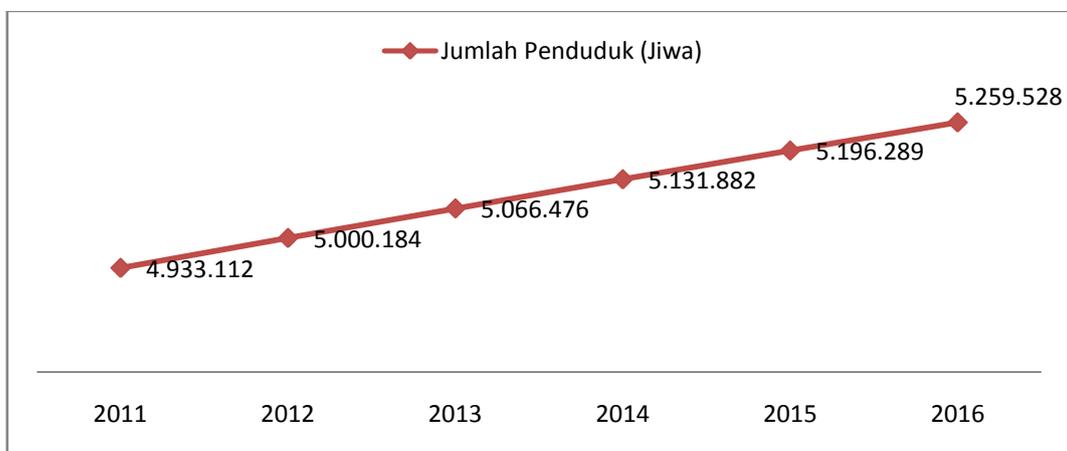
Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim *tropika* basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 180 – 340 C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,50 C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 50 – 70 C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan

Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 40– 60 C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra *hortikultura* dan dapat dikembangkan sebagai daerah *agrowisata* potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

1.4.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.865,33 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km². Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari tahun 2011-2016 dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1 Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari Tahun 2011-2016

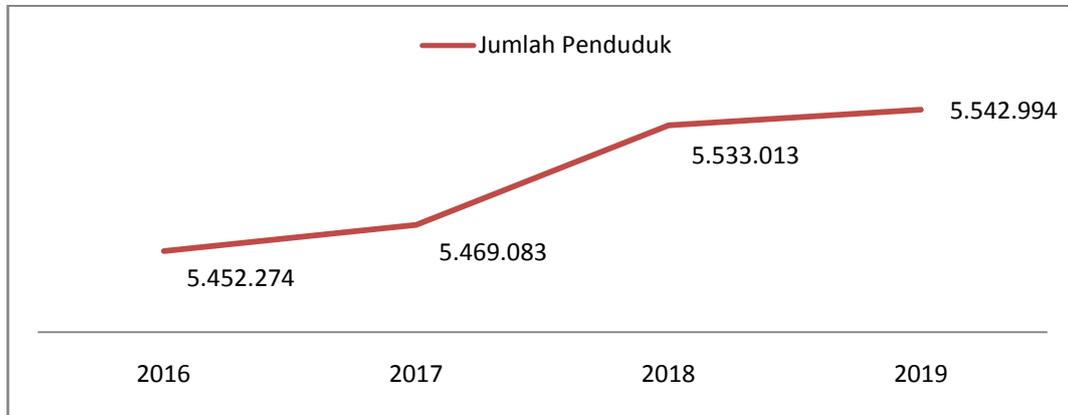


Sumber data: Tabel Statistik BPS 3 November 2017

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (data konsolidasi bersih semester I) adalah sebanyak 5.542.994 jiwa atau meningkat sebanyak 9.981 jiwa dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2018 (5.533.013 jiwa). Penduduk Sumatera Barat tahun 2019 terdiri dari 2.791.543 (50,36%)

penduduk pria dan 2.751.451 (49,64%) penduduk wanita. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019



Sumber data: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

1.5. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1.5.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
4. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
5. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

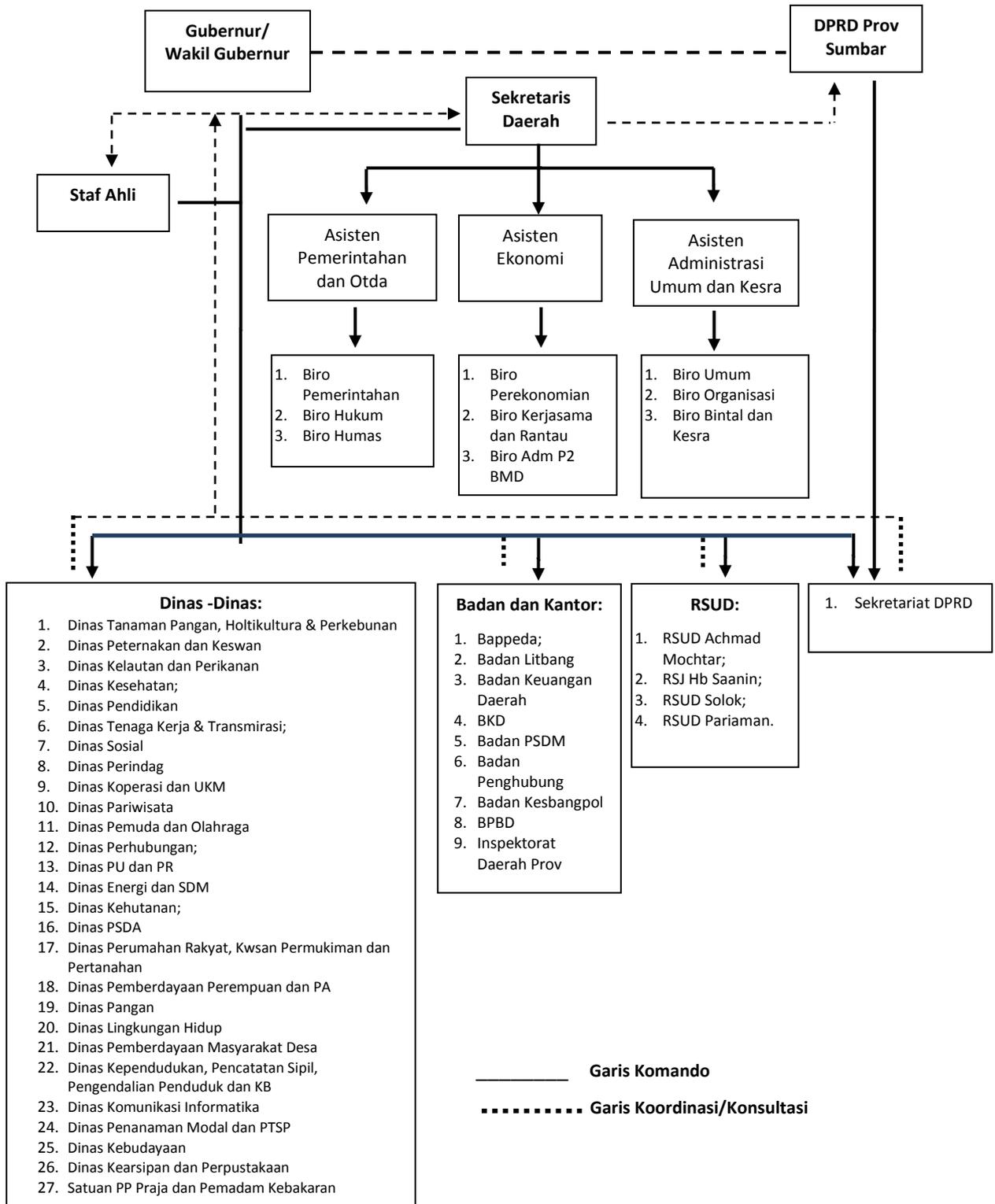
Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota.
2. memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Struktur organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.5.3. Isu-Isu Strategis

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021:

1. Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama

Pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai adat dan pengamalan ajaran agama penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pembangunan bidang ini dilaksanakan untuk menyiapkan generasi muda Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing dan mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa.

2. Penanganan Bencana Alam

Letak geografis Sumatera Barat yang rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, pemerintah Sumatera Barat harus memberikan perhatian yang besar untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana. Hal ini diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah masih merupakan isu penting bagi Sumatera Barat, meskipun sudah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah selama periode 2010-2015. Persoalan kemiskinan yang dihadapi saat ini sudah bergeser untuk menanggulangi tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kelompok masyarakat yang miskin. Untuk mengeluarkan atau membebaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika

kelompok masyarakat miskin dapat diatasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan.

Selanjutnya Sumatera Barat juga ingin mewujudkan keinginan untuk menjadi provinsi yang bebas dari daerah tertinggal. Saat ini masih terdapat tiga daerah tertinggal (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat). Ketiga daerah kabupaten ini mempunyai karakteristik yang relatif berbeda, tetapi sama-sama menghadapi keterbatasan akses untuk keluar masuk, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Untuk membebaskan ketiga daerah kabupaten ini dari ketertinggalannya, diperlukan dana yang besar dan usaha yang terintegrasi, fokus, terukur dan tepat sasaran.

4. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor-sektor produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja. Oleh sebab itu, penguatan struktur ekonomi dijadikan isu strategis dalam rangka lebih menumbuh kembangkan industri pengolahan pertanian, industri kerajinan dan industri pariwisata untuk mendorong penguatan dan perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat.

5. Peningkatan Infrastruktur

Sumatera Barat mempunyai daya saing daerah yang belum mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Salah satu faktor penghalang adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur; jalan, listrik, transportasi, (darat, laut, udara, kereta api), pantai, sungai, irigasi, perumahan/permukiman, bangunan gedung serta prasarana air minum sanitasi. Oleh sebab itu peningkatan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga menarik bagi investor untuk mengembangkan berbagai usaha di Sumatera Barat.

6. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk mendukung terlaksananya pemerintah yang baik dan bersih diperlukan peningkatan integritas dan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, memantapkan sistem manajemen kepegawaian, keterbukaan informasi kepada publik dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

7. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah faktor penentu kemajuan suatu negara dan daerah. Pentingnya isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah untuk mengatasi ketimpangan kualitas sumberdaya manusia antar daerah di Sumatera Barat dan untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat diperlukan pembenahan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan seperti peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menjadi isu pembangunan daerah karena bahagian terbesar yang menggerakkan ekonomi Sumatera Barat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Jika UMKMK tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesempatan kerja akan terjadi di Sumatera Barat.

9. Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu penting bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Sumatera Barat perlu berupaya untuk menjadi provinsi penghasil pangan nasional untuk mendukung kedaulatan pangan.

10. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman

Dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman secara optimal dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan serta sarana prasarana untuk pariwisata bahari dan sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman.

11. Pengurangan Pengangguran

Pengurangan pengangguran menjadi isu pembangunan daerah karena pengangguran menjadi hambatan dalam pembangunan dan menambah beban tanggungan yang berat bagi rumah tangga dan daerah serta berkaitan dengan kemiskinan. Untuk penanganan pengangguran di Sumatera Barat diperlukan pembenahan pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi penawaran adalah peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga cocok dengan permintaan di pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, pembenahan balai latihan yang dapat menghasilkan dan mengembangkan wirausaha baru untuk sektor UMKMK dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi permintaan tenaga kerja adalah meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru dan alternatif bagi pekerja yang masuk kategori setengah pengangguran. Membuka lapangan kerja tentu memerlukan pengembangan berbagai sektor yang dapat diunggulkan Sumatera Barat seperti sektor pariwisata, kelautan dan kemaritiman dan konstruksi bangunan.

12. Peningkatan Daya Saing Daerah

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti *Asean Economic Community* (AEC) dan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Sumatera Barat terbuka

cukup besar terutama ke negara Asean dan China. Untuk itu, upaya pemanfaatan pasar global tersebut guna percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat perlu diiringi dengan peningkatan daya saing daerah yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta tingkat keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

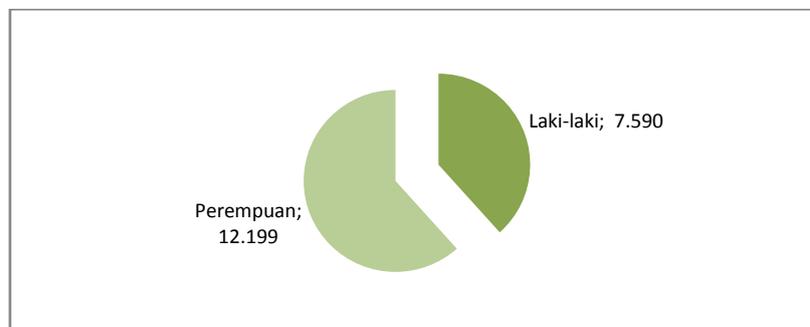
13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dijadikan isu pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung. Pembangunan dan pengembangan berbagai sektor yang akan dilaksanakan di masa mendatang harus dipastikan tidak merusak dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*) perencanaan tata ruang perlu menjadi acuan semua pihak-pihak yang berkepentingan

1.5.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 19.789 orang atau mengalami penurunan sebanyak 326 orang dibandingkan tahun 2018. Dari total pegawai tersebut terdiri dari 7.590 orang laki-laki (38,35%) dan 12.199 orang perempuan (61,65%) sebagaimana tergambar pada grafik 3.

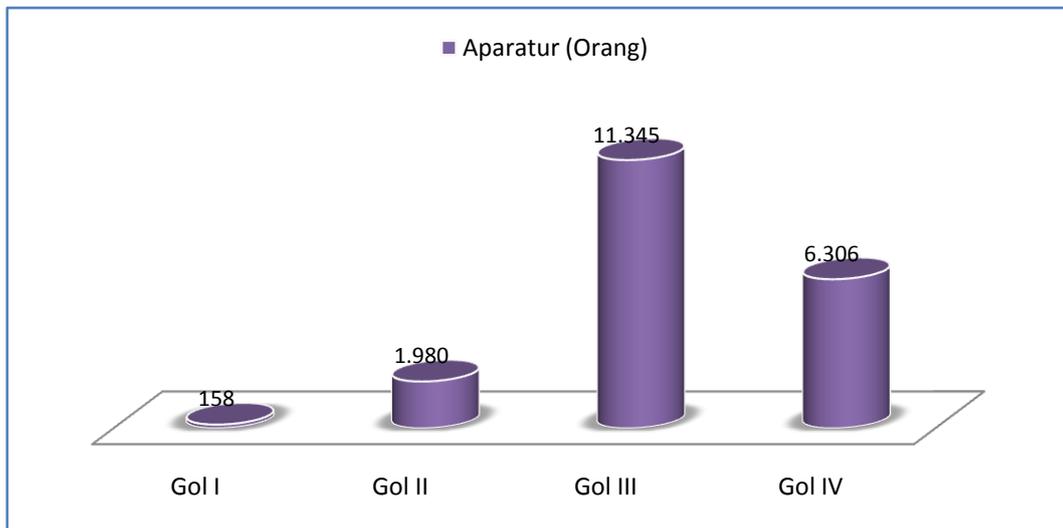
Grafik 3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019



Sumber data: BKD Provinsi Sumbar

Komposisi aparatur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 4.

Grafik 4 Komposisi Aparatur Berdasarkan Golongan



Sumber data: BKD Provinsi Sumbar

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:

- Metodologi Pengukuran Kinerja
- Hasil Pengukuran Kinerja

c. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud.

d. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran

Bab 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan visi gubernur dan wakil Gubernur, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Madani

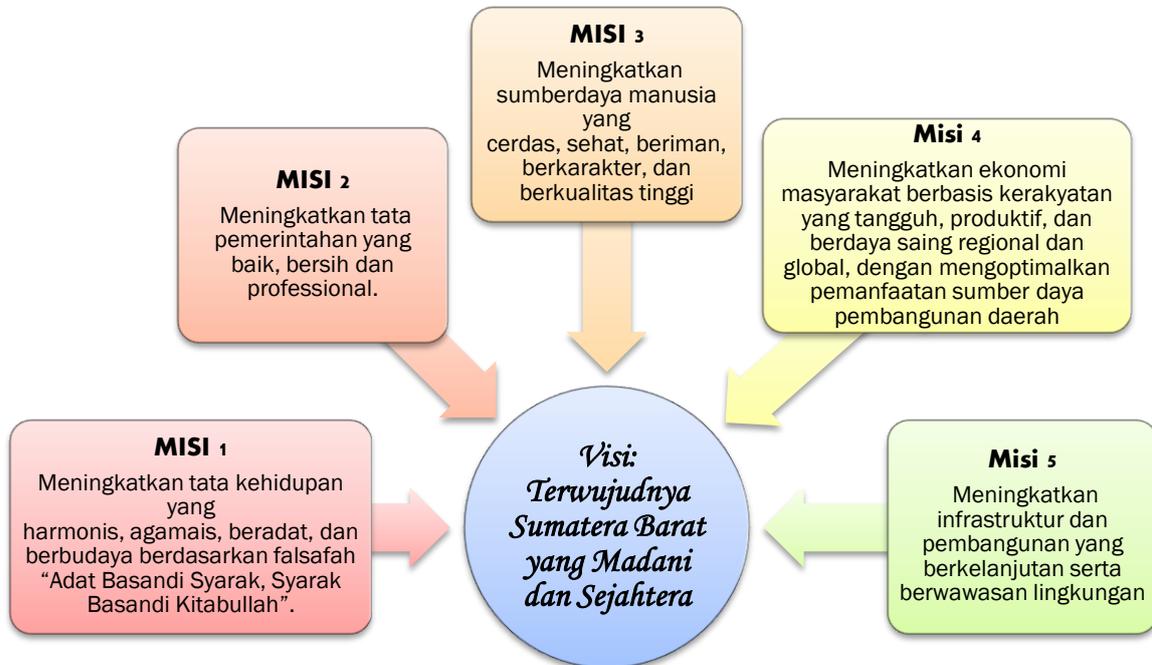
Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Sejahtera

Sumatera Barat *Sejahtera* merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menetapkan 5 Misi sebagaimana tergambar pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber data: RPJMD Prov Sumbar 2016-2021

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis (*Cascading Kinerja*) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA"

	MISI		TUJUAN		SASARAN		
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".	1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama		
				1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya
						1.2.2	Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.	2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		
				2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien		
				2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat		
				3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat		
				4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi		
				4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor		
				4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran		
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah		
				5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan		
				5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air		
				5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat		

MISI	TUJUAN	SASARAN
	5.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.2.1 Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
		5.2.2 Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
		5.3.1 Menurunnya risiko bencana

2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 telah ditetapkan pada Bulan Maret 2019. Pada bulan Desember 2019 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyempurnakan 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja yang mengukur tujuan dan sasaran strategis misi 1 dan indikator kinerja yang mengukur sasaran strategis misi 4 serta merubah anggaran sesuai dengan anggaran perubahan tahun 2019. Berikut ini akan diuraikan Perubahan (Revisi) Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Tabel 2. 3 Perubahan (Revisi) Perjanjian Kinerja

PROVINSI : SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAM AIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".			
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	67,2	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	67,2	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	Dinas Kebudayaan
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	Dinas Kebudayaan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL				
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71	OPD terkait 8 Area Perubahan	
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	70	B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi
		2.1.2.2	Indeks e-Government	2,8	D. Kominfo dan Biro Humas
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	80	Biro Organisasi
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI				
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,7	Lintas PD	
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,63	D. Pendidikan
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,79	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,22	D. Kesehatan dan RSUD
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH				
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,83	Lintas PD	
		Indeks Gini	0,328	Lintas PD	
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	45,44	Lintas PD

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	4,02	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1.967,38	Disperindag
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan	6,15	Lintas PD
		4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,03	Lintas PD
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	D.PU dan PR dan D. Perhubungan
		Rasio Elektrifikasi	99,17	D. ESDM
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	D. PU dan PR dan D. Perhubungan
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	99,17	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	62,40	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	53,67	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,518	D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 Indeks Kualitas Air	65,65	D. Lingkungan Hidup
		5.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	83,05	
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	69,52	D. Kehutanan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	BPBD

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
A	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	30.454.818.195	
1	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.546.443.599	B. Kesbangpol
2	Pendidikan Politik Masyarakat	811.612.700	
3	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	310.708.000	
4	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.294.461.200	
5	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	173.503.823	
6	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	195.341.750	Satpol PP dan Damkar
7	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3.160.171.853	
8	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	100.000.000	
9	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	460.000.000	
10	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	56.063.500	
11	Pemetaan daerah rawan kebakaran	87.218.779	
12	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.032.937.312	Biro Bina Mental dan Kesra
13	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	17.235.531.779	
14	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	2.990.823.900	
B	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	11.674.715.334	
1	Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya	1.371.368.046	D. Kebudayaan
2	Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	900.797.650	
3	Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	2.710.333.229	
4	Pengelolaan Kekayaan Budaya	4.080.914.160	
5	Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	2.611.302.249	
C	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	43.634.927.833,-	
1	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400	Inspektorat Provinsi
2	Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum	7.154.165.985	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
3	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.302.805.543	Biro Adm. P2 BMD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.570.754.265	Biro Umum, D. Perindag, D. Nakertrans dan D. PU PR
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.910.726.370	B. Keuangan Daerah
6	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	735.504.800	
7	Peningkatan Pendapatan Daerah	6.940.473.189	
8	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	435.920.000	Bappeda
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.003.481.839	
10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.073.417.468	
11	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	490.296.880	Biro Pemerintahan Biro
12	Pengelolaan Otonomi Daerah	3.814.543.100	Pemerintahan Biro
13	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda	1.383.067.150	Biro Adm. P2 BMD
14	Kerjasama Pembangunan	2.036.882.197	Biro Rantau
15	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	435.081.000	Biro Rantau
16	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	351.799.160	Biro Rantau
17	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Prov Sumatera Barat	372.031.400	Biro Organisasi
18	Manajemen Perubahan	325.396.800	Biro Organisasi
19	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	441.258.416	Biro Organisasi
20	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	1.716.327.871	Biro Perekonomian
D	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	38.109.750.333	
1	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	11.899.892.100	BKD, BPSDM dan Biro Organisasi
2	Pendidikan Kedinasan	10.272.161.150	
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	801.544.650	
4	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	1.008.647.410	
5	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	2.571.402.400	D. Komunikasi dan Informatika
6	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	171.488.000	
7	Informasi dan Komunikasi Publik	842.587.650	
8	Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah	7.253.646.823	
9	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	190.108.000	
10	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan	498.590.650	
11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.599.681.500	Biro Humas
E	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	97.715.160.173	
1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2.152.313.028	Biro Adm. P2 BMD dan Biro Umum

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	111.602.850	Biro Organisasi,
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379	Set DPRD
4	Penguatan Inovasi Daerah	2.028.916.900	Balitbang
5	Pengembangan Data Dan Informasi	379.594.060	B. Penghubung
6	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.073.589.012	B. Penghubung
7	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	16.412.958.722	B. Penghubung, Biro Umum
8	Penataan Administrasi Kependudukan	3.081.886.150	D. Pengendalian Penduduk, KB, kependudukan dan capil
9	Peningkatan Pelayanan Publik	3.213.194.226	B. Keuangan Daerah dan B. Penghubung
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	485.934.620	D. Kearsipan dan Perpustakaan
11	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	565.689.400	
12	Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan	1.597.643.976	Balitbang
13	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	304.844.600	Biro Hukum
14	Pembangunan Materi Hukum	1.103.757.350	Biro Hukum
15	Sarana Dan Informasi Hukum	114.015.000	Biro Hukum
16	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	696.615.900	Biro Hukum
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	815.978.690.288	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	3.746.183.056	D. Pendidikan
2	Pendidikan Berkarakter	497.377.280	
3	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	22.584.536.710	
4	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	12.221.301.390	
5	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	146.461.176.868	
6	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	629.555.097.828	
7	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	22.884.680	Biro Bina Mental
8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	890.132.476	D. Kearsipan dan Perpustakaan
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	569.386.085.305	
1	Obat dan Pembekalan Kesehatan	4.375.643.100	D. Kesehatan, 4 RSUD
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	8.936.426.725	
3	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.848.573.470	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	1.683.388.540	
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	501.786.000	
6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	498.950.600	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
7	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	169.746.883.131	
8	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	854.581.100	D. Kesehatan, 4
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	75.000.000	RSUD
10	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	258.682.400	
11	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	39.234.695.485	
12	Peningkatan Pelayanan BLUD	312.782.469.710	
13	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	535.642.000	D. Pemberdayaan
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	115.560.000	Perempuan dan
15	Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	157.799.600	Perlindungan
16	Peningkatan Perlindungan Perempuan	708.861.900	Anak
17	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak	417.173.516	
18	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	959.509.825	
19	Diversifikasi Pangan	1.486.893.800	D. Pangan
20	Peningkatan Ketahanan Pangan	6.641.971.055	
21	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja	39.120.000	D. Pengendalian
22	Keluarga Berencana	317.466.000	Penduduk, KB,
23	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	69.600.000	kependudukan
24	Peningkatan Pengendalian Penduduk	350.500.000	dan capil
25	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.313.486.111	D. Pemuda
26	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.191.884.317	Olahraga
27	Pengembangan Organisasi Pemuda Dan Manajemen Olahraga	1.367.344.400	
28	Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	766.192.520	
29	Peningkatan wawasan dan kreatifitas seni budaya pemuda	150.000.000	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	161.993.952.798	
1	Pengamanan Sumber Daya Hewani	3.156.290.970	D. Peternakan
2	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1.673.231.900	dan Keswan
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	5.033.000.000	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	152.900.000	
5	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	16.297.707.505	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	230.101.000	
7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	999.114.400	D. Perindustrian
8	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	5.915.406.470	dan Perdagangan
9	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	1.868.714.150	
10	Peningkatan Kualitas Produk Industri	2.717.669.850	
11	Pemberdayaan Penyuluhan	90.000.000	D. Tanaman
12	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1.335.000.000	Pangan
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana	17.220.264.734	Hortikultura dan
14	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.958.643.140	Perkebunan
15	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	7.288.412.700	
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	7.620.396.000	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
17	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	13.114.817.840	D. Pariwisata
18	Pengembangan Ekonomi Kreatif	14.367.334.900	
19	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.555.058.500	
20	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	3.290.590.800	
21	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	1.941.553.000	D. Kelautan dan Perikanan
22	Pengembangan Ekonomi Maritim	15.654.137.016	
23	Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	7.668.101.364	
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana	925.098.060	
25	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	729.262.200	
26	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	1.110.133.125	
27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	3.886.890.120	
28	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3.105.455.404	D. Koperasi dan UKM
29	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1.736.090.150	
30	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM	6.521.529.500	
31	Peningkatan SDM Pertanian	995.000.000	Dinas Pertanian
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan	5.836.048.000	Tanaman Pangan
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	8.661.492.580	
1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	4.442.420.010	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.219.072.570	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	9.809.125.600	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	9.809.125.600	D. Perindag
K	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	132.289.568.343	
1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	293.159.750	D. Sosial
2	Pembinaan Anak Terlantar	6.907.798.435	
3	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.267.522.575	
4	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	2.760.876.034	
5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	904.957.700	D. Sosial
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.815.873.972	
7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	54.095.239.520	
8	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	801.444.180	
9	Pemberdayaan Fakir Miskin	9.392.123.209	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
10	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	287.410.800	
11	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	706.528.960	Biro Bina Mental
12	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	258.980.000	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	9.229.389.380	
14	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha	570.000.000	
15	Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	14.351.512.300	
16	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	4.258.380.000	
17	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	908.800.000	
18	Pembangunan Kawasan Perdesaan	659.000.000	
19	Penanggulangan Kemiskinan	861.771.700	
20	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.757.486.800	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha	1.805.085.000	
22	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	688.056.300	
23	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	948.585.350	
24	Pengadaan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	111.200.000	
25	Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal	648.386.378	
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	462.723.573.931	
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	184.577.512.989	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	48.377.347.200	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	3.735.168.000	
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	214.708.096.624	
5	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	773.788.000	
6	Perencanaan Penataan Ruang	4.733.380.000	
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	182.620.000	
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	449.759.450	D. Perhubungan
9	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	132.733.975	
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	992.838.116	
11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	252.829.960	
12	Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.364.690.106	
13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.442.809.511	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
M	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTL	7.357.320.088	
1	Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	6.424.221.060	D. Energi Sumber Daya Mineral
2	Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi	261.122.700	D. Energi Sumber Daya Mineral
3	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	515.518.000	
4	Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	156.458.328	
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	128.764.694.983	
1	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	860.000.000	D. Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	51.636.579.465	
3	Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3.362.985.000	
4	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	66.552.274.253	
5	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	6.352.856.265	
O	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	21.822.878.577	
1	Pengembangan Perumahan	1.803.496.500	D. Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.725.355.630	
3	Pengelolaan Pertanahan	487.638.847	
4	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	1.638.277.400	Dinas Pekerjaan umum
5	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	4.805.000.000	
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	913.790.000	
7	Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah	449.320.200	D. Energi Sumber Daya Mineral
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	9.571.795.031	
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.359.764.000	D. Lingkungan Hidup
2	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.384.969.098	
3	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	885.849.520	
4	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	1.286.403.513	
5	Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	599.372.900	
6	Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	1.055.436.000	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	45.587.191.800	
1	Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	4.542.761.000	D. Kehutanan
2	Pengendalian Kebakaran Hutan	9.942.943.200	
3	Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	17.114.808.050	
4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	8.179.028.950	
5	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	4.623.977.000	
6	Pemantapan Kawasan Hutan	707.766.000	
7	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	475.907.600	D. Kehutanan
R	Menurunnya Risiko Bencana	22.059.640.839	
1	Peningkatan Mitigasi Bencana	3.195.190.194	BPBD
2	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	9.200.956.867	
3	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	4.210.750.000	
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan	4.993.691.178	
5	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	459.052.600	
TOTAL		2.617.595.382.031	

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dan realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Capaian kinerja ini menyajikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian 7 tujuan yang diukur dengan 9 indikator kinerja tujuan dan 18 sasaran strategis yang diukur dengan 23 indikator kinerja sasaran. Realisasi keuangan menyajikan informasi terkait anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

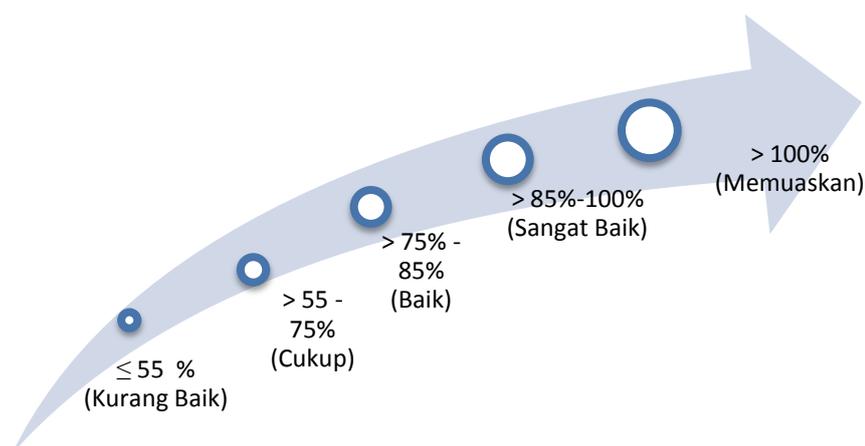
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:



3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian 7 tujuan dengan 9 indikator kinerja tujuan dan 18 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAM AIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH” ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”.				
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	33	100
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	33	100

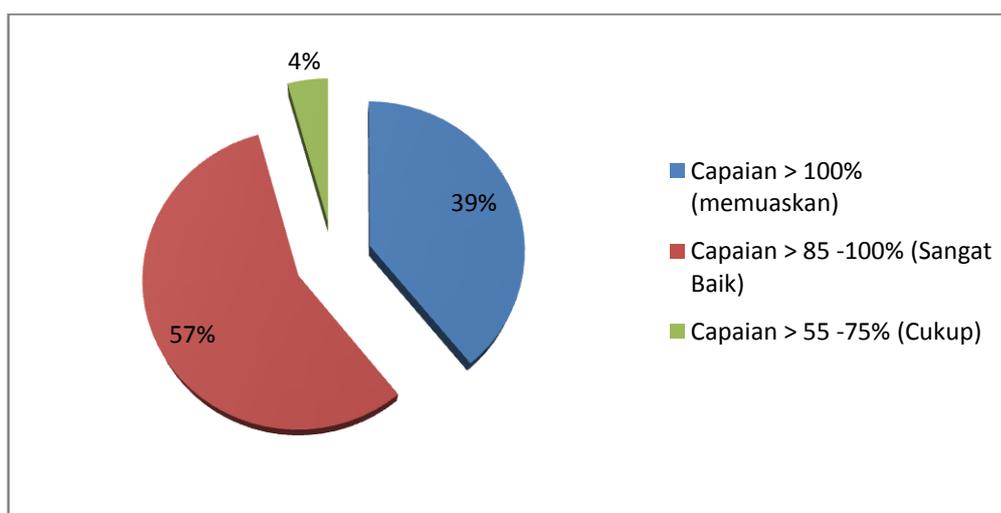
NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL				
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71	65,63	92,44
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	70	76,69	109,56
		2.1.2.2 Indeks e-Government	2,8	2,78	99,29
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	80	84,47	105,59
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI				
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,7	71,73	100,04
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Harapan lama sekolah	14,63	13,95	95,35
		3.1.1.2 Rata-rata lama sekolah	8,79	8,76	99,66
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,22	69,01	99,70
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH				
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,83	5,05	86,62
		Indeks Gini	0,328	0,307	106,40
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	45,44	45,29	99,67

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	4,02	13,76	342,29
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1.967,38	1.339,03	68,06
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan	6,15	6,29	97,72
		4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,03	5,33	111,61
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN				
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	40	108,11
		Rasio Elektrifikasi	99,17	95,82	96,62
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	40	108,11
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	99,17	95,82	96,62
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	62,40	63,95	102,48
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	53,67	55,23	102,91
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,518	77,082	110,88
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 Indeks Kualitas Air	65,65	77,37	117,85

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
		5.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	83,05	89,45	107,71
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	69,52	67,59	97,22
5.2.3.	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	74	100
Rata-Rata Capaian					111,07

Berdasarkan tabel 3.2.1 diketahui rata-rata capaian 23 indikator kinerja yang mengukur ketercapaian 18 sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah 111,07%, termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Sasaran strategis dengan capaian terendah adalah sasaran meningkatnya nilai ekspor dengan capaian 68,06% dan sasaran strategis dengan capaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan capaian 342,29%. Rekapitulasi capaian 23 indikator kinerja 18 sasaran strategis tergambar pada grafik 5.

Grafik 5 Rekapitulasi Capaian 23 Indikator Kinerja Tahun 2019



Sumber Data: Data Diolah

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

MISI 1 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH “ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”.

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama yang berkualitas dapat dicapai jika masyarakat hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Jika kehidupan beragama tersebut berkualitas maka akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman dan damai. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah serta sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, “lamak di awak, katuju dek urang”. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas kehidupan beragama sebagai tujuan yang diukur dengan indeks kerukunan. Perkembangan indeks kerukunan Sumatera Barat diuraikan pada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.1

Indikator Kinerja	Target	2019 Realisasi	% Capaian Kinerja	2018 Realisasi
Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83	62,5

Indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019 ditargetkan 67,2 terealisasi 64,4 dengan tingkat capaian 95,86% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan meningkatnya kualitas kehidupan beragama belum tercapai dengan maksimal. Meskipun demikian, hubungan antar dan intern umat beragama berjalan cukup harmonis yang ditandai dengan tidak adanya konflik keagamaan yang terjadi.

Kehidupan beragama di Sumatera Barat yang rukun didukung oleh budaya minangkabau yang mengandung nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni dan budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks kerukunan adalah dengan lebih meningkatkan koordinasi dan fasilitasi agar dapat memberikan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai dari masing-masing daerah di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas kehidupan beragama telah ditetapkan 1 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :



Kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi yang berarti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebagai sasaran yang diukur menggunakan indikator indeks kerukunan. Penetapan indeks kerukunan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama dengan menggunakan indikator nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

Untuk tahun 2019, indeks kerukunan ditargetkan 67,2 atau meningkat 4,7 dibandingkan indeks kerukunan di tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan indeks kerukunan Sumatera Barat tahun 2018 (menurun 4,5 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama tergambar pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1



Indikator kinerja indeks kerukunan target 67,2, terealisasi 64,4 dengan tingkat capaian 95,83% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indeks kerukunan tahun 2019 diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama. Survei dilakukan pada tanggal 16 sampai 19 Mei 2019 dan 18 sampai 24 Juni 2019, dengan jumlah responden 13.600 orang dari 136 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Sumber: dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2019, dari Hasil Survei Indeks KUB 2019, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2019). Indeks kerukunan Sumatera Barat 64,4 menunjukkan masyarakat Sumatera Barat hidup rukun. Hal ini sesuai dengan level indeks kerukunan sebagai berikut:

No	Range Indeks	Level/Kategori
1	0 - 20	Sangat Tidak Rukun
2	21 - 40	Tidak Rukun
3	41 - 60	Rukun Tingkat Sedang
4	61 - 80	Rukun
5	81 - 100	Sangat Rukun

Capaian indikator kinerja indeks kerukunan sebesar 95,83% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.3.

Tabel 3.3. 3 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan

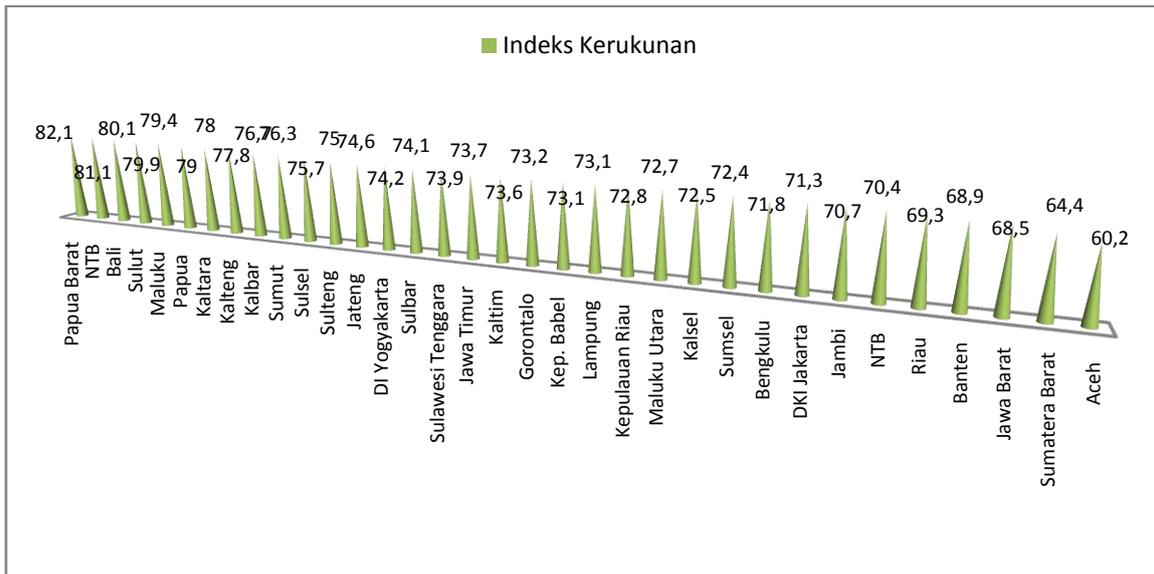
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Indeks Kerukunan	64,4	62,5	95,83	82,35	73,4

Realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator indeks kerukunan <100%. Akan tetapi, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, indeks kerukunan menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 1,9 di tahun 2019. Sejalan dengan meningkatnya realisasi indeks kerukunan dari tahun 2018-2019, capaian kinerja indeks kerukunan tahun 2018-2019 juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 13,18%.

Untuk tahun 2021, indeks kerukunan ditargetkan sebesar 73,4% atau meningkat 9% dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 64,4% menunjukkan pencapaian sebesar 87,74% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Untuk tahun 2019, 18 Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat mempunyai indeks kerukunan di bawah rata-rata indeks kerukunan Nasional (73,83). Dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 33 secara nasional. Indeks kerukunan 34 provinsi di Indonesia tergambar pada grafik 6.

Grafik 6 Indeks Kerukunan Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Sumber data: Balitbang Kemenag

Salah satu hal yang menjadi penghambat rendahnya indeks kerukunan di Sumatera Barat dikarenakan indikator yang dijadikan dasar penilaian indeks kerukunan adalah nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama. Sementara itu, tingkat homogenitas agama di Sumatera Barat $\pm 95\%$ penduduk di Sumatera Barat beragama islam. Untuk provinsi yang heterogen cenderung memiliki nilai indeks kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang homogen.

Untuk meningkatkan indeks kerukunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara:
 - Melakukan pemetaan konflik sosial untuk meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor.
 - Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.
 - Meningkatkan peran tim dan forum-forum strategis dalam mendeteksi dan mengatasi permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di masyarakat. Tim dan forum tersebut antara lain: Tim Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya generasi muda dari berbagai etnis dan paguyuban di Sumatera Barat dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan untuk membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan cara:
- Melakukan sosialisasi dan pembekalan bagi pelajar dan generasi muda sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat serta pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat.
 - Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumatera Barat.
 - Meningkatkan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Mengutamakan tindakan kuratif dan preventif dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi resiko lebih besar dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat yang memberikan informasi-informasi tentang pelanggaran Peraturan Daerah di daerahnya.
 - Meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta tahapan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mengupayakan peningkatan indeks kerukunan melalui:

1. Mengoptimalkan peran tim dan forum-forum strategis dalam mendeteksi dan mengatasi permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di masyarakat sehingga potensi konflik yang terjadi bisa diselesaikan.
2. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama adalah Rp 30.454.818.195,- dan terealisasi Rp. 26.355.224.598,- atau 86,54%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama 95,83% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,54% (tingkat efisiensi 9,29%).

Anggaran sebesar Rp 30.454.818.195,- tersebar pada 14 program yaitu program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (8 kegiatan), program pendidikan politik masyarakat (8 kegiatan), program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) (1 kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (10 kegiatan), program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (3 kegiatan), program peningkatan perlindungan masyarakat (3 kegiatan), program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (10 kegiatan), program pencegahan dan pemberantasan maksiat (2 kegiatan), program peningkatan penegakan peraturan daerah dan pemberdayaan ppns (4 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur (1 kegiatan), program pemetaan daerah rawan kebakaran (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan kehidupan beragama (1 kegiatan), program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamatan, dan pengembangan nilai-nilai agama (9 kegiatan), program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama.

Tujuan 1.2 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang memiliki keragaman dan kekayaan budaya. Kekayaan budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan karya budaya lainnya. Keragaman dan kekayaan budaya perlu dipelihara dan dikembangkan. Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan merupakan upaya pelestarian, gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sebagai tujuan yang diukur dengan jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional. Perkembangan jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional diuraikan pada tabel 3.3.4.

Tabel 3.3. 4 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.2

Indikator Kinerja	Target	2019 Realisasi	% Capaian Kinerja	2018 Realisasi
Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional	33	33	100	20

Indikator kinerja jumlah karya budaya tahun 2019 ditargetkan 33 terealisasi 33 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan tercapai dengan baik. Pada tahun 2019, terjadi penambahan jumlah karya budaya Sumatera Barat yang ditetapkan secara Nasional sebanyak 13 karya budaya. Karya budaya yang ditetapkan di tahun 2019, berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan (7 karya budaya), Kabupaten Pasaman (2 karya budaya), Kabupaten Sijunjung (1 karya budaya), Kabupaten Kepulauan Mentawai (1 karya budaya), Kota Solok (1 karya budaya) dan Kota Sawahlunto (1 karya budaya).

Pencapaian tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan didukung oleh:

1. Pembinaan terhadap 18 nagari percontohan yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 430-609-2018 untuk mendukung penguatan adat salingka nagari.
2. Melakukan pendataan dan identifikasi secara berkala terhadap karya budaya benda dan tak benda.
3. Pemberdayaan pamong budaya yang profesional dan pemangku adat dalam melestarikan dan menjaga karya budaya.

Upaya tersebut di atas akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kebudayaan Sumatera Barat dapat terpelihara dan berkembang. Untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan telah ditetapkan 1 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Pelestarian nilai-nilai budaya merupakan bagian dari pembangunan kebudayaan. Agar tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan Sumatera Barat tercapai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional. Penetapan indikator kinerja tersebut diukur berdasarkan jumlah karya budaya tak benda Sumatera Barat yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional baru digunakan di tahun 2019 sebagai bentuk penyempurnaan dari indikator kinerja tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2019, jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan 33. Penetapan target tahun 2019 ini mempertimbangkan jumlah karya budaya yang telah ditetapkan secara nasional sampai tahun 2018 dan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya tergambar pada tabel 3.3.5.

Tabel 3.3. 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2.1



Indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional target 33, terealisasi 33 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah karya budaya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun karya budaya Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2019 diuraikan pada tabel 3.3.6.

Tabel 3.3. 6 Karya budaya Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2019

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
1	Randang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
4	Rumah Gadang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
7	Ronggeng Pasaman	2014	Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat
8	Silek Minang	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab Dharmasraya
11	Tato Mentawai	2014	Kab Kepulauan Mentawai
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman
13	Rabab	2015	Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman,
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
15	Pasambahan	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
16	Batombe	2015	Kab. Kep. Mentawai
17	Tari Tanduak	2016	Kab. Solok Selatan
18	Tari Piriang	2016	Lubuak Tarok Kab Sijunjung
19	Randai	2017	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
20	Bahasa Tansi	2018	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
21	Babiola	2019	Kota Sawahlunto
22	Tari Benten	2019	Kab. Pesisir Selatan
23	Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan
24	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan
25	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan
26	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan
27	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan
28	Batatah	2019	Kab. Pasaman
29	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman
30	Talempong Unggan	2019	Kab. Sijunjung
31	Sikerei	2019	Kab. Kepulauan Mentawai
32	Arak Bako	2019	Kota Solok
33	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto

Capaian indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional sebesar 100% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.7.

Tabel 3.3. 7 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional	33	20	100		63
2	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan		10		100	

Realisasi indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2019 tercapai sesuai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional tercapai 100%. Indikator kinerja ini baru digunakan di tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Sehingga untuk capaian kinerja indikator ini tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun

2018. Akan tetapi, berdasarkan data yang tersedia pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, diperoleh informasi bahwa jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional sampai tahun 2018 adalah 20 karya budaya. Sehingga di tahun 2019, terjadi peningkatan 13 karya budaya yang ditetapkan secara nasional. Secara nasional, jumlah karya budaya dari 34 Provinsi yang telah ditetapkan secara nasional mencapai 1086 karya budaya.

Untuk tahun 2021, jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan sebesar 63 karya budaya atau meningkat 30 karya budaya dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 33 karya budaya menunjukkan pencapaian sebesar 52,38% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Dalam meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya hambatan yang dihadapi antara lain belum maksimalnya peran pemangku adat untuk mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan inventarisir data kebudayaan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota yang belum memadai.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya antara lain:

1. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
2. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
3. Pengelolaan 700 objek cagar budaya koleksi museum Adityawarman.
4. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
5. Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.
6. Penetapan 18 nagari percontohan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 430-609-2018 untuk mendukung penguatan adat salingka nagari.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya Rp 11.674.715.334,- dan terealisasi Rp. 10.964.676.039,- atau 93,92%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,92% (tingkat efisiensi 6,08%).

Anggaran sebesar Rp 11.674.715.334,- tersebar pada 5 program yaitu program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat, seni dan budaya (3 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya (5 kegiatan), program pengembangan dan penguatan nilai budaya (6 kegiatan), program pengelolaan kekayaan budaya (11 kegiatan), program peningkatan diplomasi seni dan budaya (2 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

MISI 2 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL

Tujuan 2.1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Bagaimana penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah diketahui dari indeks

reformasi birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi diukur berdasarkan hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.

Untuk tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditargetkan 71 (kategori BB) atau mengalami peningkatan sebesar 5,55 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2018 (65,45/kategori B). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan indeks reformasi birokrasi tahun 2018 (meningkat 2,98 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Perkembangan penerapan reformasi birokrasi tahun 2018-2019 diuraikan pada tabel 3.3.8.

Tabel 3.3. 8 Perkembangan Penerapan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019



Berdasarkan tabel 3.3.8, diketahui:

1. Pada tahun 2019, indeks reformasi birokrasi ditargetkan 71 (kategori BB), terealisasi 65,63 (kategori B) dengan tingkat capaian 92,44% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.
2. Indeks reformasi birokrasi tahun 2019 belum tercapai sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2018, indeks reformasi birokrasi tahun 2019 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,18.
3. Berbanding terbalik dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi di tahun 2019, capaian kinerja tahun 2018-2019 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 9,83% dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 (102,27%).

Realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2019 diukur berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/234/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang hasil evaluasi

pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018 yang menunjukkan indeks reformasi birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat sebesar 65,63 (kategori B) sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3.9.

Tabel 3.3. 9 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2018
I Komponen Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5	2,01	2
2	Penataan Peraturan PerUUan	5	2,09	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,84	1,66
4	Penataan Tatalaksana	5	2,83	2,95
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11,89	12,23
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,6	3,73
7	Penguatan Pengawasan	12	5,34	5,42
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,38	3,57
Total Komponen Pengungkit (A)		60	33,98	33,65
II Komponen Hasil				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,04	10,21
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,86	4,08
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,74	6,14
4	Opini BPK	3	3	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7,83	8,55
Total Komponen Hasil (B)		40	31,47	31,98
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	65,45	65,63

Sumber data: KemenPAN dan RB

Peningkatan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2019 tidak terlalu besar. Hambatan peningkatan penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Agen perubahan dan tim pokja masing-masing area perubahan yang dibentuk masih belum maksimal menjalankan peran dan fungsinya.
2. Belum mempunyai rencana aksi peningkatan area perubahan reformasi birokrasi.
3. Belum adanya monitoring dan evaluasi pencapaian program reformasi birokrasi.
4. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja.
5. Integritas aparatur pemberi layanan yang belum baik.
6. Belum maksimalnya peran pengawasan dari inspektorat provinsi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi antara lain:

1. Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan RB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 060-467-2019.
2. Evaluasi terhadap penataan kelembagaan provinsi sesuai dengan Permendagri 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
3. Menyusun Ranpergub tentang peta proses bisnis Provinsi Sumatera Barat.
4. Penerapan pemakaian tanda tangan elektronik untuk eselon II di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
5. Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor:00/3637/SE/BKD/2019.
6. Meningkatkan pemahaman tim pokja masing-masing area perubahan dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Menindaklanjuti saran/rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Penerimaan CPNS, PPPK dan Praja IPDN telah dilaksanakan secara transparan dan objektif dengan sistem CAT.
9. Masing-masing pegawai telah menetapkan kinerja individu melalui perjanjian kinerja pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah diselaraskan dengan indikator kinerja atasan masing-masing yang dievaluasi setiap tahun.
10. Melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan:

1. Menyempurnakan rencana aksi pencapaian masing-masing area perubahan reformasi birokrasi.
2. Mengoptimalkan peran tim pokja dari masing-masing area perubahan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan.

4. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk menilai kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Menggunakan Cascading Kinerja sebagai dasar menetapkan anggaran kegiatan.
6. Mengoptimalkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Monitoring dan evaluasi pencapaian target rencana aksi pencapaian masing-masing area perubahan.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel merupakan sasaran pertama yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan penerapan reformasi Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan dan nilai evaluasi SAKIP. Capaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel tergambar pada tabel 3.3.10.

Tabel 3.3. 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
	Rata-rata Capaian		98,65

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 98,65% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ada 4 jenis opini yang akan diberikan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap instansi Pemerintah yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka di tahun 2019 juga ditargetkan akan dapat mempertahankan opini WTP.

Indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan target WTP, terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi opini BPK tahun 2019 diukur berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 21/LHP/XVIII.PDG/04/2019 tanggal 24 April 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan sebesar 100% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.11.

Tabel 3.3. 11 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	100	WTP

Realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2019 tercapai sesuai dengan yang ditargetkan sehingga capaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan tercapai 100%. Opini WTP telah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013. Dengan perolehan ini, Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan prediket WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Atas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan dari Indonesia Award 2019 Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Jakarta dan Penghargaan dari media GATRA kategori Optimalisasi Anggaran.

Untuk tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap menargetkan untuk memperoleh Opini WTP terhadap Laporan Keuangan. Dengan upaya yang maksimal, koordinasi dan kerjasama yang baik didukung oleh komitmen Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan keuangan daerah, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 9 Provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera (Provinsi DI Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau) telah memperoleh Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018.

Sementara itu, untuk 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebanyak 18 kabupaten/kota sudah memperoleh Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Tahun

2018 dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman yang memperoleh Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Hambatan/tantangan yang dihadapi untuk mencapai opini WTP terhadap Laporan Keuangan antara lain:

- a. Adanya temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern seperti pencatatan aset yang belum dilakukan secara memadai dan pengelolaan penerimaan yang belum maksimal.
- b. Adanya temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru serta denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan.

Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh Opini WTP terhadap Laporan Keuangan antara lain:

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- c. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi antara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berdampak pada penyelesaian laporan tepat waktu dan meminimalisir kesalahan pada tahap penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- d. Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi terhadap penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah melalui Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
- e. Melaksanakan reviu terhadap Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala (semesteran dan tahunan).
- f. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- g. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara konsisten antara Bidang Akuntansi, Bidang BUD dan UPTD Bidang Pelayanan Pendapatan Provinsi, Bank Nagari dan OPD terkait.
- h. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap, aset lainnya investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang Akuntansi, Biro Pengelolaan Aset Daerah, Biro Perekonomian, Bank Nagari dan OPD terkait.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan opini WTP di tahun yang akan datang antara lain:

- a. Menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.
- b. Melakukan perbaikan terus menerus dalam hal pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- c. Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan penatausahaan dan pelaksanaan keuangan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah Rp. 23.755.424.552,-, terealisasi sebesar Rp. 21.969.750.242 atau 92,48%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,48% (tingkat efisiensi 7,52%).

Anggaran sebesar Rp. 23.755.424.552,-, tersebar pada 7 program yaitu program implementasi penanganan pengaduan (1 kegiatan), program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum (11 kegiatan), program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (6 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (6 kegiatan), program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan (16 kegiatan), program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (4 kegiatan) program peningkatan pendapatan daerah (6 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut instansi pemerintah perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah menerapkan SAKIP, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan nilai evaluasi SAKIP diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Untuk tahun 2019, nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditargetkan BB dengan nilai 78 atau mengalami peningkatan sebesar 3,24 dibandingkan nilai BB di tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2018 (meningkat 1,84 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 target BB (78), terealisasi BB (75,89) dengan tingkat capaian 97,29% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 diukur berdasarkan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/187/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019. Rincian nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Nilai tahun 2019
1	Perencanaan Kinerja	24,95
2	Pengukuran Kinerja	17,73
3	Pelaporan Kinerja	11,70
4	Evaluasi Internal	7,66
5	Capaian kinerja	13,85
Nilai Hasil Evaluasi		75,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sebesar 97,29% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.12.

Tabel 3.3. 12 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (75,89)	BB (74,76)	97,29	100	A

Realisasi indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator nilai evaluasi SAKIP tercapai <100%. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bisa bertahan dengan prediket BB yang sudah diperoleh sejak tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai evaluasi SAKIP mengalami peningkatan sebesar 1,13 di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk memperoleh nilai evaluasi SAKIP A. Untuk pencapaiannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan Sistem AKIP.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 9 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja prediket BB. Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan prediket nilai akuntabilitas kinerja AA, A dan BB tahun 2019 tergambar pada tabel 3.3.13.

Tabel 3.3. 13 Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan Prediket Nilai Akuntabilitas Kinerja AA, A dan BB tahun 2019

No	Provinsi	Prediket Nilai	No	Provinsi	Prediket Nilai
1	DI Yogyakarta	AA	8	DKI Jakarta	BB
2	Kalimantan Selatan	A	9	Nusa Tenggara Barat	BB
3	Jawa Timur	A	10	Kepulauan Bangka Belitung	BB
4	Jawa Barat	A	11	Kepulauan Riau	BB
5	Kalimantan Utara	BB	12	Sumatera Barat	BB
6	Bali	BB	13	Sumatera Selatan	BB

No	Provinsi	Prediket Nilai	No	Provinsi	Prediket Nilai
7	Kalimantan Timur	BB			

Sumber data: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2019

Untuk 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebanyak 3 kabupaten/kota memperoleh nilai BB (15,79%), 12 Kabupaten/Kota memperoleh nilai B dan 4 kabupaten/kota masih bernilai CC. Ada 3 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang telah berhasil memperoleh nilai B di tahun 2019 yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang Panjang. Gambaran nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota se Sumatera Barat diuraikan pada tabel 3.3.14.

Tabel 3.3. 14 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Prediket Nilai
1	Kota Payakumbuh	BB
2	Kota Padang	BB
3	Kota Bukittinggi	BB
4	Kota Padang Panjang	B
5	Kota Sawahlunto	B
6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
7	Kabupaten Dharmasraya	B
8	Kabupaten Solok	B
9	Kabupaten Pesisir Selatan	B
10	Kabupaten Tanah Datar	B
11	Kabupaten Agam	B
12	Kota Solok	B
13	Kabupaten Padang Pariaman	B
14	Kabupaten Pasaman	B
15	Kabupaten Sijunjung	B
16	Kabupaten Pasaman Barat	CC
17	Kabupaten Solok Selatan	CC
18	Kabupaten Limapuluh Kota	CC
19	Kota Pariaman	CC

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2019

Hambatan peningkatan implementasi SAKIP di tahun 2019 adalah:

- Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
- Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
- Keterlibatan Bappeda dan inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.
- Sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja masih belum terintegrasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP adalah:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target).
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai Perjanjian Kinerja level Staf
3. Penyusunan SKP sudah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja
4. Meningkatkan pemahaman ASN tentang implementasi Sistem AKIP melalui pelaksanaan kegiatan Bimtek SAKIP
5. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP di tahun yang akan datang:

1. Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja (e-kinerja).
2. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk menilai kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Menggunakan Cascading Kinerja sebagai dasar menetapkan anggaran kegiatan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP adalah Rp 19.879.503.281,- dan terealisasi Rp. 18.608.419.396,- atau 93,61%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP. Hal ini dilihat dari persentase

capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP 97,29% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,61% (tingkat efisiensi 3,68%).

Anggaran sebesar Rp 19.879.503.281,- tersebar pada 12 program yaitu program pengembangan data dan informasi pembangunan (4 kegiatan), program perencanaan pembangunan daerah (9 kegiatan), program koordinasi perencanaan pembangunan daerah (29 kegiatan), program peningkatan akuntabilitas kinerja provinsi dan SKPD provinsi Sumatera Barat (4 kegiatan), program pengelolaan otonomi daerah (15 kegiatan), program peningkatan manajemen pemerintah daerah (2 kegiatan), peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemda (8 kegiatan), program kerjasama pembangunan (5 kegiatan), program program administrasi kewilayahan pemerintahan daerah (4 kegiatan), program manajemen perubahan (2 kegiatan), program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan) dan program penerapan pemerintahan yang baik (19 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP.



Sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien menjadi sasaran kedua yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan penerapan reformasi Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks profesionalitas ASN dan indeks *e-government*. Capaian sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien tergambar pada tabel 3.3.15.

Tabel 3.3. 15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2



Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebesar 104,43% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut profesional. Untuk melihat sejauh mana tingkat profesionalitas individu/kelompok dalam suatu organisasi dapat digunakan indikator Indeks Profesionalitas ASN. Penetapan Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Untuk tahun 2019, indeks profesionalitas ASN ditargetkan sebesar 70 lebih rendah dibandingkan indeks profesionalitas ASN tahun 2018 (76). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2018 (menurun 12,43 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan instrumen penilaian indeks profesionalitas ASN yang bisa mengalami perubahan dari tahun sebelumnya serta target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Indeks profesionalitas ASN target 70 terealisasi 76,69 dengan tingkat capaian 109,56% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Pengukuran	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	25	14,90
2	Kompetensi	40	31,47
3	Kinerja	30	25,32
4	Kedisiplinan	5	5
Total		100	76,69
Kategori		Sedang	

Capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 109,56% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.16.

Tabel 3.3. 16 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Indeks Profesionalitas ASN	76,69	76	109,56	111,76	74

Realisasi indeks profesionalitas ASN tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator indeks profesionalitas ASN tercapai 109,56%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,69. Tren capaian kinerja tahun 2018-2019 menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan 2,2%. Untuk tahun 2019, jumlah ASN yang menjadi sampel lebih banyak dibandingkan ASN tahun 2018. Jumlah ASN yang dihitung di tahun 2019 adalah sebanyak 6.170 orang (1.038 orang struktural, 3.976 fungsional dan 1.156 pelaksana. Sedangkan di tahun 2018, jumlah ASN yang menjadi sampel adalah sebanyak 3.330 orang (1.096 struktural dan 2.234 staf). Untuk tahun berikutnya, 100% ASN akan menjadi sampel pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2021, realisasi tahun 2019 telah mencapai target tahun 2021. Akan tetapi, dikarenakan perhitungan di tahun yang akan sampelnnya semua ASN maka tahun 2021 tetap ditargetkan 74.

Hambatan/kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Masih belum optimalnya nilai kompetensi pada PNS di lingkungan OPD Provinsi Sumatera Barat karena minimnya pengiriman PNS untuk mengikuti peningkatan kompetensi.
2. Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk aparatur dan widyaiswara.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN adalah:

1. Melaksanakan diklat teknis dan diklat fungsional kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama tahun 2019, sebanyak 1.029 orang ASN telah mengikuti pelatihan paling sedikit 20 JPL setahun.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penyelenggaraan diklat dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menjadikan disiplin sebagai salah satu instrumen dalam menghitung Tambahan Penghasilan ASN.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan disiplin/kode etik seperti rekapitulasi atas kehadiran pegawai setiap bulan.
5. *Assessment* pegawai telah dilaksanakan dalam rapat pertimbangan Baperjakat dalam menempatkan PNS pada jabatan struktural, promosi atau pindah. Pertimbangan didasarkan pada hasil pemetaan potensi pegawai sebagai salah satu *asesment* kompetensi individu.

Upaya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN di masa yang akan datang adalah:

1. Melakukan peningkatan kompetensi PNS secara merata pada masing-masing PNS di Perangkat Daerah melalui peningkatan pendidikan, pengiriman PNS mengikuti diklat dan Bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan pengawasan dalam pencapaian target kinerja dan disiplin PNS yang dilakukan oleh atasan langsung.
3. Pengukuran kinerja masing-masing ASN mulai tahun 2020 akan dilaksanakan menggunakan aplikasi e-kinerja sehingga akan lebih mudah untuk pemantauan dan penilaian kerjanya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN adalah Rp. 23.982.245.310,- terealisasi sebesar Rp. 22.141.843.814,- atau 92,33%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 109,56% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,33% (tingkat efisiensi 17,23).

Anggaran sebesar Rp. 23.982.245.310,- tersebar pada 4 program yaitu program peningkatan manajemen SDM aparatur (40 kegiatan), program pendidikan kedinasan (17 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan aparatur (8 kegiatan) dan program penataan kelembagaan daerah pemerintah daerah (4 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indeks profesionalitas ASN.

2. Indeks e-government/SPBE



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dengan menjalankan SPBE diharapkan Pemerintah lebih transparan dan pelayanan publik lebih cepat dan efektif. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE setiap dua tahun sekali.

Untuk tahun 2019, indeks *e-government*/SPBE ditargetkan sebesar 2,8 atau mengalami peningkatan sebesar 0,37 dibandingkan indeks *e-government*/SPBE tahun 2018 (2,43). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan indeks *e-government*/SPBE tahun 2018 juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Indeks *e-government*/SPBE target 2,8 terealisasi 2,78 dengan tingkat capaian 99,29% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2019 diukur berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap tingkat kematangan implementasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, diketahui indeks SPBE yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 2,78 termasuk prediket Baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Domain Penilaian	Nilai
1	Kebijakan SPBE	2,29
2	Tata Kelola	2
3	Layanan SPBE	3,33

Capaian indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE sebesar 99,29% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.17.

Tabel 3.3. 17 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks *e-government*/SPBE

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Indeks <i>e-government</i> /SPBE	2,78	2,43	99,29	93,46	3

Realisasi indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2019 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indeks *e-government* tercapai <100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaian kinerja indikator

ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,35 dan 5,83% di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, indeks *e-government*/SPBE ditargetkan sebesar 3 atau meningkat 0,22 dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 2,78 menunjukkan pencapaian sebesar 92,67% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Hambatan/tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan indeks *e-government*/SPBE tahun 2019 adalah:

1. Masih belum maksimalnya implementasi *e-government* di Provinsi Sumatera Barat.
2. Infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas *bandwith* yang masih belum memadai.
3. Pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum maksimal.
4. Masih ada aplikasi yang belum terintegrasi.

Untuk meningkatkan indeks *e-government*/SPBE, di tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya berikut ini:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD yang berperan dalam implementasi penyelenggaraan *e-government*.
2. Peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas *bandwith* yang lebih memadai.
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM tenaga ahli IT Pengelola/Penyelenggara *e-government*.
5. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

1. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SPBE tahun 2018.
2. Penguatan SDM yang menunjang pengelolaan aplikasi dan infrastruktur yang dibangun.
3. Pengembangan jaringan TIK berupa perencanaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur.
4. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja indeks e-government/SPBE adalah Rp. 14.127.505.023,-, terealisasi sebesar Rp. 13.630.194.274 atau 96,48%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja indeks e-government/SPBE. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja indeks e-government/SPBE sebesar 99,29% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 96,48% (tingkat efisiensi 2,81%).

Anggaran sebesar Rp. 14.127.505.023,- tersebar pada 7 program yaitu program kerjasama informasi dan media massa (3 kegiatan), program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi (1 kegiatan), program informasi dan komunikasi publik (4 kegiatan), program pengelolaan e-government pemerintahan daerah (9 kegiatan), program penyediaan data statistik sektoral (1 kegiatan), program pengamanan informasi pemerintah dan persandiaan (2 kegiatan) dan program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (10 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja indeks e-government/SPBE.

**Sasaran
Strategis
2.1.3**

**Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik**

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan penerapan reformasi Birokrasi. Pelayanan publik berkualitas jika pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi perangkat daerah yang secara langsung diberikan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan rata-rata survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Publik sebagai indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Penetapan rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik diukur berdasarkan skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit kerja yang melaksanakan survei setiap tahunnya.

Untuk tahun 2019, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan 80 (kategori Baik) atau mengalami peningkatan sebesar 1,17 dari rata-rata survei kepuasan tahun 2018. Penetapan target 80 dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan semua UKPP dapat memberikan pelayanan minimal *baik* kepada masyarakat. Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tergambar pada tabel 3.3.18.

Tabel 3.3. 18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3.



Indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik target 80, terealisasi 84,47 dengan tingkat capaian 105,59% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari data rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi. Selama tahun 2019, ada 44 UPP yang melaksanakan survei yang tersebar pada 13 Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 3.3.19.

Tabel 3.3. 19 Rincian Hasil Survei IKM Tahun 2019

No	OPD yang melaksanakan Survei	Skor
1	Dinas Pendidikan	79,20
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,44
3	DPMPTSP	81,74
4	Badan Keuangan Daerah	78,25
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,14
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	74,16
7	Dinas Kesehatan	87,67
8	Dinas Kehutanan	81,22
9	Dinas PSDA	67,60
10	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	96,46
11	RSJ HB Saanin	86,16
12	RSUD M. Natsir	99,71
13	RSUD Pariaman	97,47
Rata-rata		84,47
Prediket		Baik

Sumber data: Biro Organisasi

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 105,59% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.20.

Tabel 3.3. 20 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	84,47	78,83	105,59	98,54	80

Realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaian indikator kinerja ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 5,64 dan 7,05%. Secara absolut, jumlah UKP yang melakukan survei di tahun 2019 juga meningkat sebesar 23 UKP dibandingkan yang melakukan survei di tahun 2018 (21 UKP).

Dibandingkan dengan target tahun 2021, realisasi tahun 2019 telah mencapai target tahun 2021. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap mengharapkan semua UKPP dapat memberikan pelayanan minimal *baik* kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya secara optimal untuk mempertahankan pencapaian tersebut.

Hambatan/tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun 2019 adalah:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan masih belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum memadai dan representatif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun 2019 adalah:

1. Penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik. Di tahun 2019 ada 10 inovasi yang ditampilkan oleh Unit Kerja Penyelenggara pelayanan publik.

2. Pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat seperti pembinaan terhadap survey kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Rp. 97.715.160.173,- terealisasi sebesar Rp. 92.347.622.315 atau 94,51%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 105,59% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,51% (tingkat efisiensi 11,08%).

Anggaran sebesar Rp. 97.715.160.173,- tersebar pada 16 program yaitu program pengembangan manajemen pelayanan publik (14 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan publik (1 kegiatan), program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (12 kegiatan), program penguatan inovasi daerah (4 kegiatan), program pengembangan data dan informasi (3 kegiatan), program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah (5 kegiatan), program peningkatan pelayanan kedinasan (5 kegiatan), program penataan administrasi kependudukan (30 kegiatan), program peningkatan pelayanan publik (7 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan (5 kegiatan), program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sistem kearsipan (7 kegiatan), program penelitian dan pengembangan iptek untuk menunjang pemerintahan daerah dan pembangunan (8 kegiatan), program peningkatan supremasi hukum dan perlindungan hukum (4 kegiatan), program pembangunan materi hukum (4 kegiatan), program sarana dan

informasi hukum (1 kegiatan) dan program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik.

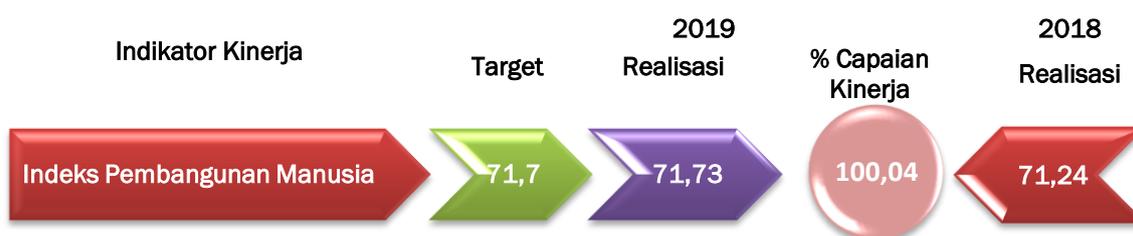
MISI 3 MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan dan pembangunan dalam suatu negara. Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar dapat menjadi modal dalam pembangunan suatu negara. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2019, indeks pembangunan manusia ditargetkan 71,7 atau meningkat 0,46 dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia tahun 2018 (71,24). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan indeks pembangunan manusia tahun 2018 (meningkat 0,51 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Perkembangan indeks pembangunan manusia tahun 2018-2019 diuraikan pada tabel 3.3.21.

Tabel 3.3. 21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2019



Berdasarkan tabel 3.3.21, diketahui:

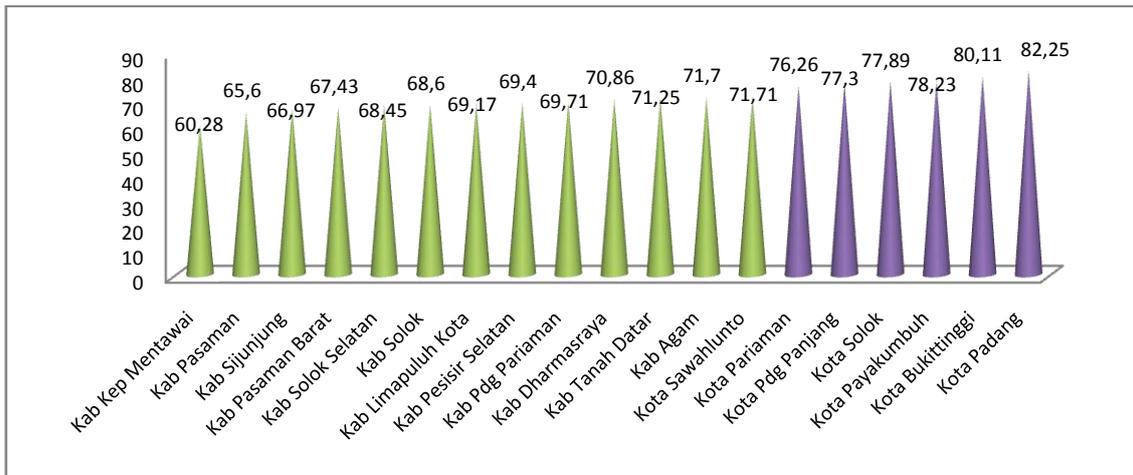
1. Pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia ditargetkan 71,7 (tinggi), terealisasi 71,73 (tinggi) dengan tingkat capaian 100,04% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.
2. Realisasi Indeks pembangunan manusia tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2018, indeks pembangunan manusia menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,49.
3. Sejalan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di tahun 2019, capaian kinerja tahun 2018-2019 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,98% dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 (99,06%).

Realisasi indeks pembangunan manusia tahun 2019 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik No.29/05/13/Th. XXII tanggal 6 Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen IPM	2019
1	Angka Harapan Hidup	69,01
2	Harapan Lama Sekolah	13,95
3	Rata-rata lama sekolah	8,76
4	Pengeluaran perkapita	10,638
	IPM	71,73

Nilai IPM Sumatera Barat merupakan akumulasi dari angka IPM 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019. Dari 19 kabupaten/kota, 6 kabupaten/kota mempunyai IPM yang lebih tinggi dari IPM tingkat provinsi dan 13 kabupaten/kota IPMnya lebih rendah dari IPM tingkat Provinsi. IPM tertinggi berada di Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan gap yang cukup besar yaitu 21,97. Nilai IPM 19 kabupaten/kota tergambar pada grafik 7.

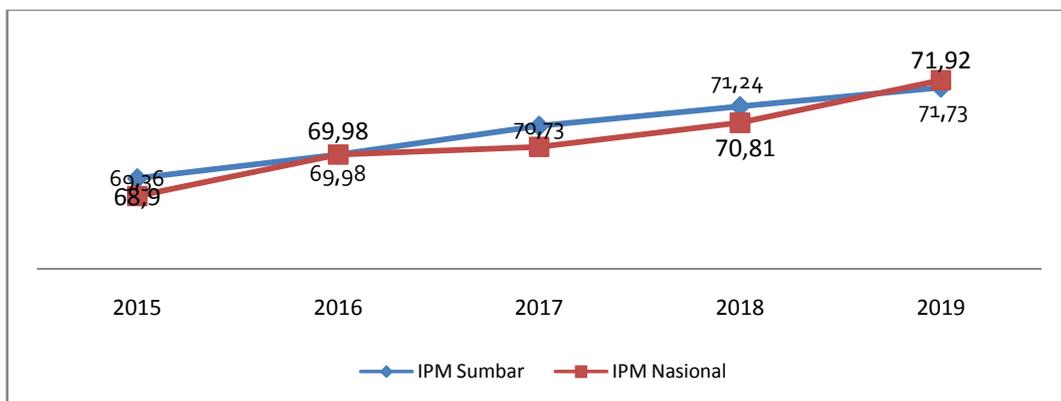
Grafik 7 IPM Kabupaten/kota se Sumatera Barat



Sumber Data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Dibandingkan dengan nasional, nilai IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, 2017 dan 2018 cenderung berada di atas IPM Nasional. Akan tetapi, di tahun 2019, nilai IPM Sumatera Barat berada di bawah IPM Nasional dengan selisih 0,11. Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) IPM Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan pertahun 0,593 sebagaimana tergambar pada grafik 8.

Grafik 8 IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain:

1. Pendistribusian guru yang belum merata dan belum seimbang jumlah guru dengan kebutuhan.
2. Rendahnya lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan di dunia kerja.

3. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan.
4. Belum optimalnya penerapan IPTEK.
5. Belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
6. Beban biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang semakin besar.
7. Belum semua kabupaten/kota se Sumatera Barat mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota.
8. Disparitas sumber daya kesehatan di daerah dan dinamisasi tata kelola pemerintahan yang akan berdampak terhadap capaian program kesehatan.
9. Belum semua fasilitas kesehatan di Sumatera Barat terakreditasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain:

1. Meningkatkan angka harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah di tahun 2019 adalah 13,95 mengalami peningkatan sebesar 0,01 dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tahun 2018 (13,95).

2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di tahun 2019 sebesar 8,76 mengalami peningkatan sebesar 0,04 dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tahun 2018 sebesar 8,76.

3. Meningkatkan angka harapan hidup

Angka harapan hidup di tahun 2019 sebesar 69,01 mengalami peningkatan sebesar 0,23 dibandingkan dengan angka harapan hidup di tahun 2018 sebesar 69,01.

**Sasaran
Strategis
3.1.1**
**Meningkatnya Tingkat Pendidikan
Masyarakat**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan menjadi faktor yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Dalam dunia kerja, pendidikan menjadi modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Barat menetapkan tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran strategis untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat tergambar pada tabel 3.3.22.

Tabel 3.3. 22 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Harapan lama sekolah	14,63	13,95	95,35
Rata-rata lama sekolah	8,79	8,76	99,66
Rata-rata Capaian			97,51

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 97,51% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1 Harapan Lama Sekolah



Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

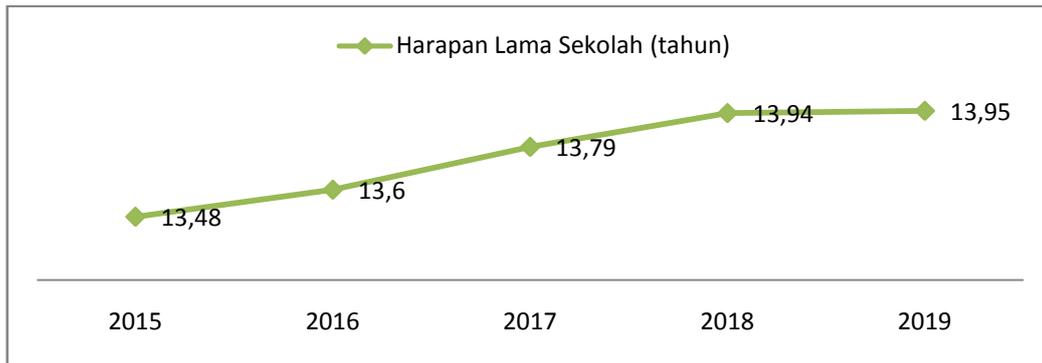
Untuk tahun 2019, harapan lama sekolah ditargetkan 14,63 tahun atau meningkat 0,69 dibandingkan realisasi tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan harapan lama sekolah tahun 2018 (meningkat 0,15 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Indikator kinerja harapan lama sekolah target 14,63, terealisasi 13,95 dengan tingkat capaian 95,35% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik No.29/05/13/Th. XXII tanggal 6 Mei 2019. Harapan lama sekolah 13,95 tahun berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,95 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi (tepatnya kuliah semester IV).

Harapan lama sekolah penduduk Sumatera Barat sepanjang tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,1175. Tren peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan peningkatan 0,19. Perkembangan harapan lama sekolah tahun 2015-2019 tergambar pada grafik 9.

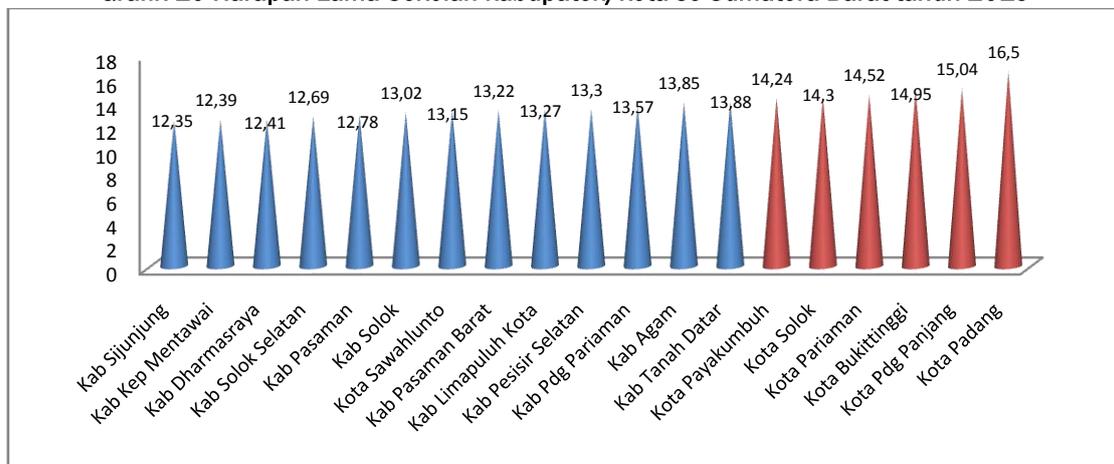
Grafik 9 Perkembangan Harapan Lama Sekolah tahun 2015-2019



Sumber Data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Harapan lama sekolah Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 13,95 merupakan rata-rata harapan lama sekolah 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019. Terdapat 13 kabupaten/kota yang harapan lama sekolahnya berada di bawah harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dan 6 kabupaten/kota harapan lama sekolah sudah di atas Provinsi Sumatera Barat. Harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Padang (16,5) dan terendah pada Kabupaten Sijunjung (12,35) dengan gap sebesar 4,15. Dengan demikian, di Sumatera Barat lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang terendah 12,35 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA (tepatnya kuliah semester 1). Gambaran harapan lama sekolah kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019 tergambar pada grafik 10.

Grafik 10 Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019



Sumber Data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Capaian indikator kinerja harapan lama sekolah sebesar 95,35% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.23.

Tabel 3.3. 23 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja harapan lama sekolah

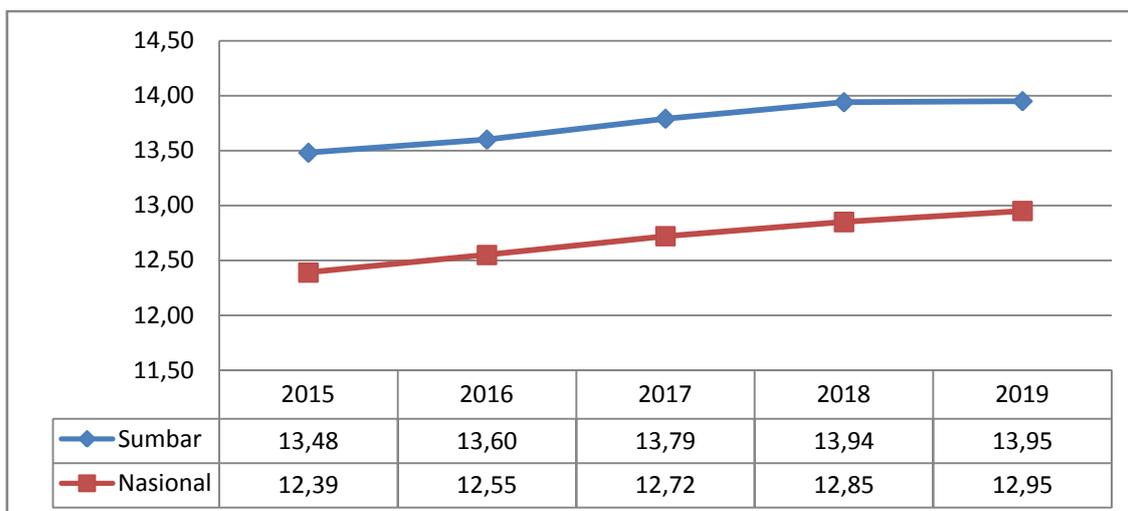
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Harapan lama sekolah	13,95	13,94	95,35	96,81	15,09

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah tercapai di bawah target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator harapan lama sekolah tercapai <100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini masih menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,01 di tahun 2019. Sementara itu, untuk capaian tahun 2018-2019 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 1,46%. Angka harapan lama sekolah sebesar 13,95 tahun menunjukkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,95 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi (tepatnya kuliah semester IV/D1/D2).

Untuk tahun 2021, harapan lama sekolah ditargetkan sebesar 15,09 atau meningkat 1,14 dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 13,95 tahun menunjukkan pencapaian sebesar 92,45% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Harapan lama sekolah Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) lebih tinggi dari harapan lama sekolah tingkat Nasional, sebagaimana tergambar pada grafik 11.

Grafik 11 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2015-2019



Sumber data: BPS Sumatera Barat

2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

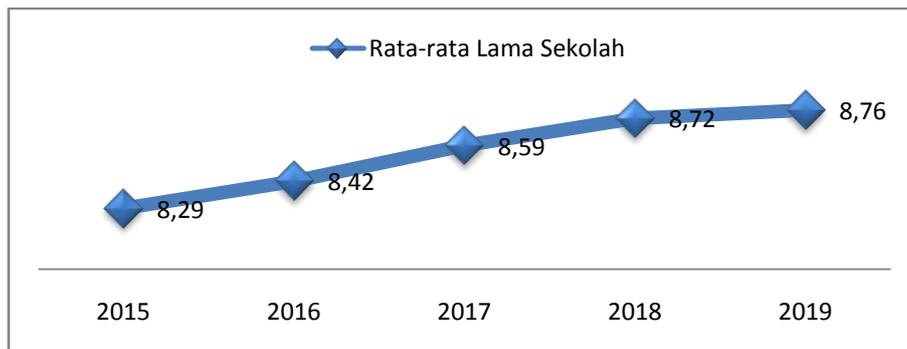
Untuk tahun 2019, rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,79 tahun atau meningkat 0,07 dibandingkan realisasi tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan rata-rata lama sekolah tahun 2018 (meningkat 0,13 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Indikator kinerja rata-rata lama sekolah target 8,79, terealisasi 8,76 dengan tingkat capaian 99,66% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik No.29/05/13/Th. XXII tanggal 6 Mei 2019. Rata-rata lama sekolah 8,76 tahun berarti rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun atau lebih di Sumatera Barat telah menyelesaikan sekolah sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat sepanjang tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,1175. Tren peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan peningkatan 0,17. Untuk tahun 2019, peningkatannya tidak signifikan. Perkembangan rata-rata lama sekolah tahun 2015-2019 tergambar pada grafik 12.

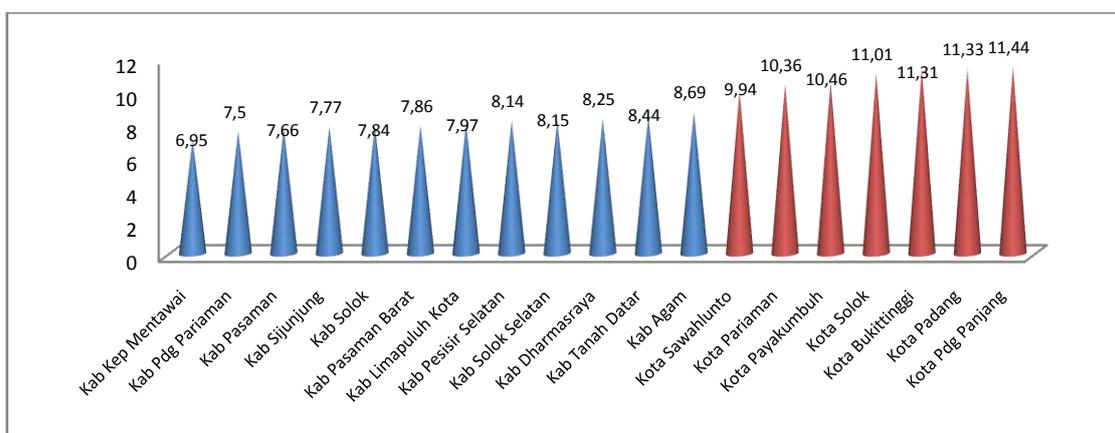
Grafik 12 Perkembangan rata-rata lama sekolah tahun 2015-2019



Sumber Data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Rata-rata lama sekolah Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 8,76 merupakan rata-rata lama sekolah 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019. Gambaran rata-rata lama sekolah kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019 tergambar pada grafik 13.

Grafik 13 Rata-rata Lama Sekolah kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019



Sumber Data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Berdasarkan grafik 13 tergambar 12 kabupaten/kota yang rata-rata lama sekolahnya berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dan 7 kabupaten/kota rata-rata lama sekolah sudah di atas Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Padang Panjang (11,44) dan terendah pada Kabupaten Kepulauan Mentawai (6,95) dengan gap sebesar 4,49. Dengan demikian, di Sumatera Barat minimal rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun atau lebih di Sumatera Barat telah menyelesaikan sekolah sampai kelas sampai kelas 6 Sekolah Dasar (SD).

Capaian indikator kinerja rata-rata lama sekolah sebesar 99,66% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.24.

Tabel 3.3. 24 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata lama sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Rata-rata lama sekolah	8,76	8,72	99,66	101,53	8,92

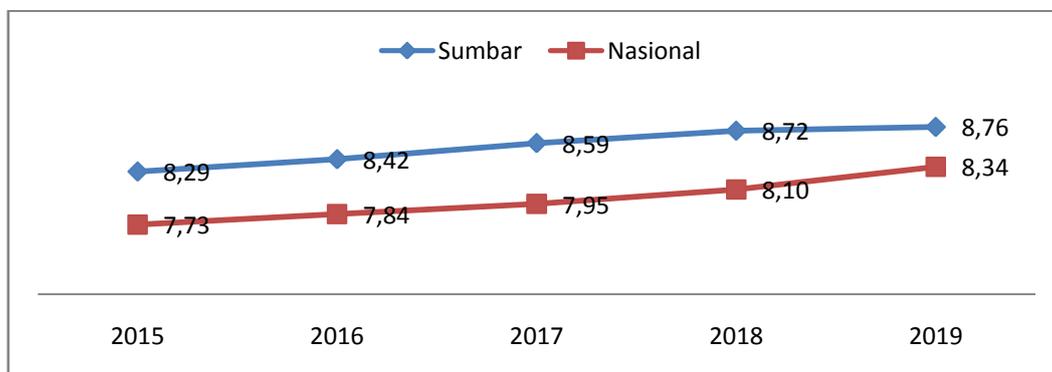
Realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2019 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai <100%. Dibandingkan tahun 2018, realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2019 menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,04. Akan tetapi, untuk

capaian kinerja tahun 2018-2019 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 1,87%. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,76 berarti rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun atau lebih di Sumatera Barat telah menyelesaikan sekolah sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk tahun 2021, rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,92 atau meningkat 0,16 dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 8,76 tahun menunjukkan pencapaian sebesar 98,21% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) lebih tinggi dari harapan lama sekolah tingkat Nasional, sebagaimana tergambar pada grafik 14.

Grafik 14 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2015-2019



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Capaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat tahun 2019 dipengaruhi oleh capaian beberapa indikator berikut ini:

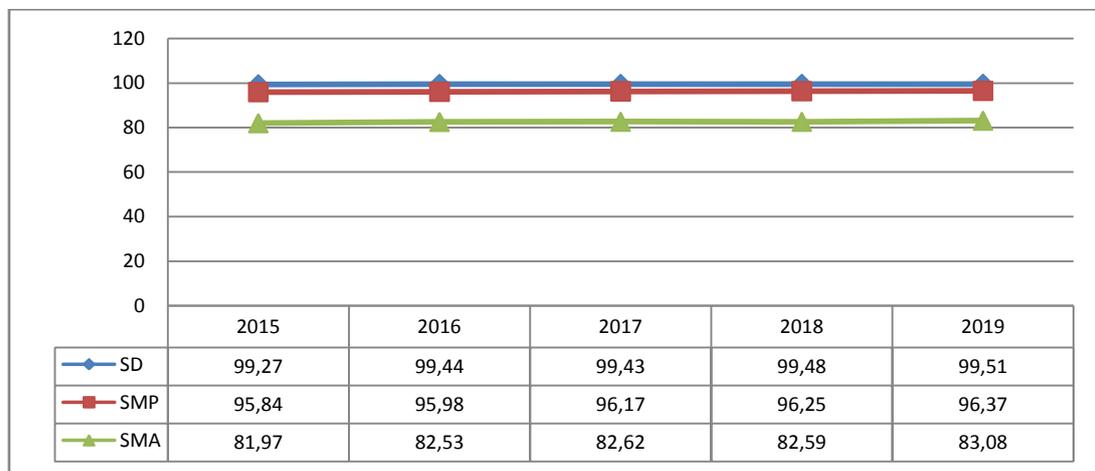
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat daya tampung penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah

penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Capaian APS di setiap tingkat pendidikan di Sumatera Barat (SD, SMP dan SMA) dari tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif. Akan tetapi, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di semua jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan pada grafik 15.

Grafik 15 Angka Partisipasi Sekolah Sumatera Barat tahun 2015-2019

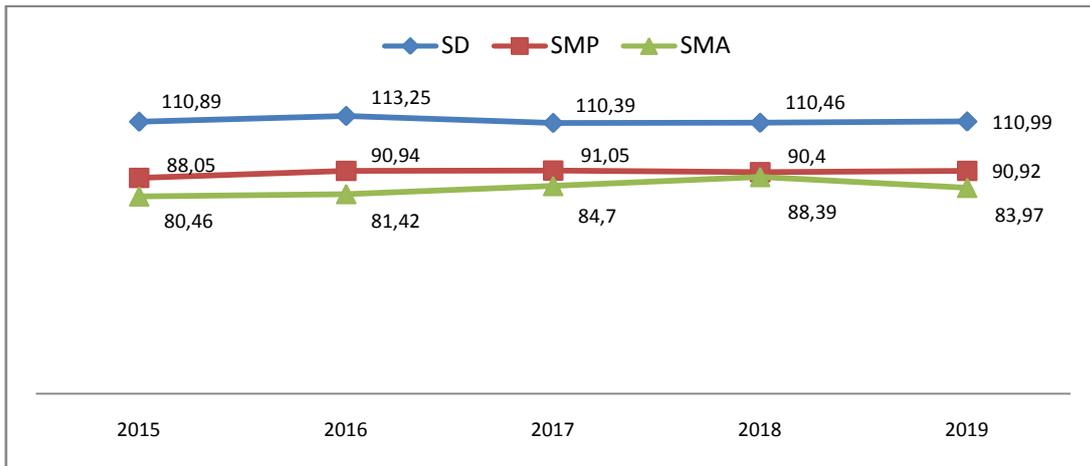


Sumber data: BPS Sumatera Barat

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK di setiap tingkat pendidikan di Sumatera Barat (SD, SMP dan SMA) dari tahun 2015-2019 juga menunjukkan tren positif. APK tertinggi berada di tingkat pendidikan dasar (SD). Sama halnya dengan APK, pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi nilai APKnya semakin rendah. Perkembangan APK tahun 2015-2019 di setiap tingkat pendidikan tergambar pada grafik 16.

Grafik 16 Angka Partisipasi Kasar Sumatera Barat tahun 2015-2019

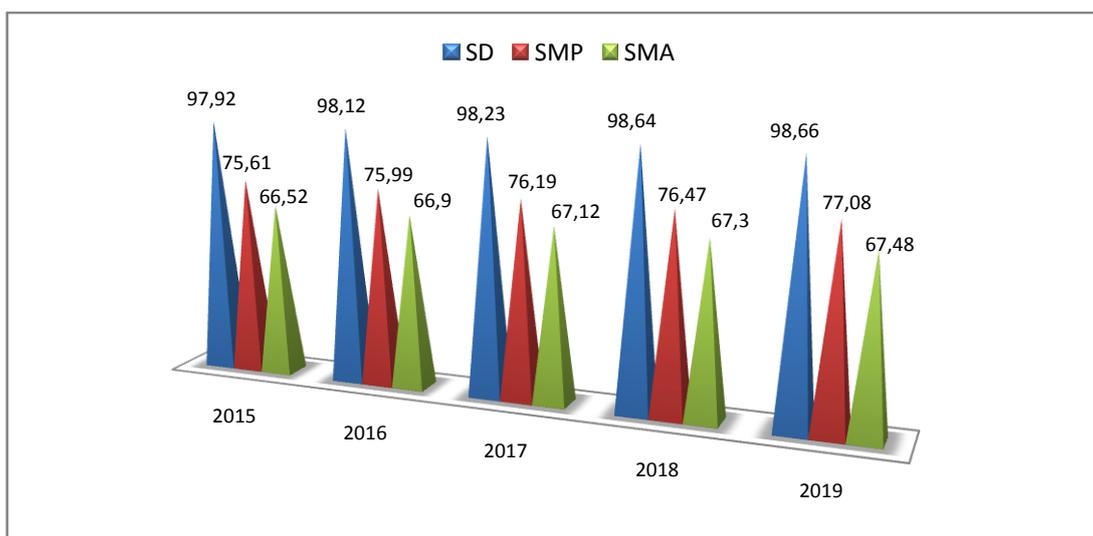


Sumber data: BPS Sumatera Barat

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan realisasi APM pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah realisasi APM nya sebagaimana terlihat pada grafik 17.

Grafik 17 Angka Partisipasi Murni berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015-2019



Sumber data: BPS Sumatera Barat

4. Meningkatnya sekolah menengah dan sekolah luar biasa yang terakreditasi minimal B. Untuk tahun 2019 sebanyak 89,24% sekolah menengah terakreditasi minimal B dan 99% sekolah luar biasa terakreditasi minimal B.
5. Sebesar 46,12% lulusan SMK diterima di Dunia Usaha dan Industri dan 42,16% lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Akan tetapi, dalam mencapai sasaran tersebut, masih ditemukan hambatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian guru yang belum merata dan belum seimbang jumlah guru dengan kebutuhan.
2. Rendahnya lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan di dunia kerja
3. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan
4. Belum optimalnya penerapan IPTEK.
5. Belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran 20% untuk belanja fungsi pendidikan pada APBD Provinsi.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
 - pembangunan fasilitas gedung SMA (160 sekolah) dan gedung SMK (54 sekolah)
 - pembangunan ruang kelas baru SMA (7 sekolah) dan SMK (5 sekolah)
 - pembangunan laboratorium IPA SMA (7 sekolah)
 - penyediaan sarana dan prasarana SMA sebanyak 168 unit dan 61 paket dan SMK (40 sekolah).
3. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
4. Pemberian bantuan pendidikan tepat sasaran, baik Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan SMA dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA/MA serta SMK yang memberikan dampak

bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni.

5. Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan pendidikan untuk melakukan terobosan peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Mempertahankan pengalokasian anggaran 20% untuk belanja fungsi pendidikan pada APBD Provinsi dan juga menjadi bahan dalam evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan Pendidikan Guru Keahlian Ganda (PKG) kompetensi tambahan.
3. Pengadaan guru garis depan bagi daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
4. Adanya lembaga sertifikasi keahlian untuk lulusan SMK sehingga lulusan SMK bisa mendapatkan sertifikasi keahlian.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah Rp. 815.978.690.288,- terealisasi sebesar Rp. 789.146.740.714 atau 96,71%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebesar 97,51% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 96,71% (tingkat efisiensi 0,8%).

Anggaran sebesar Rp. 815.978.690.288,- tersebar pada 8 program yaitu program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (10 kegiatan), program pendidikan berkarakter (4 kegiatan), program pendidikan khusus dan layanan khusus (44 kegiatan), program peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan (22 kegiatan), program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah (10 kegiatan), program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah (391 kegiatan), program peningkatan koordinasi dan fasilitasi

pendidikan (1 kegiatan), program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (19 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.



**Sasaran
Strategis
3.1.2**

**Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang dan menjadi modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: gaya hidup (*life style*), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), pelayanan kesehatan; dan faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai sasaran strategis yang diukur menggunakan indikator kinerja angka harapan hidup (AHH). Angka harapan hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Penetapan indikator kinerja angka harapan hidup diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2019, angka harapan hidup ditargetkan 69,22 atau meningkat 0,44 dibandingkan angka harapan hidup tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan angka harapan hidup tahun 2018 (meningkat 0,05 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 3.3.25.

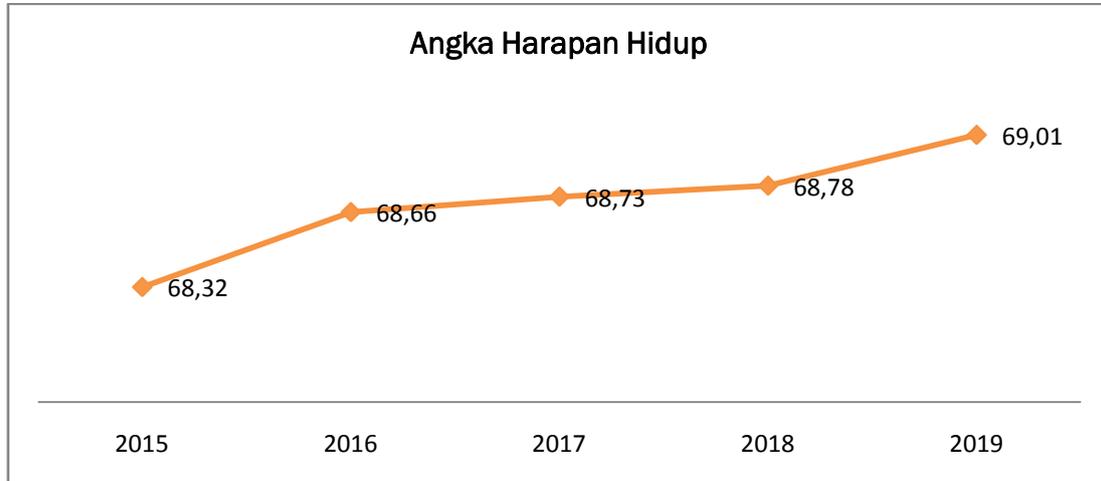
Tabel 3.3. 25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2



Indikator kinerja angka harapan hidup target 69,22, terealisasi 69,01 dengan tingkat capaian 99,70% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik No.29/05/13/Th. XXII tanggal 6 Mei 2019. Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat sepanjang tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,1725. Tren peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan peningkatan 0,34. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2015-2019 tergambar pada grafik 18.

Grafik 18 Perkembangan angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2015-2019

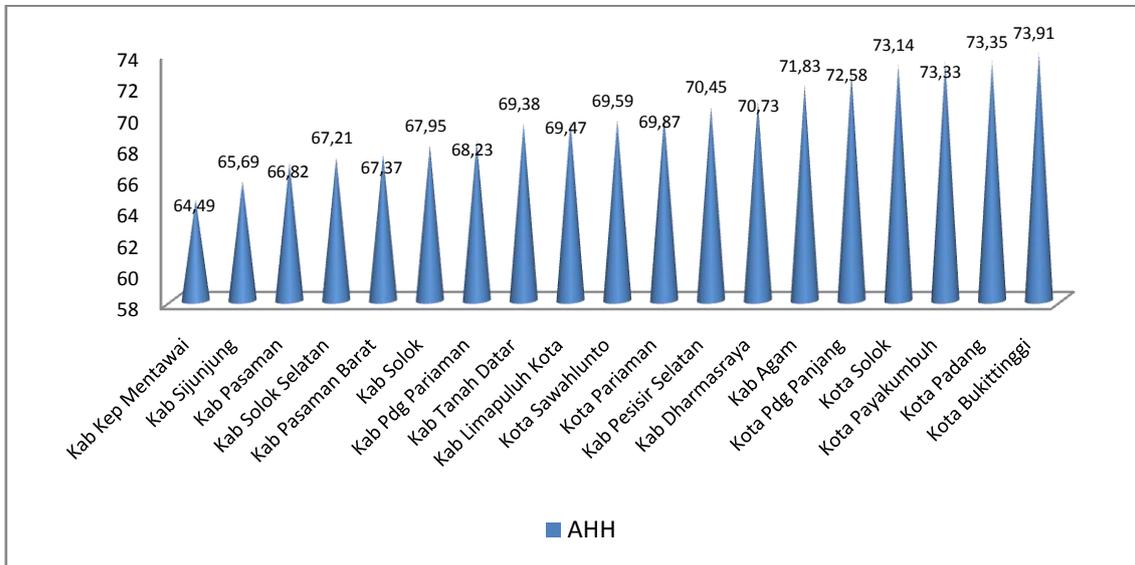


Sumber Data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 69,01 merupakan rata-rata angka harapan hidup 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019. Terdapat 7 kabupaten/kota yang angka harapan hidupnya berada di bawah angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dan 12 kabupaten/kota angka harapan hidupnya sudah di atas Provinsi Sumatera Barat. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Bukittinggi (73,91) dan terendah pada Kabupaten Kepulauan

Mentawai (64,49) dengan gap sebesar 9,42. Gambaran angka harapan hidup kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019 tergambar pada grafik 19.

Grafik 19 Angka harapan hidup kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019



Sumber data: BRS No 29/05/13/Th. XXII, 6 Mei 2019

Capaian indikator kinerja angka harapan hidup sebesar 99,70% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.26.

Tabel 3.3. 26 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Angka harapan hidup	69,01	68,78	99,70	99,59	69,54

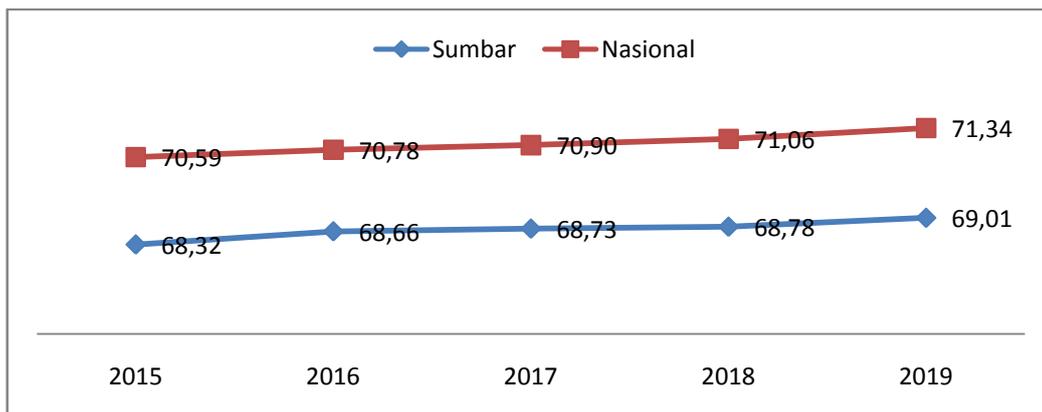
Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2019 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai <100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaian kinerja angka harapan hidup menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,23 dan 0,11%. Angka harapan hidup sebesar 69,01 tahun berarti bayi yang lahir di tahun 2018

(data yang dipakai untuk realisasi tahun 2019) memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,01 tahun.

Untuk tahun 2021, angka harapan hidup ditargetkan sebesar 69,54 atau meningkat 0,53 dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 69,01 menunjukkan pencapaian sebesar 99,24% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Angka harapan hidup Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) masih berada di bawah angka harapan hidup tingkat Nasional, sebagaimana tergambar pada grafik 20.

Grafik 20 Perbandingan Angka harapan hidup Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2015-2019



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkendala pada:

1. Beban biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang semakin besar.
2. Belum semua kabupaten/kota se Sumatera Barat mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota.
3. Disparitas sumber daya kesehatan di daerah dan dinamisasi tata kelola pemerintahan yang akan berdampak terhadap capaian program kesehatan.
4. Belum semua fasilitas kesehatan di Sumatera Barat terakreditasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi
Selama tahun 2019, sebanyak 131 puskesmas dan 4 rumah sakit terakreditasi. Dengan demikian jumlah puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi sampai tahun 2019 menjadi 350 puskesmas dan 25 rumah sakit.
2. Menurunkan prevalensi stunting di Sumatera Barat. Prevalensi stunting tahun 2019 sebesar 27,4% menurun 2,5% dibandingkan tahun 2018. Upaya yang dilakukan adalah
 - Lokus penanggulangan stunting pada Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok.
 - Penguatan surveilans gizi melalui e-PPGBM (elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat).
 - Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil.
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang menolong persalinan.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan neonatus pertama (pelayanan sesuai standar 6-48 jam setelah lahir). Prevalensi kunjungan neonatal pertama di tahun 2019 tercapai 85,1% artinya 85,1% dari sasaran kelahiran hidup di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu melakukan kunjungan neonatal pada umur 6-48 jam.
5. Meningkatkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan. Pada tahun 2019, 11 kabupaten/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap meningkat di bandingkan dengan realisasi tahun 2018 (8 kabupaten/kota).
6. Meningkatkan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2019, sebanyak 80,76% masyarakat di kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah memiliki jaminan kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat akan terus diupayakan melalui upaya berikut ini:

1. Mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk belanja langsung urusan kesehatan pada APBD Provinsi dan juga menjadi bahan dalam evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor, terutama terkait dengan sektor yang mempunyai kewenangan pembangunan secara fisik bidang sanitasi, meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk CSR.
3. Pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas ke Rumah Sakit, dimana dengan pelaksanaan akreditasi tersebut maka harus dilakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan, perbaikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan upaya-upaya kesehatan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat sehat (Germas).
5. Meningkatkan dan memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan di daerah
6. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan peningkatan tata kelola organisasi kesehatan.
7. Meningkatkan cakupan layanan imunisasi kepada Balita sebagai bentuk upaya preventif sejak dini dan dengan mendukung secara maksimal Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN), Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Program Penguatan Kekebalan dengan Imunisasi Pentavalen serta Program Imunisasi Lanjutan.
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang telah ada dengan memberikan pelatihan secara kontinue dan konsisten.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Rp. 569.386.085.305,- terealisasi sebesar Rp. 494.117.935.137,68 atau 86,78%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar 99,70% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,78% (tingkat efesiensi 12,92%).

Anggaran sebesar Rp. 569.386.085.305,- tersebar pada 31 program yaitu program obat dan pembekalan kesehatan (6 kegiatan), program upaya kesehatan masyarakat (21 kegiatan), program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (2 kegiatan), program perbaikan gizi masyarakat (2 kegiatan), program pengembangan lingkungan sehat (2 kegiatan), program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) (7 kegiatan), program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs. paru/ rs. mata (21 kegiatan), program peningkatan sumber daya kesehatan (9 kegiatan), program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs. paru/ rs. mata (1 kegiatan), program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan (2 kegiatan), program pelayanan kesehatan penduduk miskin (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan blud (5 kegiatan), program peningkatan kualitas hidup perempuan (8 kegiatan), program peningkatan kualitas keluarga (3 kegiatan), program peningkatan sistem data gender dan anak (4 kegiatan), program peningkatan perlindungan perempuan (4 kegiatan), program peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (7 kegiatan), program peningkatan perlindungan khusus anak (8 kegiatan), program diversifikasi pangan (6 kegiatan), program peningkatan ketahanan pangan (27 kegiatan), program peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja (1 kegiatan), program keluarga berencana (5 kegiatan), program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (2 kegiatan), program peningkatan pengendalian penduduk (1 kegiatan), program peningkatan peran serta kepemudaan (6 kegiatan), program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (17 kegiatan), program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga (5 kegiatan), program peningkatan penyadaran kepemudaan (5 kegiatan), program peningkatan wawasan dan kreatifitas seni budaya pemuda (1 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

MISI 4 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan 4.1 Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah

Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah suatu proses ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi penting bagi suatu negara untuk menghindari kesenjangan sosial penduduknya yang juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini.

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah telah ditetapkan 2 indikator kinerja yang realisasi dan capaiannya tergambar pada tabel 3.3.27.

Tabel 3.3. 27 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.1

Indikator Kinerja	Target	2019 Realisasi	% Capaian Kinerja	2018 Realisasi
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,83	5,05	86,62	5,16
Indeks Gini	0,328	0,307	106,40	0,305

Uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja tujuan dijelaskan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Untuk tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,83% atau meningkat 0,69 dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 (5,14). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 (menurun 0,15 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2019 tumbuh sebesar 5,05%. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,83%, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 86,62% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (88,93%), capaian kinerja indikator laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 2,31% di tahun 2019.

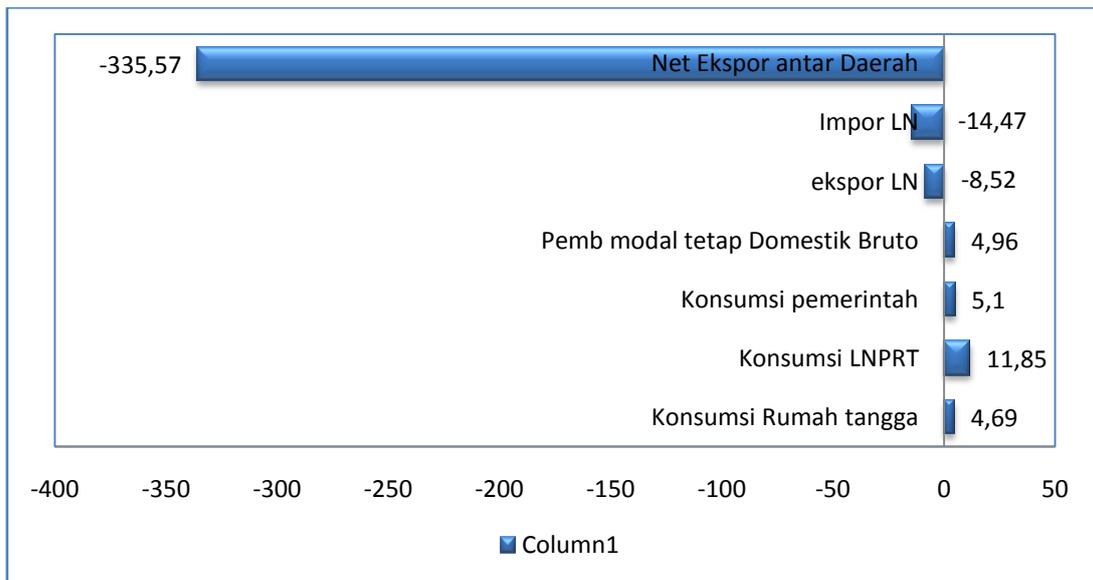
Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th.XXIII, 5 Februari 2020. Pertumbuhan tahun 2019 ini melambat dibandingkan Tahun 2018 sebesar 5,16%. Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi akibat penurunan sektor industri pengolahan seiring dengan keterbatasan bahan baku dan ketidakpastian harga komoditas dunia. Selain itu, dua sektor penopang utama perekonomian Sumatera Barat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor transportasi dan pergudangan mengalami perlambatan. Meskipun demikian sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penahan perlambatan yang terjadi. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor informasi dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi makan minum dan sektor jasa pendidikan. Keadaan ini digambarkan pada tabel 3.3.28.

Tabel 3.3. 28 PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2010 (triliun rupiah) Tahun 2017-2018

Lapangan Usaha		Nilai PDRB berdasarkan Harga Konstan 2010			Pertumbuhan PDRB	
		2017	2018	2019	2018 thd 2017	2019 thd 2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,39	36,65	37,61	3,56	2,62
2	Pertambangan dan Penggalian	6,34	6,71	7,12	5,84	6,11
3	Industri Pengolahan	16,54	16,45	16,13	-0,54	-1,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,18	5,88	0,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,17	0,00	6,25
6	Konstruksi	14,08	15,07	16,34	7,03	8,43
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	24,28	25,99	27,89	7,04	7,31
8	Transportasi dan Pergudangan	18,76	19,97	20,92	6,45	4,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,69	1,83	1,98	8,28	8,20
10	Informasi dan Komunikasi	10,8	11,73	12,76	8,61	8,78
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,62	4,67	4,77	1,08	2,14
12	Real Estate	3,03	3,17	3,38	4,62	6,62
13	Jasa Perusahaan	0,69	0,72	0,77	4,35	6,94
14	Adm Pemerintahan, pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	8,66	9,17	9,83	5,89	7,20
15	Jasa Pendidikan	5,95	6,37	6,88	7,06	8,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,31	2,49	7,44	7,79
17	Jasa Lainnya	2,67	2,88	3,1	7,87	7,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		155,98	164,03	172,32	5,16	5,05

Disisi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama PDRB, namun pada tahun 2019 ini pertumbuhannya melambat sebesar 4,69%. Pertumbuhan tertinggi terjadi untuk konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 11,85% seiring dengan peningkatan konsumsi untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada di beberapa daerah. Faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sisi pengeluaran berasal dari komponen ekspor antar daerah dengan pertumbuhan negatif sebesar 335,57%, kemudian disusul oleh ekspor luar negeri yang menurun sebesar 8,52%. Pada grafik 21 disajikan PDRB menurut pengeluaran 2019.

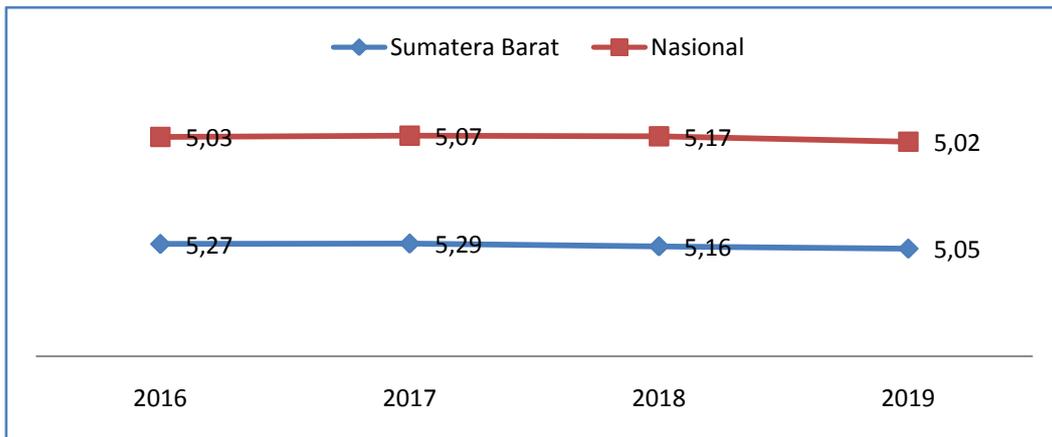
Grafik 21 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (%)



Sumber data: Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th.XXIII, 5 Februari 2020

Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi sejak awal tahun RPJMD sampai tahun 2019 menunjukkan trend menurun. Pertumbuhan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,02%, selanjutnya mulai tahun 2017 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selalu mengalami penurunan. Namun secara absolut, nilai PDRB Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, dimana nilai PDRB tahun 2017 sebesar 155,98 triliun rupiah, tahun 2018 sebesar 164,03 triliun rupiah dan tahun 2019 nilai sebesar 172,32 triliun rupiah. Untuk tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,54% atau meningkat 1,49% dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 5,05 menunjukkan pencapaian sebesar 77,22% dari target tahun 2021. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara Nasional, tahun 2016-2017 dan 2019 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas Nasional. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2017-2019 disajikan pada grafik 22.

Grafik 22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2019 (%)



Sumber data: Berita Resmi Statistik

2. Indeks Gini

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Semakin kecil angka indeks gini akan semakin baik, karena mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi ekonomi penduduk di suatu wilayah yang semakin baik atau ketimpangan ekonomi penduduk suatu wilayah yang semakin minim. Selain itu, penurunan ketimpangan juga dapat mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial.

Untuk tahun 2019, indeks/rasio gini ditargetkan 0,328 atau meningkat 0,023 dari indeks/rasio gini tahun 2018 (0,305). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan indeks/rasio gini tahun 2018 (menurun 0,025 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

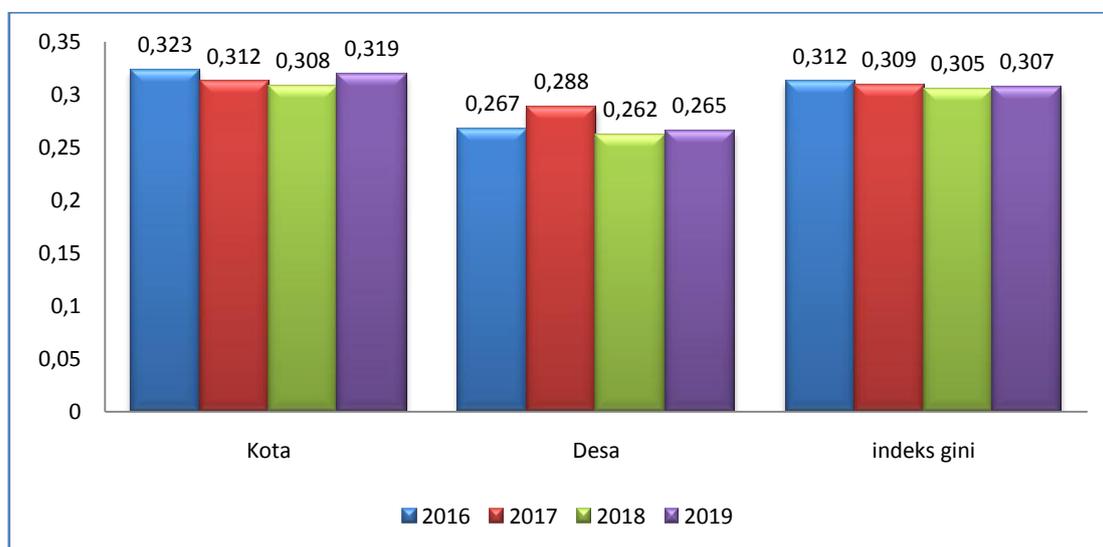
Tahun 2019, indeks/rasio gini ditargetkan sebesar 0,328, terealisasi 0,307 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,40%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Jika dilihat dari sisi capaian kinerja, capaian kinerja tahun 2018-2019 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 0,89%.

Indeks/rasio gini Sumatera Barat sebesar 0,307 menunjukkan ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat sedikit meningkat dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Sumatera Barat 2018 (0.305).

Realisasi indeks/rasio gini diukur berdasarkan data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat September 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik nomor 06/01/Th.XXIII tanggal 15 Januari 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks/rasio gini di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan selalu di atas area pedesaan. Pada September 2019 indeks/rasio gini perkotaan adalah 0,319 naik 0,011 poin dibandingkan periode setahun sebelumnya (0,308). Sedangkan indeks/rasio gini daerah perdesaan tahun 2019 lebih rendah dari daerah perkotaan sebesar 0,265. Berikut trend indeks/rasio gini perkotaan dan perdesaan Sumatera Barat selama empat tahun terakhir sebagaimana tergambar pada grafik 23.

Grafik 23 Tren indeks/rasio gini perkotaan dan perdesaan Sumatera Barat 2016-2019

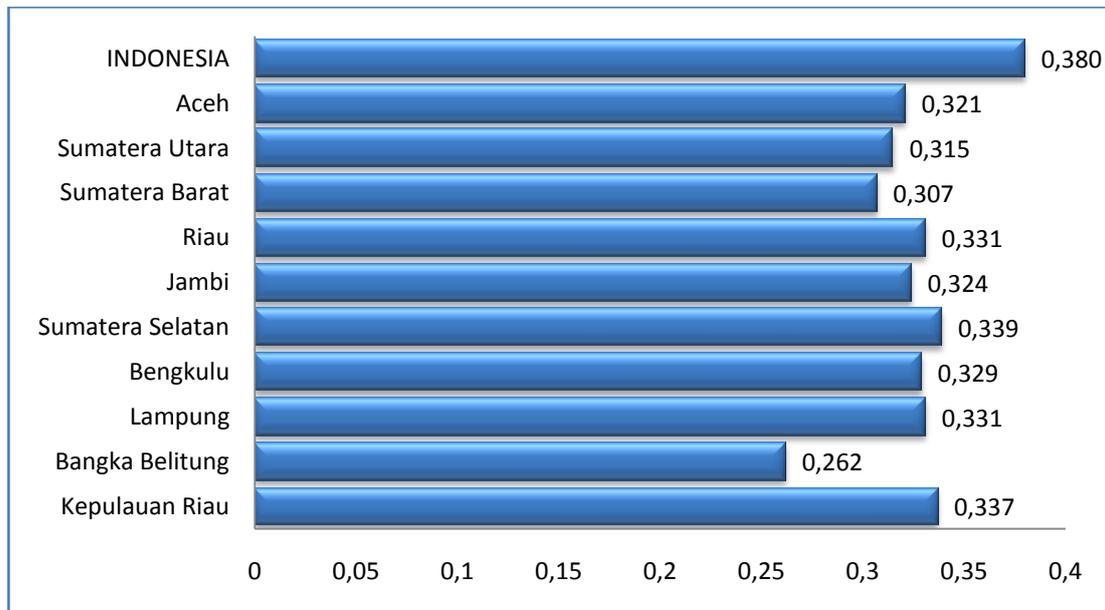


Sumber data: Berita Resmi Statistik nomor 06/01/Th.XXIII tanggal 15 Januari 2020.

Meskipun indeks gini tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, nilai ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat relatif lebih baik dibandingkan rata-rata 9 (sembilan) provinsi lainnya di pulau Sumatera dan secara Nasional (0,380). Dengan nilai tersebut, angka indeks/rasio gini Sumatera Barat masih terbilang cukup baik, yaitu

berada pada urutan terendah ke-2 (dua) di Sumatera dan ke-3 (tiga) di Nasional setelah Bangka Belitung (0,262) dan Kalimantan Utara (0,292). Kondisi tersebut digambarkan pada grafik 24.

Grafik 24 Indeks gini Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Berdasarkan realisasi laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan misi 4 belum tercapai dengan maksimal, hal ini dikarenakan oleh :

1. Belum tercapainya target indikator laju pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 5,83%, yang hanya terealisasi 5,05%. Pertumbuhan tahun 2019 ini pun menurun 0,11% dibandingkan tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan tiga sektor penopang utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar-eceran serta sektor transportasi dan pergudangan. Kinerja ekspor yang masih menurun, walaupun mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2018.
2. Selain itu, indeks/rasio gini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti pemerataan ekonomi Sumatera Barat sedikit mengalami penurunan. Penurunan pemerataan ini didukung dari data Survei

Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang menunjukkan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk di Sumatera Barat naik sebesar 5,42% dengan kenaikan terbesar berada di kelompok teratas (berpengeluaran tinggi).

Walaupun tujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah belum tercapai secara maksimal, tetapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap berupaya semaksimal mungkin. Adapun indikator lain pendukung yang berhasil mengalami peningkatan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tumbuh positif yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan per kapita Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 2,45 juta rupiah dibanding tahun 2018 (42,84 juta rupiah).
2. Meningkatnya investasi daerah tahun 2019 sebesar 651.188,72 juta rupiah dibandingkan tahun 2018 (tumbuh sebesar 13,76%).
3. Menurunnya pengangguran Sumatera Barat dari 5,55 di Tahun 2018 menjadi 5,33 di tahun 2019.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, telah ditetapkan 4 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :



Pendapatan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan masyarakatnya maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja jumlah pendapatan perkapita.

Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Dikarenakan *total personal income / pendapatan per kapita total* sebuah daerah jarang sekali ada, PDRB per kapita lebih sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur pendapatan masyarakat. Penetapan jumlah pendapatan perkapita diukur berdasarkan data PDRB perkapita (membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Untuk tahun 2019, jumlah pendapatan perkapita/PDRB perkapita ditargetkan Rp.45,44 juta atau meningkat Rp 2,61 juta dari jumlah pendapatan perkapita/PDRB perkapita tahun 2018 (Rp. 42,83 juta). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan jumlah pendapatan perkapita/PDRB perkapita tahun 2018 (meningkat Rp. 2,51 juta dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Gambaran pencapaian sasaran strategis meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat tergambar pada tabel 3.3.29.

Tabel 3.3. 29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1



Indikator kinerja jumlah pendapatan perkapita target Rp.45,44 juta, terealisasi Rp.45,29 juta dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,67% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th.XXIII, 5 Februari 2020 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{Rp. 246,42 \text{ triliun}}{5,44 \text{ juta jiwa}} = Rp. 45,29 \text{ Juta}$$

Ket: Total PDRB tahun 2019= Rp. 246,42 triliun
Jumlah penduduk pertengahan tahun 2019 = 5,44 juta jiwa

Capaian indikator kinerja Jumlah pendapatan perkapita (Rp. Juta)/PDRB per kapita sebesar 99,67% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Jumlah pendapatan perkapita (Rp. Juta)/PDRB per kapita tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.30.

Tabel 3.3. 30 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Jumlah pendapatan perkapita (Rp. Juta)/PDRB per kapita

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Jumlah pendapatan perkapita (Rp. Juta)/PDRB per kapita	45,29	42,83	99,67	100,3	48,91

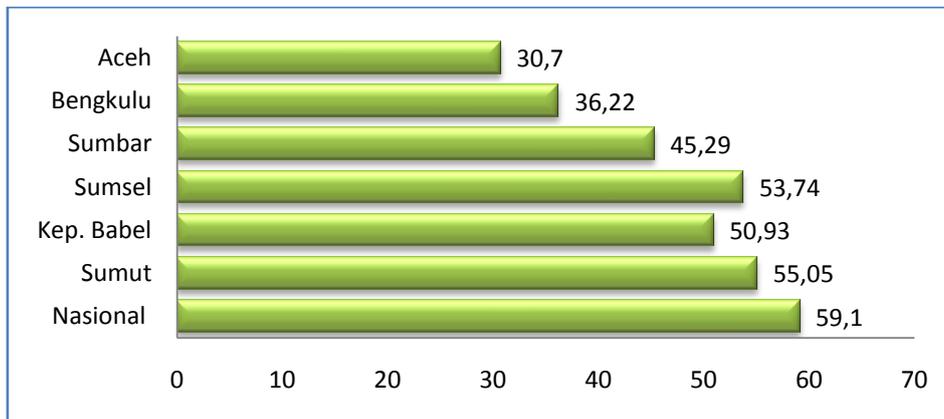
Realisasi jumlah pendapatan perkapita tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator kinerja ini tercapai <100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi jumlah pendapatan perkapita menunjukkan tren positif dengan peningkatan Rp. 2,46 juta di tahun 2019. Akan tetapi, jika dilihat dari tren capaian kinerja dari tahun 2018-2019 menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan sebesar 0,63%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar Rp. 48,91 juta, dibutuhkan pencapaian sebesar Rp. 3.62 juta dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 45,29 juta menunjukkan pencapaian 92,60% dari target tahun 2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut dengan melihat progres peningkatan dari tahun ke tahun serta dengan adanya dukungan program dan kegiatan yang lebih optimal.

Dibandingkan dengan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada 6 Provinsi di Pulau Sumatera, tampak bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke empat. Provinsi yang memiliki PDRB perkapita tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 55,05 juta dan disusul oleh Sumatera Selatan sebesar Rp. 53,74 juta. Sedangkan Provinsi dengan PDRB perkapita terendah adalah Provinsi Aceh sebesar Rp. 30,70 juta. Namun jika dibandingkan dengan PDRB per kapita nasional sebesar Rp. 59,1 juta, PDRB perkapita Sumatera Barat

masih berada di bawah angka Nasional dengan selisih sebesar Rp. 13,81 juta. Berikut grafik perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional.

Grafik 25 PDRB perkapita menurut Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019 (Juta Rupiah)



Sumber data: BRS No 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Sumatera Barat masih banyak hambatan yang dihadapi, diantaranya:

1. Pada lapangan usaha industri pengolahan, sebagian besar skala usaha industri di Sumatera Barat masih berskala industri kecil, sebagian besar hasil usaha masih digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan relatif kecil digunakan untuk pemupukan modal usaha.
2. Masih kurangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibandingkan sektor usaha lainnya.
3. Berakhirnya musim panen kelapa sawit pada triwulan IV 2019 yang berdampak pada berkurangnya pasokan bahan baku bagi industri pengolahan CPO yang mengakibatkan menurunnya aktivitas industri makanan dan minuman. Sebagaimana diketahui, CPO merupakan penopang utama industri pengolahan makanan dan minuman.
4. Pada lapangan usaha perdagangan, masih belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif untuk berekspresi dalam mendukung penguatan pariwisata di Sumatera Barat, masih kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, sehingga

mengurangi kenyamanan dalam berbelanja di pasar tradisional, serta masih kurangnya keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan cabang industri dalam bentuk sentra yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB Sumatera Barat. Saat ini usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat tersedia sebanyak 35.589 unit usaha dengan 120.060 orang tenaga kerja, yang merupakan ujung tombak perekonomian di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi, seperti sertifikat halal, SNI, Izin edar produk pangan, merk dan GMP/HACCP.
3. Stabilitasnya ketersediaan bahan pokok dan barang penting di pasar yang mengakibatkan stabilnya laju inflasi di Sumatera Barat yang membawa dampak positif terhadap meningkatnya usaha perdagangan;
4. Adanya komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari kecurangan pedagang, sehingga konsumen Sumatera Barat merasa nyaman dalam aktivitas berbelanja;
5. Gencarnya promosi pariwisata serta banyaknya agenda event berskala besar seperti Tour de singkarak dan festival budaya minangkabau turut mendorong akselerasi sektor perdagangan;
6. Meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan hortikultura, serta komoditi hasil peternakan dan perikanan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat adalah Rp. 161.993.952.798,- telah direalisasi sebesar Rp. 149.849.121.502,17 atau 92,50%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan

masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian meningkatnya pendapatan masyarakat sebesar 99,67% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,50%.

Anggaran sebesar Rp. 161.993.952.798,- tersebar pada 32 program yaitu program pengamanan sumber daya hewani (10 kegiatan), program pengolahan dan pemasaran hasil (5 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana (10 kegiatan), program pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis (2 kegiatan), program peningkatan produksi dan produktifitas (12 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm (3 kegiatan), program peningkatan perlindungan konsumen (3 kegiatan), program pengembangan perdagangan dalam negeri (5 kegiatan), program pengembangan industri kecil dan menengah (9 kegiatan), program peningkatan kualitas produk industri (7 kegiatan), program pemberdayaan penyuluhan (1 kegiatan), program pengolahan dan pemasaran hasil (9 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana (17 kegiatan), program pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis (9 kegiatan), program peningkatan produksi dan produktifitas (25 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (17 kegiatan), program pengembangan pemasaran pariwisata (7 kegiatan), program pengembangan ekonomi kreatif (6 kegiatan), program pengembangan kelembagaan, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif (7 kegiatan), program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata (6 kegiatan), program pengolahan dan pemasaran hasil (13 kegiatan), program pengembangan ekonomi maritim (12 kegiatan), program rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan (17 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana (2 kegiatan), program pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis (2 kegiatan), peningkatan produksi dan produktifitas (7 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm (15 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (15 kegiatan), program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (21 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi (11 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM (17 kegiatan), program peningkatan SDM pertanian (1 kegiatan), dan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan/pelatihan (1 kegiatan). Program/kegiatan

tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat.



Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Investasi merupakan faktor utama pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, ekspor, impor, perbankan, transportasi dan asuransi. Di tengah permasalahan tanah ulayat yang selalu menjadi faktor penghambat investasi di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap harus memperjuangkan pertumbuhan investasi agar terus meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sebagai sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah yang merupakan misi keempat RPJMD 2016-2021. Sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi. Penetapan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi diukur berdasarkan data investasi yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Untuk tahun 2019, persentase pertumbuhan investasi ditargetkan 4,02% atau menurun sebesar 10,78% dibandingkan realisasi tahun 2018 (14,8%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan persentase pertumbuhan investasi tahun 2018 (meningkat 30,22% dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan faktor-faktor eksternal yang mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan investasi. Gambaran pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi daerah di Sumatera Barat pada tahun 2019 tergambar pada tabel 3.3.31.

Tabel 3.3. 31 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2



Indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi target 4,02%, terealisasi sebesar 13,76% dengan tingkat capaian kinerja 342,29% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja pertumbuhan investasi diukur berdasarkan data investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai Investasi Tahun 2019 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar \$157.113,90 ribu atau Rp.2.356.708.500.000,- (Kurs Rp.15.000/USD) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.3.026.645.800.000,-, dengan nilai total investasi sebesar Rp.5.383.354.300.000,-. Penghitungan pertumbuhan investasi 2019 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pertumbuhan investasi} = \frac{\text{Rp. 5.383.354.300.000} - \text{Rp. 4.732.165.580.000}}{\text{Rp. 4.732.165.580.000}} \times 100 = 13,76\%$$

Ket: Realisasi Investasi Tahun 2019 = Rp. 5.383.354.300.000,-
Realisasi Investasi Tahun 2018 = Rp. 4.732.165.580.000,-

Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi PMA dan PMDN dapat dilihat pada tabel 3.3.32.

Tabel 3.3. 32 Realisasi PMA dan PMDN tahun 2019 berdasarkan sektor usaha

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		Penanaman Modal Asing (PMA)	
		Rupiah (juta)	%	USD (Ribuan)	%
A	SEKTOR PRIMER	865.813,10	28,62	95.974,80	61,08
1	Tanaman Pangan dan perkebunan	761.999,60	25,18	24.020,20	15,29
2	Peternakan	12.864,30	0,43	-	-
3	Kehutanan	8.973,40	0,30	4,40	-
4	Perikanan	-	-	-	-
5	Pertambangan	81.975,80	2,71	71.950,20	45,79
B	SEKTOR SEKUNDER	725.813,70	23,96	32.445,70	20,66

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		Penanaman Modal Asing (PMA)	
		Rupiah (juta)	%	USD (Ribu)	%
1	Industri Makanan	59.675,30	1,97	31.157,20	19,83
2	Industri Tekstil	332,00	0,01	-	-
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki	-	-	-	-
4	Industri kayu	8.604,90	0,28	3,10	0,01
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia dan Farmasi	7.062,90	0,23	39,90	0,03
7	Industri Karet dan Plastik	49.994,90	1,65	1.145,50	0,73
8	Industri Mineral non Logam	507.310,30	16,76	100,00	0,06
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	82,00	-	-	-
10	Industri instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-
11	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	-	-	-	-
12	Industri lainnya	92.751,40	3,06	-	-
C	SEKTOR TERSIER	1.435.019,00	47,42	28.693,40	18,26
1	Listrik, Gas dan Air	290.359,60	9,59	20.678,50	13,16
2	Konstruksi	239.882,50	7,93	-	-
3	Perdagangan dan reparasi	92.787,90	3,07	954,00	0,61
4	Hotel dan restoran	570.168,30	18,84	694,30	0,44
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	45.952,10	1,52	6.164,80	3,92
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	8.977,30	0,30	86,90	0,06
7	Jasa lainnya	186.891,30	6,17	114,90	0,07
	TOTAL	3.026.645,80	100,00	157.113,90	100,00

Ket : 1 US\$ = Rp.15.000, Total PMA = Rp.2.356.708.500.000,-

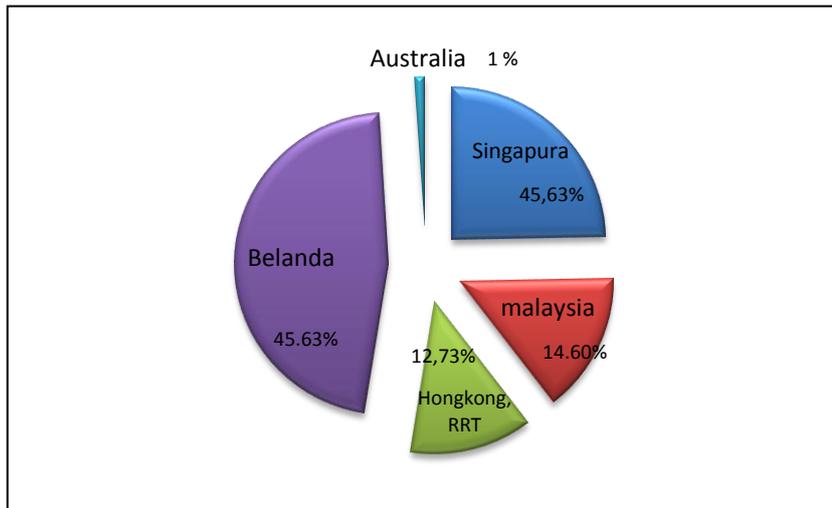
Dari tabel 3.3.32 diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha pada tahun 2019 didominasi oleh industri tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp. 761.999,60 juta (25,18%), sektor hotel dan restoran sebesar Rp. 570.168,30 juta (18,84%), industri mineral dan logam sebesar Rp. 507.310,30 juta (18,76%), dan sektor listrik, Gas dan air sebesar Rp. 290.359,60 juta (9,59%).
2. Realisasi investasi PMA Tahun 2019 didominasi oleh sektor Pertambangan sebesar USD 71.950,20 ribu (45,79%), industri makanan sebesar USD 31.157,20 ribu (19,83%), sektor tanaman pangan dan perkebunan USD 24.020,20 ribu (15,29%) dan sektor Listrik, Gas dan Air USD 20.678,50 ribu (13,16%).

Negara penyumbang terbesar Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Tahun 2019 adalah Negara Belanda, dengan nilai investasi sebesar 45,63% dari total

PMA (USD 71.691,20 ribu), kemudian di susul oleh Negara Singapura dengan nilai investasi sebesar 24,24% (USD 38.090,40), Negara Malaysia sebesar 14,60% (USD 22.940,70), dan Hongkong, RR Tiongkok sebesar 12,73% (USD 19.997,40) sebagaimana tergambar pada grafik 26.

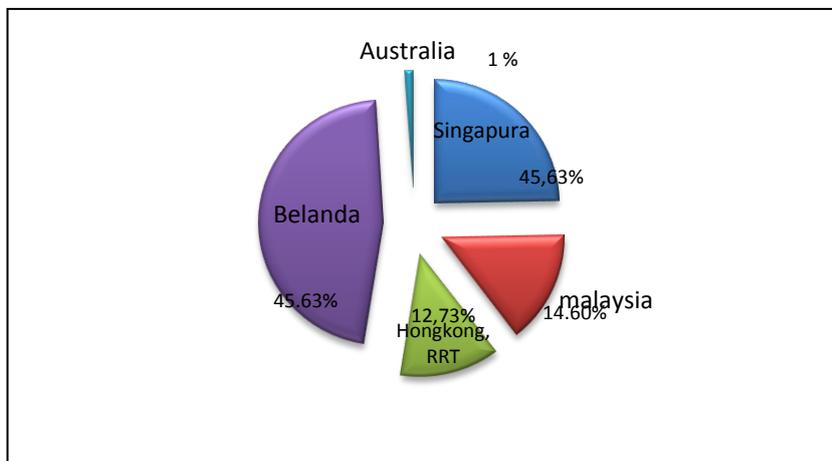
Grafik 26 Negara Penyumbang PMA Terbesar Tahun 2019



Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Daerah penerima investasi asing terbesar adalah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai investasi yang diterima sebesar 46,12% (USD 72.467,10), kemudian Kabupaten Sijunjung sebesar 17,58% (USD 27.622,90), Kabupaten Tanah Datar sebesar 13,03% (USD 20.478,60) dan Kota Padang sebesar 11,84% (USD 18.601,80) sebagaimana tergambar pada grafik 27.

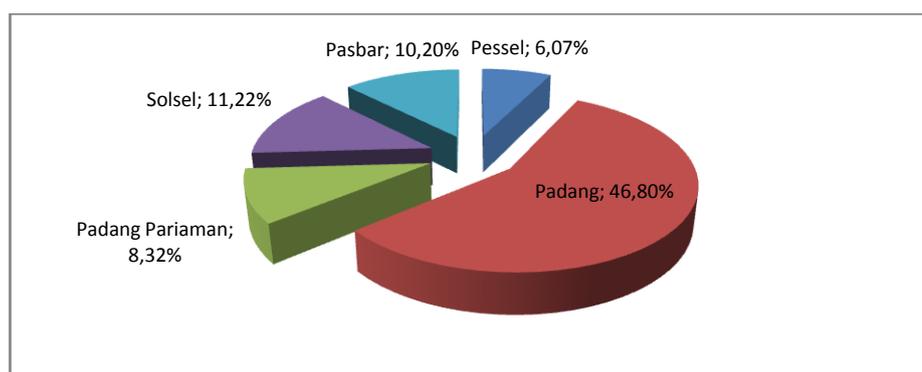
Grafik 27 Kabupaten/Kota Penerima PMA Terbesar Tahun 2019



Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berbeda dengan PMA, daerah yang menerima PMDN terbesar adalah kota Padang dengan penerimaan investasi sebesar 46,80% (Rp. 1.416.486,60 juta), kemudian Solok Selatan sebesar 11,22% (Rp.339.618,70 juta), Kabupaten Pasaman Barat sebesar 10,20% (Rp.308.772,50 juta), Kabupaten Padang Pariaman sebesar 8,32% (Rp.251.927,60 juta) dan Kabupaten Pesisir Selatan 6,07% (Rp.183.702,90 juta). Informasi tersebut digambarkan pada grafik 28.

Grafik 28 Kabupaten/Kota Penerima PMDN terbesar Tahun 2019



Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi sebesar 342,29% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.33.

Tabel 3.3. 33 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase pertumbuhan investasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Persentase pertumbuhan investasi	13,76	14,80	342,29	360,98	3,03

Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerjanya tercapai >100%. Dibandingkan tahun 2018, realisasi pertumbuhan investasi menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 1,04% di tahun 2019. Begitupun dengan capaian kinerjanya yang menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar

18,69% di tahun 2019. Akan tetapi secara absolut, angka investasi dari tahun 2018 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, dimana nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp.4.732.165.600.000,- dan tahun 2019 nilai investasinya sebesar Rp.5.383.354.300.000,-. Pertumbuhan nilai investasi ini dari tahun ke tahun juga sangat dipengaruhi oleh nilai kurs pada tahun berjalan.

Untuk tahun 2021, investasi ditargetkan tumbuh sebesar 3,03% dan telah dilampaui oleh realisasi tahun 2019. Untuk target tahun 2021 akan disempurnakan kembali.

Dalam peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi hambatan-hambatan berikut ini:

1. Potensi - potensi wisata di berbagai daerah di Sumatera Barat yang belum dikelola dengan baik, termasuk dari segi infrastruktur pendukung dan kesiapan masyarakat.
2. Masalah lahan dan perizinan di daerah masih menjadi kendala di Sumatera Barat dalam merealisasikan investasi.
3. Adanya pihak yang memprovokasi masyarakat untuk menghambat investasi. Padahal investasi memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah.
4. Pengembangan industri manufaktur menurutnya cukup sulit untuk dikembangkan di Sumatera Barat.

Peningkatan nilai investasi Sumatera Barat dari Tahun 2019, tentu tidak lepas dari usaha yang telah dilakukan dan juga kerjasama dari pihak-pihak terkait. Adapun usaha yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 untuk mendorong nilai investasi terus meningkat diantaranya adalah :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan investor, dengan membangun kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kepolisian untuk melakukan pengamanan pelayanan kemudahan investasi langsung kontruksi di kawasan industri.
2. Memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi daerah yang telah ada Seperti potensi panas bumi atau geothermal yang kaya di Sumatera Barat, Sektor

pariwisata, perkebunan, perikanan dan sektor lainnya. Saat ini, sudah ada beberapa potensi Panas Bumi yang sudah dikelola dan ditanamkan investasi diantaranya potensi pertambangan minyak bumi yang ada di Solok Selatan atau di sekitar kaki gunung kerinci dengan investor dari PT. Supreme Energi Muara Laboh, sebuah konsorsium antara Indonesia, Prancis dan Jepang. Kemudian Potensi tenaga panas bumi yang ada di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok yang investornya dari PT. Hitay Daya Energy asal Turki.

3. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga mendorong investor untuk masuk ke UMKM.
4. Melakukan promosi potensi daerah baik di dalam maupun luar negeri agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Tahun 2019 Sumbang telah ikut serta dalam 22 event promosi baik dalam maupun luar negeri berupa forum dan business meeting, dan terdapat 22 perusahaan investor yang ingin menanamkan investasinya di Sumatera Barat pada 13 jenis usaha yang dipromosikan.
5. Melakukan Gelar Potensi dan Temu usaha yang memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor sehingga menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Strategi Pemerintah kedepannya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi antara lain dengan:

1. Mendorong investasi melalui implementasi *Online Single Submission* (OSS) untuk mempercepat perizinan usaha dan memberikan penghargaan kepada investor dan eksportir, ini merupakan rekomendasi Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan.
2. Pengembangan pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Ameh (Mandeh) dan Mentawai, intensifikasi (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Promosi dan Pelaku Usaha), meningkatkan sinergi di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan mencanangkan Tahun Wisata Minangkabau. Saat ini,

progres penetapan dua KEK itu tengah dalam perencanaan dan pengajuan ke pusat untuk segera ditetapkan. KEK Mandeh direncanakan dikembangkan di lahan seluas 400 ha di Bukik Ameh yang masuk dalam kawasan wisata bahari terpadu mandeh. Kawasan itu membentang seluas 18.000 ha dengan sejumlah pulau dan laut yang tenang, sehingga juga dijuluki raja Ampat-nya Sumbar. Kemudian untuk KEK Mentawai direncanakan dibangun di lahan seluas 2.639 ha yang 80% dari areal itu sudah dibebaskan, sehingga bisa segera dikembangkan oleh investor untuk percepatan infrastruktur pariwisata.

3. Selain itu, akan meningkatkan secara bertahap potensi-potensi wisata di berbagai daerah di Sumbar yang belum dikelola dengan baik, termasuk dari segi infrastruktur pendukung dan kesiapan masyarakat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi adalah Rp 8.661.492.580,-, terealisasi sebesar Rp4.371.369.698,- atau 98,42%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi. Hal ini dilihat dari persentase capaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi sebesar 342,29% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 98,42% (tingkat efisiensi sebesar 243,87%).

Anggaran sebesar Rp 8.661.492.580,-, tersebar pada 2 program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (14 Kegiatan) dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (7 Kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi.

**Sasaran
Strategis
4.1.3**
Meningkatnya Nilai Ekspor

Ekspor merupakan salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertahan oleh ekspor yang *mandeg* cukup lama karena masuk masa kemunduran kelapa sawit yang diperparah dengan penurunan permintaan karena dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Sedangkan, impor mengalami peningkatan secara signifikan. Sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai peningkatan nilai ekspor dengan fokus pada hilirasi pengolahan komoditas ekspor. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya nilai ekspor sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja nilai ekspor. Penetapan indikator tersebut diukur berdasarkan data nilai ekspor yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Untuk tahun 2019, Provinsi Sumatera Barat optimis mencapai nilai ekspor sebesar \$ 1.967,38 juta atau meningkat sebesar \$368,77 juta (23,07%) dibandingkan nilai ekspor tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan nilai ekspor tahun 2018 juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Gambaran pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai ekspor tergambar pada tabel 3.3.34.

Tabel 3.3. 34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.3



Indikator kinerja peningkatan nilai ekspor target \$1967,38 juta, terealisasi sebesar \$1339,03 juta dengan tingkat capaian kinerja 68,06% termasuk kategori keberhasilan *cukup baik*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data nilai ekspor dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik No. 10/00/13/Th.XXIII, 3 Februari 2020 yang menunjukkan nilai ekspor Sumatera Barat sampai dengan Desember tahun 2019 sebesar US\$ 1.339,03 juta. Dalam hal ini ekspor Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 16,24%, dimana pada tahun 2018 nilai ekspor Sumatera Barat tercatat sebesar US\$.1.598,61 juta.

Nilai terbesar ekspor non migas Sumatera Barat adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati dan diikuti golongan karet dan barang dari karet. Data selengkapnya tergambar pada tabel 3.3.35.

Tabel 3.3. 35 Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2016-2019

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan 2019 terhadap 2018	Peran terhadap nilai ekspor 2019 (%)
		2016	2017	2018	2019		
1	Lemak & minyak Hewan/Nabati	1177,10	1.416,44	1.139,83	967,45	(15,12)	72,25
2	Karet dan Barang dari Karet	358,90	443,48	290,43	229,98	(20,18)	17,18
3	Bahan-bahan Nabati	-	24,00	23,64	31,85	34,70	2,32
4	Garam, Belerang, Kapur	-	41,26	65,01	71,40	9,84	5,33
5	Berbagai produk kimia	-	38,06	29,90	18,20	(39,12)	1,36
6	Buah-buahan	7,80	3,11	0,14	1,00	606,04	0,07
7	Ikan dan Udang	-	0,25	0,26	0,47	80,18	0,03
8	Lak, Getah dan Damar	-	0,03	0,16	0,11	(30,10)	0,01
9	Daging dan Olahan Ikan	-	0,11	0,16	0,14	(13,69)	0,01
10	Perangkat Musik	-	0,51	-	-	(6,58)	-
	Total 10 Gol Barang lainnya	1543,80	1.967,25	1.549,54	1.320,61	(14,77)	98,62
	Lainnya	164,30	79,02	49,07	18,42	(62,47)	1,38
	Total Ekspor	1708,10	2.046,27	1.598,61	1.339,03	(16,24)	100,00
	% Perubahan	(2,28)	19,77	(22,05)	(25,44)	(16,24)	

Berdasarkan tabel 3.3.35 diketahui bahwa peranan golongan barang yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat tahun 2019 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$ 967,45 juta (72,25%), diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 229,98 juta (17,18%) dan golongan garam, belerang, kapur sebesar US\$ 71,40 juta (5,33%). Dari sisi perubahan nilai ekspor tahun 2019 terhadap 2018, penurunan nilai yang paling besar terhadap total ekspor Sumatera Barat berasal dari golongan berbagai produk kimia yang menurun

sebesar 39,12%, golongan lak, getah dan damar menurun sebesar 30,10%, golongan karet dan barang dari karet menurun sebesar 20,18% dan golongan lemak & minyak hewan/nabati menurun sebesar 15,12%.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, India masih bertahan sebagai negara tujuan utama ekspor Sumatera Barat. India memiliki pangsa pasar sebesar 21,05% dari ekspor total Sumatera Barat, terutama untuk komoditas CPO. Pertumbuhan bahan pasokan CPO seiring dengan masa panen raya kelapa sawit pada tahun 2019 diyakini menjaga pangsa ekspor Sumatera Barat ke Negara tersebut. Meskipun demikian, pangsa pasar tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 27,68%. Sementara, pengiriman ekspor dari Sumatera Barat ke Pakistan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, berbeda dengan negara lainnya yang memiliki kurva naik turun. Komoditas utama ekspor masih didominasi oleh barang mentah, yakni CPO, karet serta kopi, teh dan rempah-rempah. Ekspor Sumatera Barat berdasarkan negara tujuan digambarkan pada tabel 3.3.36.

Tabel 3.3. 36 Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019

No	Negara Tujuan	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan 2019 terhadap 2018 (%)	Peran terhadap total 2019 (%)
		2016	2017	2018	2019		
1	India	712,00	758,02	442,45	281,92	(36,28)	21,05
2	Amerika Serikat	425,12	460,48	393,07	266,23	(32,27)	19,88
3	Singapura	212,25	219,27	121,67	139,67	14,79	10,43
4	Cina	56,82	101,04	46,06	131,03	184,45	9,79
5	Pakistan	14,02	16,09	49,69	88,13	77,36	6,58
6	Belanda	38,25	49,17	55,49	17,62	(68,25)	1,32
7	Malaysia	35,12	40,92	55,35	25,07	(54,71)	1,87
8	Spanyol	60,12	77,26	78,33	46,84	(40,20)	3,50
9	Jepang	25,12	30,04	14,58	25,78	76,83	1,93
10	Bangladesh	42,48	62,48	131,56	174,88	32,93	13,06
Total 10 Negara Tujuan		1.621,30	1.814,77	1.388,27	1.197,18	(13,76)	89,41
Lainnya		86,80	231,50	210,34	141,84	(32,57)	10,59
Total Ekspor		1.708,10	2.046,27	1.598,61	1.339,03	(16,24)	100,00

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 10/02/13/Th.XXIII, 3 Februari 2020

Capaian indikator kinerja nilai ekspor sebesar 68,06% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja nilai ekspor tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.37.

Tabel 3.3. 37 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja peningkatan nilai ekspor

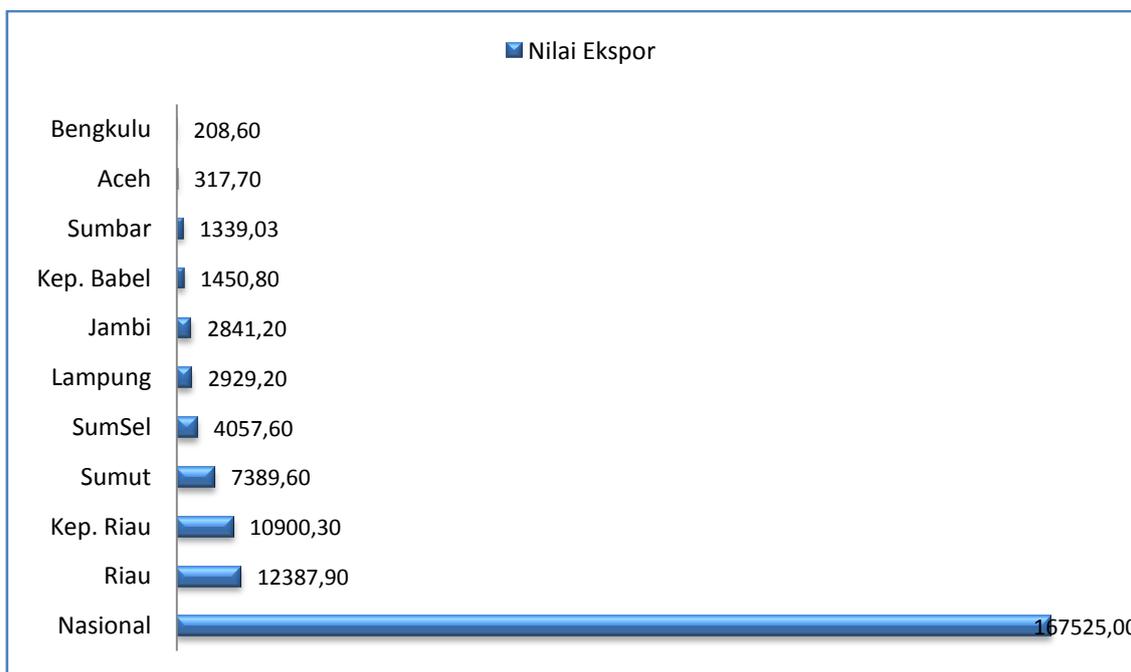
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Nilai ekspor (juta US\$)	1339,03	1598,61	68,06	-	2056,896
2	Peningkatan nilai ekspor (%)	-	-22,05	-	-1102,5	

Realisasi indikator kinerja peningkatan nilai ekspor tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai <100%. Dikarenakan pertumbuhan nilai ekspor beberapa tahun terus tumbuh negatif maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2019 menggunakan nilai ekspor untuk mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya nilai ekspor. Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai ekspor menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar US\$ 259,58 juta di tahun 2019.

Nilai ekspor di tahun akhir RPJMD (2021) ditargetkan sebesar US\$ 2056,896 juta atau meningkat US\$ 717,866 juta dari nilai ekspor tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar US\$ 1339,03 juta menunjukkan pencapaian sebesar 65,1% dari target tahun 2021. Mempertimbangkan capaian di tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir yang selalu menurun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu usaha yang sangat keras untuk mencapai target tersebut.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera dan Nasional, nilai ekspor Sumatera Barat berada di atas nilai ekspor Provinsi Bengkulu dan Aceh. Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki nilai ekspor yang tertinggi adalah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Informasi terkait nilai ekspor Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tergambar pada grafik 29.

Grafik 29 Perbandingan Nilai Ekspor di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2019



Nilai ekspor Sumatera Barat yang tidak kunjung mengalami pertumbuhan positif disebabkan oleh permasalahan-permasalahan berikut:

1. Keterbatasan yang berasal dari faktor eksternal menyangkut pelarangan biofuel dari Indonesia oleh Eropa dalam pengesahan aturan *Renewable Energy Directives (RED) II* Uni Eropa, yang menetapkan volume impor CPO Eropa untuk biofuel di tahun ini sebagai basis (baseline) pengurangan bertahap hingga 2030.
2. Harga komoditas kelapa sawit yang masih rendah.
3. Gejolak perekonomian global yang masih belum kondusif berdampak sangat besar terhadap terkontraksinya ekspor CPO Sumbar.
4. Masih lemahnya permintaan dunia khususnya terhadap produk ekspor utama Sumatera Barat yaitu CPO dan Karet akibat berlarut-larutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
5. Penurunan persediaan bahan baku karena berkurangnya pasokan karet, yang disebabkan petani karet memilih untuk tidak menyadap karet karena harganya yang rendah. Kondisi ini diperparah dengan masuknya pasokan karet dengan kualitas yang lebih baik dari Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, letak geografis 4 Negara ini berada lebih dekat dengan negara pengguna sehingga biaya distribusinya lebih murah.

6. Mayoritas produk ekspor komoditas Sumatera Barat masih bertumpu pada *Primary Product* dan teknologi yang digunakan pun tidak terlalu canggih sehingga perlu peningkatan nilai tambah.
7. Daya saing produk yang dihasilkan masih relatif rendah baik dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2019 untuk meningkatkan nilai ekspor:

1. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan luar negeri melalui peningkatan pemanfaatan fasilitas layanan perdagangan luar negeri dan peningkatan kompetensi calon eksportir dan eksportir antara lain melalui:
 - Sosialisasi Surat Keterangan Asal (SKA)
 - Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
 - Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor.
 - Pembuatan Buku Data Perdagangan Luar Negeri.
2. Meningkatkan standar dan mutu produk ekspor melalui peningkatan pengawasan terhadap komoditi ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian produk ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
3. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat ke negara tersebut.

Strategi Pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor di masa yang akan datang antara lain dengan:

1. Menerapkan hilirisasi industri pada komoditas utama Sumatera Barat serta diversifikasi terhadap produk yang berorientasi ekspor sehingga nantinya komoditas Sumatera Barat tidak mudah dipermainkan oleh pasar dunia. Strategi ini untuk meningkatkan komoditas ekspor Sumatera Barat yang mayoritas masih bertumpu pada *primary product*.
2. Meningkatkan standar dan mutu produk ekspor, melalui peningkatan pengawasan terhadap komoditi ekspor, peningkatan kualitas sarana dan

prasarana pengujian produk ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji. Strategi ini untuk meningkatkan daya saing produk yang relatif masih rendah baik dari segi kemasan, standar dan mutu produk.

3. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat, karena negara tujuan ekspor Sumatera Barat sebagian besar masih terpaut ke negara tujuan tradisional.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2019 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai ekspor adalah sebesar Rp. 9.809.125.600,- dan terealisasi Rp. 7.851.776.701,- atau 80,05%. Anggaran tersebut belum efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai ekspor. Hal ini dilihat dari persentase capaian sasaran strategis meningkatnya nilai ekspor sebesar 68,06% lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran sebesar 80,05%.

Anggaran sebesar Rp. 9.809.125.600,- tersebar pada 1 Program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (6 kegiatan). Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatkan nilai ekspor non migas daerah, begitupun dengan kegiatan-kegiatan pada program tersebut. Untuk itu, kegiatan yang diusulkan di tahun yang akan datang akan lebih disinkronkan dengan program dan sasaran yang ingin dicapai.



**Sasaran
Strategis
4.1.4**

***Menurunnya Tingkat Kemiskinan
dan Pengangguran***

Kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu penting bagi Sumatera Barat. Meskipun tingkat kemiskinan dan pengangguran setiap tahunnya mengalami penurunan, tapi penurunannya masih belum signifikan. Penyelesaian masalah kemiskinan pada saat ini sudah bergeser untuk menanggulangi tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kelompok masyarakat yang miskin. Sedangkan untuk masalah pengangguran juga harus diatasi sebagai salah satu cara untuk

penanggulangan kemiskinan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat miskin dan pengangguran dapat diatasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan pencapaian tujuan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.

Pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran tergambar pada tabel 3.3.38.

Tabel 3.3. 38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.4



Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah sebesar 104,67% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, konsep yang digunakan adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin, dilihat dari penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah

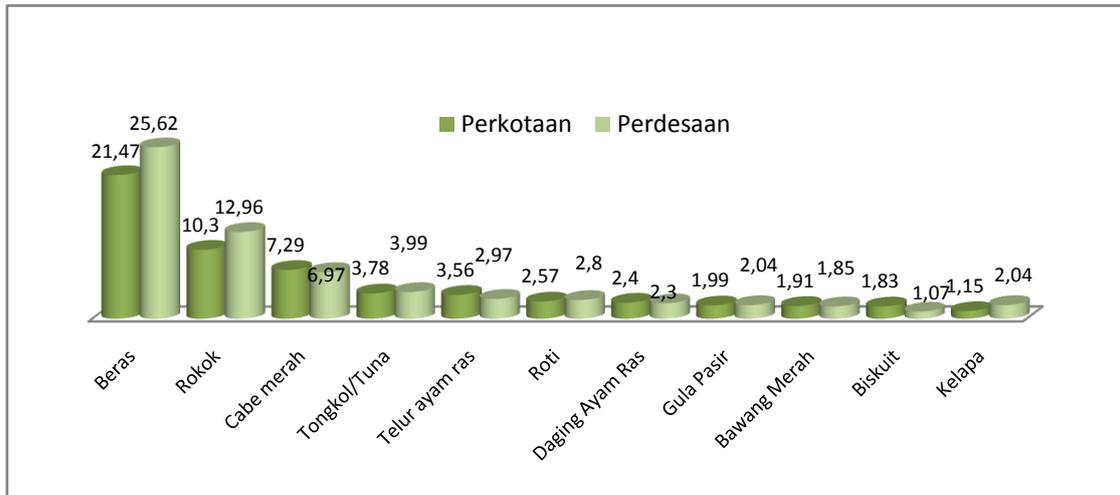
Garis Kemiskinan. Tahun 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,09%, yaitu dari Rp.485.663,- per kapita pada September 2018 menjadi Rp. 529.700,- per kapita pada September 2019.

Untuk tahun 2019, tingkat kemiskinan ditargetkan 6,15% atau menurun 0,4% dari tingkat kemiskinan tahun 2018 (6,55%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan tingkat kemiskinan tahun 2018 (menurun 0,2% dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Selama tahun 2019, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dapat terealisasi sebesar 6,29%, masih di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,15%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,72%.

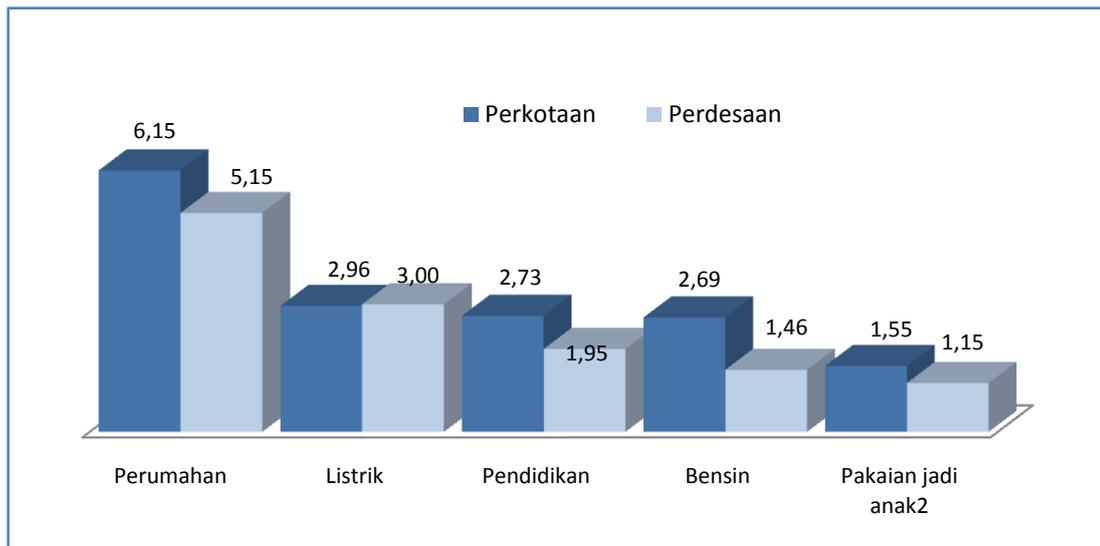
Realisasi ini diukur berdasarkan data tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXIII tanggal 15 Januari 2020. Garis Kemiskinan ditentukan oleh dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Komponen terbesar pembentuk Garis kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan berasal dari komoditi makanan yang peranannya masih jauh lebih besar dari komoditi non makanan. Pada September 2019, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan terbesar dalam komponen komoditi penyusun GK yaitu sebesar 21,475% di perkotaan 25,62% di perdesaan. Rokok kretek filter memberi sumbangan terbesar ke dua terhadap GK di perdesaan 12,96% dan di perkotaan sebesar 10,30%. Posisi ketiga komoditi dengan kontribusi terbesar baik di perkotaan dan perdesaan adalah cabe merah yaitu 7,29% dan 6,97%. Sedangkan penyumbang terbesar garis kemiskinan pada komponen non makanan adalah perumahan, listrik, pendidikan dan bensin. Komposisinya dapat dilihat pada grafik 30 dan grafik 31.

Grafik 30 Daftar Komoditi Makanan yang memberi sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan September 2019



Sumber data: BRS No. 05/01/13/ThXXIII (Profil Kemiskinan di Sumbar September 2019)

Grafik 31 Daftar Komoditi Non Makanan yang memberi Sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan September 2019



Sumber data: BRS No. 05/01/13/ThXXIII (Profil Kemiskinan di Sumbar September 2019)

Capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan sebesar 97,72% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.39.

Tabel 3.3. 39 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja tingkat kemiskinan

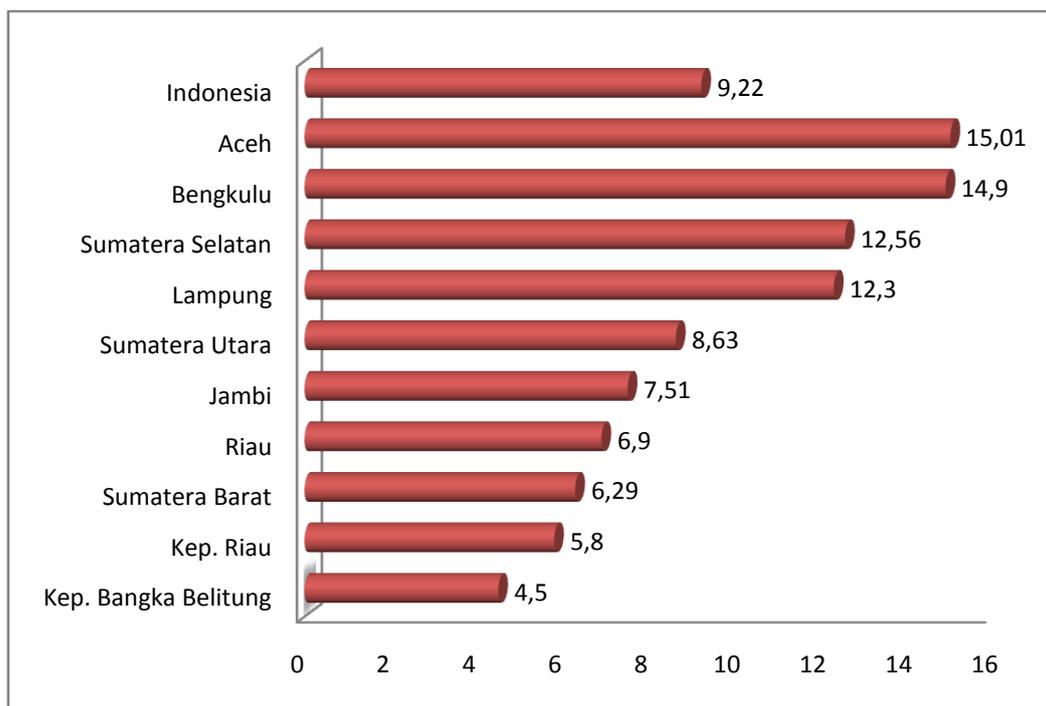
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Tingkat kemiskinan	6,29	6,55	97,72	98,92	5,09

Tingkat kemiskinan tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan tercapai <100%. Pencapaian ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum bisa menekan tingkat kemiskinan menjadi 6,15. Akan tetapi, dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat kemiskinan menunjukkan tren positif dengan penurunan sebesar 0,26. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2019 mencapai 343,09 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 10,15 ribu orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Sementara itu, jika dilihat dari sisi capaian kinerjanya menunjukkan penurunan sebesar 1,2% di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 5,09 atau turun 1,2 dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 6,29 tahun menunjukkan pencapaian sebesar 76,42% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus optimal mengupayakan penurunan tingkat kemiskinan untuk mencapai target tahun 2021.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, tingkat kemiskinan Sumatera Barat berada di urutan terendah ketiga setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kemudian, jika dibandingkan dengan kemiskinan tingkat Nasional, angka kemiskinan Sumatera Barat masih lebih rendah dengan selisih sebesar 2,93. Perbandingan tingkat kemiskinan Sumatera Barat dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019 tergambar pada grafik 32.

Grafik 32 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2019



Sumber data : Berita Resmi Statistik (BRS) No. 08/01/Th. XXIII, 15 Januari 2020

Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berat untuk menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di nagari-nagari setingkat desa, yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumatera Barat, yang umumnya masyarakatnya bekerja sebagai petani. Apalagi Sumatera Barat masih memiliki satu kabupaten yang masih terkukung dalam status daerah tertinggal yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2019 ini telah lepas dari status “Daerah Tertinggal” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 79 Tahun 2019 tentang penetapan keluar dari daerah tertinggal. Akselerasi pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal tetap masih dilakukan sehingga satu lagi Kabupaten di Sumatera Barat akan bebas dari embel-embel “tertinggal” tahun berikutnya dan Kabupaten yang baru lepas dari status tertinggal semakin meningkat ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak dan usaha dari Pemerintah. Adapun usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bimbingan keterampilan.
2. Memenuhi kebutuhan dasar PMKS yang ditampung pada panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.
3. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dengan pendirian dan pengembangan BumDes/BumNag (Badan Usaha Milik Desa/Nagari) serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan agar potensi dan unggulan yang ada di desa/nagari dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa.
4. Fasilitasi penambahan permodalan bagi perkembangan BumNag untuk diusulkan di tingkat pusat akan membantu permasalahan permodalan bagi BumDes/BumNag dalam mengembangkan usahanya.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan telah berhasil mengubah status daerah tertinggal dua Kabupaten tersebut yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 79 Tahun 2019 tentang penetapan keluar dari daerah tertinggal. Keberhasilan ini berkat upaya yang keras dalam meningkatkan Saprasi Pelayanan Pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan telekomunikasi, informasi dan koneksitas, kemudian juga meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui pemberdayaan.

Strategi dan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain:

1. Mengentot sektor pariwisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan ini, sedikit banyak bisa menambal beberapa pos anggaran untuk pembangunan di pelosok.
2. Melibatkan swasta untuk masuk dalam pembangunan di ketiga daerah tertinggal. Caranya tentu melalui pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). BUMD atau BUMN di Sumbar atau perusahaan pelat merah lainnya akan

diminta fokus menyalurkan CSR-nya kabupaten yang masih berstatus tertinggal.

3. Peningkatan arus investasi yang masuk ke daerah. Melalui sejumlah kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam berinvestasi yang sudah dibuat, makin banyak modal yang mengalir masuk dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mentawai misalnya, memiliki potensi kuat dalam bidang pariwisata. Sementara Solok Selatan bisa menambah PAD dari sektor energi baru terbarukan, dalam hal ini energi panas bumi. Sementara Pasaman Barat, bisa terbantu dengan beroperasinya Pelabuhan Teluk Tapang.
4. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan meningkatkan peluang meningkatnya pariwisata dan pendaptan asili daerah.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan adalah Rp.121.330.768.515,-, telah direalisasi sebesar Rp.112.146.114.022,- atau 92,43%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan sebesar 97,72% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,43% (tingkat efisiensi sebesar 5,29%).

Anggaran sebesar Rp.121.330.768.515,- tersebar pada 19 program yaitu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (4 kegiatan), program pembinaan anak terlantar (13 kegiatan), program pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma (9 kegiatan), program pembinaan panti lanjut usia terlantar (6 kegiatan), program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, wanita tuna susila, dan penyakit sosial lainnya) (4 kegiatan), program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (15 kegiatan), program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya (11 kegiatan), program penanganan korban bencana alam dan bencana sosial (9 kegiatan), program pemberdayaan fakir miskin (10 kegiatan), program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (3 kegiatan), program koordinasi bidang kesejahteraan sosial (5 kegiatan), program pengembangan teknologi tepat guna (2 kegiatan), program peningkatan

keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari (9 kegiatan), program peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha (1 kegiatan), program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat (9 kegiatan), program penguatan kelembagaan pemerintahan nagari (5 kegiatan), program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari (1 kegiatan) dan program pembangunan kawasan perdesaan (2 kegiatan) dan program penanggulangan kemiskinan (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan.

2. Tingkat Pengangguran



Untuk tahun 2019, tingkat pengangguran ditargetkan 6,03% atau meningkat 0,48% dari tingkat pengangguran tahun 2018 (5,55%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan tingkat pengangguran tahun 2018 (menurun 0,03% dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi jumlah pengangguran.

Tingkat pengangguran di Sumatera Barat Tahun 2019 ditargetkan sebesar 6,03%, terealisasi sebesar 5,33% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,61%.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data tingkat pengangguran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 64/11/13/Th XXII tanggal 5 November 2019. Tingkat pengangguran diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus Tahun 2019 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{138.460}{2.599.010} \times 100 = 5,33$$

Ket: Jumlah pengangguran = 138.460 orang (Agustus 2019)
Jumlah angkatan kerja = 2.599.010 orang (Agustus 2019)

Bulan Agustus 2019, jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 2.599.010 orang, meningkat 46,88 ribu orang dari periode yang sama tahun 2018. Komponen pembentukan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja 2.460.550 orang, sedangkan yang

menganggur sebanyak 138.460 orang. Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 50,10 ribu orang dan pengangguran berkurang sekitar 3 ribuan orang. Naiknya jumlah angkatan kerja, diiringi dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,51%, naik sebesar 0,25 point dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017-2019 tergambar pada tabel 3.3.40.

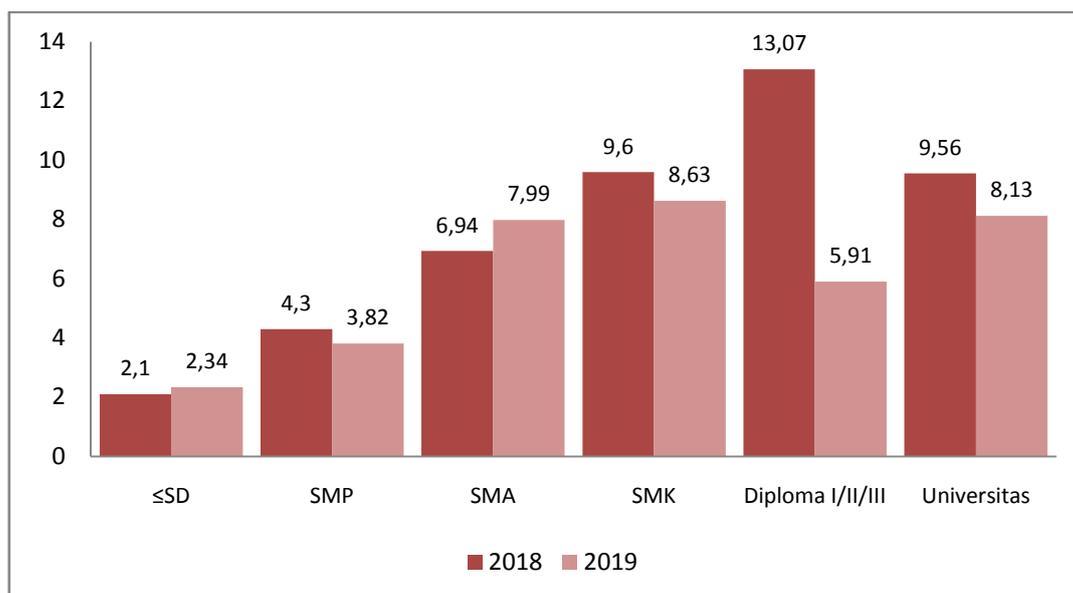
Tabel 3.3. 40 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Sumatera Barat 2017-2019

Status Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2019-Agustus 2018)	
	(Ribu Orang)			
Penduduk Usia Kerja	3794,40	3849,82	55,42	1,46
1. Angkatan Kerja	2552,13	2599,01	46,88	1,84
Bekerja	2410,45	2460,55	50,10	2,08
Pengangguran	141,68	138,46	-3,22	-2,27
2. Bukan Angkatan Kerja	1242,27	1250,80	8,53	0,69
Sekolah	421,95	393,05	-28,90	-6,85
Mengurus RT	656,76	685,35	28,59	4,35
Lainnya	163,57	172,40	8,83	5,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,55	5,33		-0,22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,26	67,51		0,25

Sumber data : BPS Sumbar "BRS No.64/11/13/ThXXII, 5 November 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,63%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada universitas sebesar 8,13%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Universitas. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan (2,34%). Dibanding kondisi setahun yang lalu, TPT yang mengalami penurunan ada pada tingkat pendidikan SMP, SMK, Diploma I/II/III dan Universitas. Sementara TPT pada jenjang SD ke bawah dan SMA sederajat mengalami kenaikan. Gambaran TPT berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 33.

Grafik 33 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan (%)



Sumber data : BPS Sumbar "BRS No.64/11/13/ThXXII, 5 November 2019

Dilihat dari kabupaten/kota di Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di Kabupaten. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada pada Kota Padang yaitu sebesar 8,76% namun menurun 0,42% dari tahun lalu. Kemudian TPT tertinggi kedua disusul oleh Kota Solok sebesar 7,09%, meningkat 1,12% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian TPT tertinggi berikutnya disusul oleh Kota Sawahlunto sebesar 6,82, Kota Bukittinggi sebesar 6,14% dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5,97%. Berikut penyajian rinci tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tabel 3.3.41.

Tabel 3.3. 41 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan (%)
Kabupaten			
Kepulauan Mentawai	2,27	2,92	0,65
Pesisir Selatan	5,85	5,84	-0,01
Solok	5,92	4,65	-1,27
Sijunjung	3,20	3,68	0,47
Tanah Datar	3,86	3,14	-0,71
Padang Pariaman	6,90	5,97	-0,93
Agam	4,82	4,72	-0,10
Lima Puluh Kota	2,70	2,28	-0,42
Pasaman	5,88	5,21	-0,67
Solok Selatan	5,85	4,91	-0,94

Kabupaten/Kota	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan (%)
Dharmasraya	3,94	5,08	1,15
Pasaman Barat	3,37	4,64	1,27
Kota			
Padang	9,18	8,76	-0,42
Kota Solok	5,97	7,09	1,12
Sawahlunto	5,75	6,82	1,07
Padang Panjang	5,28	4,35	-0,93
Bukittinggi	7,15	6,14	-1,01
Payakumbuh	3,78	4,11	0,33
Pariaman	5,72	5,42	-0,31
Sumatera Barat	5,55	5,33	-0,22

Sumber data: BRS No.64/11/13/ThXXII, 05 November 2019

Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran sebesar 111,61% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.42.

Tabel 3.3. 42 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Tingkat Pengangguran	5,33	5,55	111,61	111,2	5,6

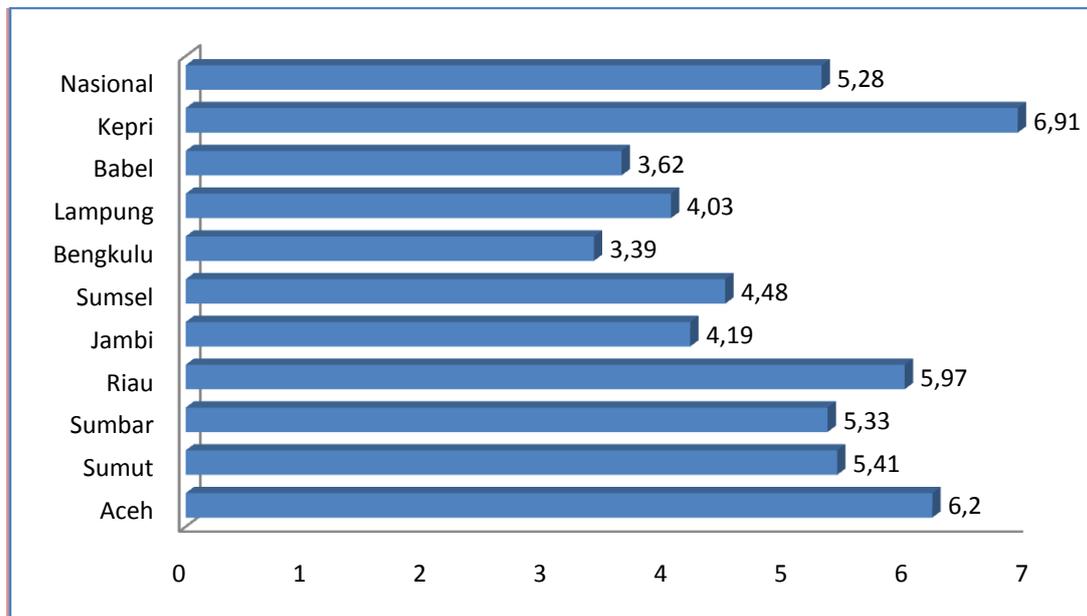
Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator kinerja ini tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat pengangguran menunjukkan tren positif dengan penurunan sebesar 0,22% di tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2018-2019 juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,41%.

Jika dibandingkan dengan target 2021 sebesar 5,6%, realisasi TPT Tahun 2019 telah mencapai target tahun 2021 artinya kondisi tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 sudah lebih baik dari yang ditargetkan pada akhir Tahun RPJMD. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait akan berupaya secara optimal untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke enam terendah

setelah Sumatera Selatan dengan nilai TPT 4,48%. TPT terendah berada di Provinsi Bengkulu yaitu 3,39%, kemudian disusul oleh Bangka Belitung dengan nilai TPT 3,62%. TPT tertinggi di Pulau Sumatera adalah Kepulauan Riau sebesar 6,91%. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,28%, angka TPT Sumatera Barat masih berada 0,05% di bawah angka Nasional dan berada pada urutan 23 dibandingkan dengan Provinsi lain se Indonesia, sebagaimana tergambar pada grafik 34.

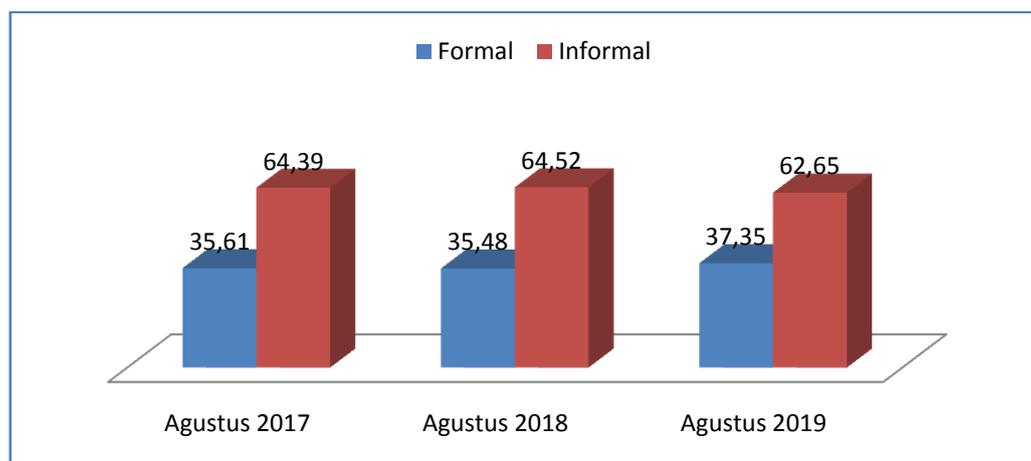
Grafik 34 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Agustus 2019



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Status pekerjaan di Sumatera Barat sebagian besar masih bersifat informal. Pekerja informal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja formal. Posisi Agustus 2019, pangsa pekerja formal di Sumatera Barat hanya mencapai 37,35% atau berjumlah 918,97 Ribu orang, sedangkan pekerja informal berjumlah 1.541,6 ribu orang atau 62,65%. Apabila dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya pangsa pekerja formal cenderung mengalami kenaikan dari 35,48% pada Agustus 2018 menjadi 37,35% pada Agustus 2019 karena adanya kenaikan jumlah buruh/karyawan sebesar 58,83 ribu orang (7,76%). Hal tersebut, digambarkan pada grafik 35.

Grafik 35 Persentase penduduk bekerja menurut kegiatan Formal/Informal (2017-2019)



Sumber data: BRS No.64/11/13/ThXXII, 05 November 2019

Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya tenaga kerja sektor formal diantaranya:

1. Tambahan angkatan kerja setiap tahunnya belum disertai dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja sektor informal. Penyerapan tenaga kerja sektor informal pada Agustus 2019 mencapai 62,65%, sedikit lebih rendah dibandingkan penyerapan pada Agustus 2018 sebesar 64,52%.
2. Masih relatif belum banyaknya investasi di Sumatera Barat diindikasikan mempengaruhi terbatasnya permintaan tenaga kerja disektor formal.

Dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama Tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya berikut ini:

1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai lembaga yang melatih para angkatan kerja agar siap menghadapi dunia kerja. Di Sumatera Barat hingga tahun 2019, dari 320 LPK yang sudah ada, sebanyak 220 LPK sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Meningkatkan SDM Masyarakat dan Pencari Kerja dengan melakukan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang sesuai dengan pasar kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14.500 orang tenaga

kerja yang dilatih pada Balai Latihan Kerja (BLK) di 12 kabupaten/Kota. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.

3. Mengintensifkan monitoring kepada binaan-binaan yang telah dilatih dan diberi bimbingan konsultasi produktivitas, agar dapat diberikan bimbingan perbaikan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian tingkat produktivitas tenaga kerja maupun perusahaan dapat dipertahankan bahkan mengalami peningkatan secara konsisten.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan pengangguran Sumatera Barat kedepannya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dari industri pengolahan makanan dan minuman, CPO dan Karet. Sebagai informasi, industri pengolahan di Sumatera Barat didominasi oleh pengolahan makanan dan minuman, CPO dan karet, sehingga kenaikan harga komoditas dan kenaikan permintaan dunia diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan kebutuhan tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut.
2. Meningkatkan kerjasama dan komitmen pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menggiatkan pariwisata. Hal tersebut terindikasi menjadi faktor pendorong meningkatnya peran dan kinerja sektor jasa, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
3. Perbaiki tingkat pendidikan masyarakat (angkatan kerja). Hal ini diyakini juga akan mendorong peralihan penyerapan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder/tersier.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat pengangguran adalah Rp. 10.958.799.828,- terealisasi sebesar Rp10.510.438.034,- atau 95,91%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung

pencapaian indikator kinerja tingkat pengangguran. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja tingkat pengangguran sebesar 111,61% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,91% (tingkat efesiensi 15,69%)

Anggaran sebesar Rp. 10.958.799.828,- tersebar pada 6 program yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja dan diverifikasi usaha, program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja, program pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium dan program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal. Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja tingkat pengangguran.

MISI 5 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 5.1 Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Fungsi infrastruktur mempunyai pengaruh yang besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, peningkatan fungsi infrastruktur menjadi tujuan pertama misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Fungsi infrastruktur yang harus ditingkatkan tersebut antara lain: jalan, jembatan, jaringan listrik, dan infrastuktur layanan dasar masyarakat. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan tersebut telah ditetapkan 2 indikator kinerja yang realisasi dan capaiannya tergambar pada tabel 3.3.43

Tabel 3.3. 43 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.1



Berdasarkan tabel 3.3.43 dapat diketahui:

1. Indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap target 37 ruas jalan terealisasi 40 ruas jalan dengan tingkat capaian 108,11% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.
2. Indikator kinerja rasio elektrifikasi target 99,17% terealisasi 95,82% dengan tingkat capaian 96,62% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Berdasarkan realisasi 2 indikator tujuan 5.1 yang tercantum pada tabel 3.3.43 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pertama misi 5 tercapai dengan baik. Pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh:

1. Meningkatnya jumlah ruas jalan antar daerah yang dihubungkan dengan jalan dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ sebanyak 40 ruas jalan. Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah ruas jalan dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ mengalami peningkatan sebanyak 4 ruas jalan di tahun 2019.
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang berlistrik di tahun 2019 yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,99% di tahun 2019. Secara absolut jumlah rumah tangga yang berlistrik di tahun 2019 sebanyak 1.214.344 RT. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebanyak 11.955 RT dibandingkan tahun 2018.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah antara lain:

1. Pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi yang dilakukan di 25 ruas jalan dengan panjang yang dibangun 10,99 Km dan ditingkatkan 10,72 Km.
2. Pemeliharaan jalan yang dilakukan di 53 ruas jalan dan jembatan Provinsi dengan panjang total yang direhab \pm 1.240,86 KM
3. Pembangunan 2 unit infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Sumatera Barat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.
4. Pemasangan 337 unit instalasi listrik untuk Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang
5. Memantau pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah telah ditetapkan 4 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian keempat sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Konektivitas dan aksesibilitas wilayah mempunyai peranan yang sangat besar untuk pembangunan suatu wilayah. Wilayah yang aksesibilitasnya baik akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi konektivitas dan aksesibilitas wilayah antara lain jaringan jalan yang baik, kualitas dan kuantitas jalan dan keefektifan sistem jaringan yang mudah diakses. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebagai indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Penetapan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap diukur berdasarkan jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap \geq 72%.

Untuk tahun 2019, ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan sebanyak 37 ruas jalan atau mengalami peningkatan sebanyak 1 ruas jalan dibandingkan dengan ruas jalan mantap di tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2018 (menurun 2 ruas jalan dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah tergambar pada tabel 3.3.44.

Tabel 3.3. 44 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1



Indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap target 37 ruas jalan, terealisasi 40 dengan tingkat capaian 108,11% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi jalan mantap sebanyak $\geq 72\%$ berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (hasil *final report survey IRMS (Integrated Road Management System)*). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km (58 ruas jalan). Pada tahun 2019 sebanyak 40 jumlah ruas jalan dari 58 jumlah ruas jalan yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$. Ruas jalan Provinsi tahun 2019 dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ diuraikan pada tabel 3.3.45.

Tabel 3.3. 45 Ruas Jalan Provinsi Tahun 2019 dalam kondisi mantap $\geq 72\%$

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan	Kemantapan Jalan			
			Mantap		Tidak Mantap	
			Km	%	Km	%
1	Simancung - Tanjung Ampalu	11.080	10.680	96.390	0.400	3.610
2	Tanjung Ampalu - Sijunjung	20.000	18.100	90.500	1.900	9.500
3	Simp.Sikabau - Simp.Koto Baru	29.000	24.500	84.483	4.500	15.517
4	Simp.Koto Baru - Tanjung Simalidu	11.900	10.200	85.714	1.700	14.286
5	Simp.Koto Baru - Junction	5.400	4.700	87.037	0.700	12.963
6	Indrapura - Muara Sakai	7.300	6.900	94.521	0.400	5.479
7	Sicincin - Kuraitaji	16.440	14.840	90.268	1.600	9.732
8	Panti - Simpang Empat	74.230	63.330	85.316	10.900	14.684
9	Simp. Empat - Sasak	20.000	17.300	86.500	2.700	13.500
10	Air Balam - Air Bangis	12.600	12.520	99.365	0.080	0.635
11	Kubu Kerambil - Batusangkar	18.500	14.900	80.541	3.600	19.459
12	Baso - Bts Batusangkar (Balai Selasa)	28.790	25.990	90.274	2.800	9.726
13	Bts Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10.400	9.500	91.346	0.900	8.654
14	Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30.600	27.600	90.196	3.000	9.804
15	Guguk Cino - Sitangkai	15.120	12.920	85.450	2.200	14.550
16	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17.280	14.800	85.648	2.480	14.352
17	Bts Kota Payakumbuh - Sitangkai	50.610	42.310	83.600	8.300	16.400
18	Junction - Abaisiat	12.600	12.400	98.413	0.200	1.587
19	Sijunjung - Tanah Badantung	4.400	4.100	93.182	0.300	6.818
20	Simp.Padang Aro -Lubuk Malako	20.000	16.270	81.350	3.730	18.650
21	Padangsawah - Kumpulan	36.500	31.410	86.055	5.090	13.945
22	Batas Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46.850	40.350	86.126	6.500	13.874
23	Batusangkar - Ombilin	18.510	16.600	89.681	1.910	10.319
24	Solok- Alahan Panjang	47.800	41.000	85.774	6.800	14.226
25	Lubuk Basung - Sungai Limau	30.900	25.800	83.495	5.100	16.505
26	Simp Duku (Ketaping) - Pariaman	20.500	18.820	91.805	1.680	8.195
27	Simp.Koto Mambang - Balingka	39.400	39.150	99.365	0.250	0.635
28	Matur - Palembang	20.700	17.200	83.092	3.500	16.908
29	Palembayan - Palupuh (Simp.Patai)	13.300	12.300	92.481	1.000	7.519
30	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44.100	43.700	99.093	0.400	0.907
31	Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14.170	13.170	92.943	1.000	7.057
32	Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (Tpa Regional)	2.050	2.000	97.561	0.050	2.439
33	Padang Koto Gadang - Palembang	31.000	24.400	78.710	6.600	21.290
34	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	28.400	27.600	97.183	0.800	2.817
35	Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting	30.000	24.900	83.000	5.100	17.000
36	Pintu Angin - Lubuak Saiyo	5.500	5.455	99.182	0.045	0.818
37	Rao - Rokan (Batas Riau)	33.000	29.750	90.152	3.250	9.848
38	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12.000	10.850	90.417	1.150	9.583
39	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1.200	1.050	87.500	0.150	12.500
40	Simpang SP li - Kantor Camat	5.100	4.300	84.314	0.800	15.686

Sumber Data: Dinas PUPR

Capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebesar 108,11% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.46.

Tabel 3.3. 46 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Jumlah Ruas Jalan Antar Daerah yang Terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	36	108,11	100	40

Realisasi indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator kinerja ini tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi indikator ini menunjukkan tren positif dengan penambahan 4 ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ di tahun 2019. Sejalan dengan realisasinya, capaian kinerja indikator ini tahun 2018-2019 juga menunjukkan tren positif. Secara absolut panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap tahun 2019 adalah sebanyak 1.113.628 Km atau meningkat 14.595 Km dibandingkan tahun 2018. Dari panjang jalan tersebut 80,57% termasuk kondisi mantap $\geq 72\%$.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi tahun 2019 telah mencapai target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait akan berupaya secara optimal untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Hambatan/tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019 adalah:

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik dikarenakan belum adanya aturan baku di LKPP terkait pelelangan konstruksi sehingga proses lelang konstruksi terlambat dilaksanakan.

2. Kendala dalam pembebasan lahan yang akan dibangun.
3. Curah hujan yang tinggi yang menyebabkan keterlambatan kendaraan yang membawa material ke lokasi pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya berikut ini untuk meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019:

1. Pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi dilakukan di 25 ruas jalan dengan panjang yang dibangun 10,99 Km dan ditingkatkan 10,72 KM.
2. Pemeliharaan jalan dilakukan di 53 ruas jalan dan jembatan Provinsi dengan panjang total yang direhab ± 1.240,86 KM

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk melakukan:

1. Memfokuskan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan pada ruas-ruas jalan yang rusak parah.
2. Berupaya untuk pembukaan jalan baru untuk ruas yang belum terhubung dan terisolir.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah Rp. 462.723.573.931,- terealisasi sebesar Rp. 378.850.706.533,01,- atau 81,87%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap sebesar 108,11% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 81,87% (tingkat efisiensi 26,24%).

Anggaran sebesar Rp. 462.723.573.931,- tersebar pada 13 program yaitu program pembangunan jalan dan jembatan provinsi (35 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan (59 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (3 kegiatan), program penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota (22 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (3 kegiatan), program perencanaan penataan ruang (7 kegiatan), program pengendalian dan pemanfaatan ruang (3 kegiatan), program pembangunan sarana dan prasarana perkerataapian (4 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (3 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (3 kegiatan), program pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut (6 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan angkutan (22 kegiatan), program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah.



Energi listrik mempunyai peranan yang besar dalam aktivitas kehidupan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Salah satu peran pemerintah adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik melalui pembangunan infrastruktur ketenalistrikan. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Akses masyarakat terhadap listrik dapat ditingkatkan jika infrastruktur energi ketenalistrikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan sebagai sasaran strategis dengan indikator kinerja rasio elektrifikasi. Penetapan rasio elektrifikasi diukur dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada di Sumatera Barat.

Untuk tahun 2019, rasio elektrifikasi ditetapkan sebesar 99,17% atau mengalami peningkatan sebesar 5,34% dari rasio elektrifikasi di tahun 2018 (93,83%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan rasio elektrifikasi tahun 2018 (meningkat 4,42% dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan tergambar pada tabel 3.3.47.

Tabel 3.3. 47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.2



Indikator kinerja rasio elektrifikasi target 99,17% terealisasi 95,82% dengan tingkat capaian 96,62% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

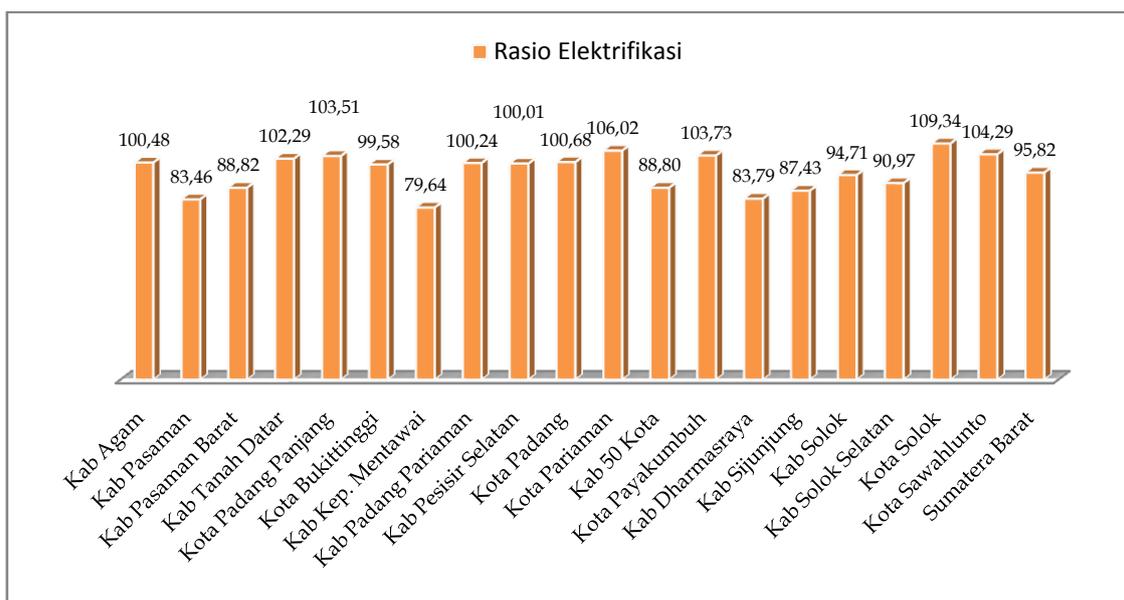
Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga di Sumatera Barat tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{1.214.344}{1.267.286} \times 100 = 95,82\%$$

Ket: Jumlah RT yang terlistriki s/d tahun 2019= 1.214.344
Jumlah RT s/d tahun 2019 = 1.267.286

Rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 95,82% berasal dari rata-rata rasio elektrifikasi 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Rasio elektrifikasi kabupaten/kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik 36.

Grafik 36 Rasio Elektrifikasi kabupaten/kota se Sumatera Barat Tahun 2019



Sumber data: Dinas ESDM

Capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 96,62% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.48.

Tabel 3.3. 48 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Rasio Elektrifikasi (%)	95,82	93,83	96,62	100,21	99,96

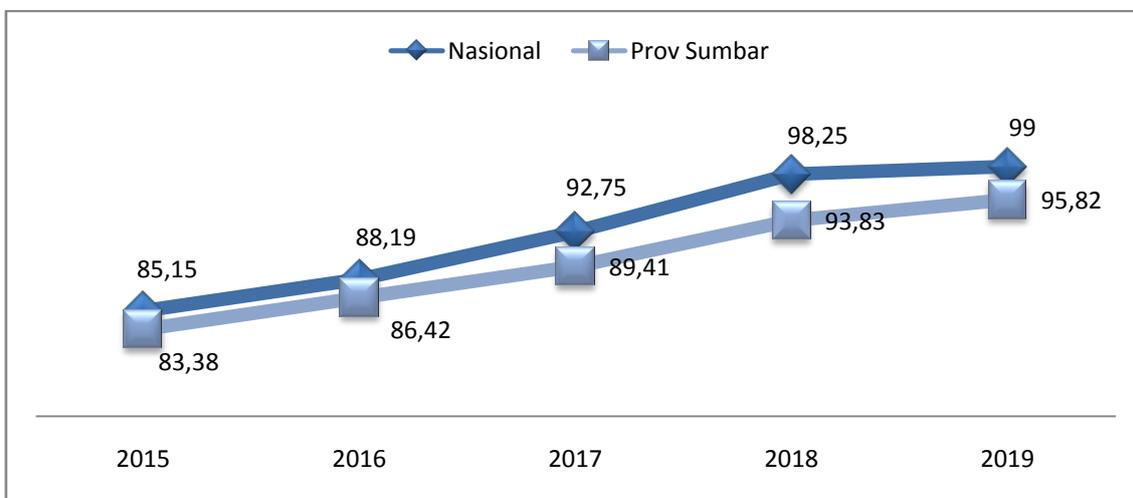
Realisasi rasio elektrifikasi tahun 2019 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator rasio elektrifikasi tercapai <100%. Dibandingkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2018, realisasi rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 1,99%. Akan tetapi, dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,59% untuk capaian kinerja tahun 2019.

Untuk tahun 2021, rasio elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,96% atau meningkat 4,14% dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 95,82% menunjukkan pencapaian sebesar 95,86% dari target tahun 2021. Dengan

mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Dibandingkan dengan nasional, rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (2015-2019) masih berada di bawah rasio elektrifikasi nasional. Perbandingan rasio elektrifikasi nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tergambar pada grafik 37.

Grafik 37 Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019



Sumber data: Dinas ESDM

Hambatan/tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tahun 2019 adalah:

1. Lokasi rumah tangga belum berlistrik yang sulit dijangkau (terkendala akses perhubungan).
2. Adanya pembangkit EBT yang mengalami kerusakan sehingga Rasio Elektrifikasi mengalami penurunan.
3. Belum tersedianya infrastruktur pendukung (jaringan).
4. Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk melakukan sambung baru listrik PLN.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya berikut ini:

1. Membangun 2 unit infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Sumatera Barat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.
2. Pemasangan 337 unit instalasi listrik untuk Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha ketenagalistrikan di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan peran stakeholders dalam meningkatkan rasio elektrifikasi.
3. Mengoptimalkan peran pembinaan ke kabupaten/kota terkait dengan ketenagalistrikan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan adalah Rp. 7.357.320.088,- terealisasi sebesar Rp. 6.668.822.828,- atau 90,64%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 96,62% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 90,64%.

Anggaran sebesar Rp. 7.357.320.088,- tersebar pada 4 program yaitu program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan (10 kegiatan), program pembinaan, pengembangan dan pengawasan energi (5 kegiatan) dan program pengelolaan mineral dan batubara (6 kegiatan), dan program perencanaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan.

**Sasaran
Strategis
5.1.3**

**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Pengelolaan Sumber Daya Air**

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan vital dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sumber daya air perlu dikelola dengan baik agar tercapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Salah satu cara untuk peningkatan sumber daya air perlu dilaksanakan peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air. Infrastruktur sumber daya air antara lain bendungan, waduk, dan sistem jaringan irigasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang diukur dengan indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diukur dari rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi, persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dan persentase volume tampungan sumber-sumber air.

Untuk tahun 2019, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditetapkan sebesar 62,40% atau mengalami peningkatan sebesar 3,28% dari persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air di tahun 2018 (59,12%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2018 (meningkat 2,83% dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tergambar pada tabel 3.3.49.

Tabel 3.3. 49 Capaian Indikator Kinerja Persentase Rata-Rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air



Indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air target 62,40% terealisasi 63,95% dengan tingkat capaian 102,48% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi, persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dan persentase volume tampungan sumber-sumber air berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air} = \frac{76,19\% + 63,88\% + 51,78\%}{3} = 63,95\%$$

Ket: persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi: 76,19%
 persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air= 63,88%
 persentase volume tampungan sumber-sumber air = 51,78%

Capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 102,48% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.50.

Tabel 3.3. 50 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase Rata-Rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Persentase Rata-Rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	63,95	59,12	102,48	99,19	68,33

Realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2019 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaian indikator kinerja ini menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan sebesar 4,83% dan 3,29% di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan sebesar 68,33% atau meningkat 4,38%

dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 63,95% menunjukkan pencapaian sebesar 93,59% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Hambatan/kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air antara lain:

- a. Jadwal penutupan air irigasi pada daerah irigasi terkait dengan musim tanam sehingga untuk pekerjaan fisik lapangan perlu disepakati bersama dengan petani pemakai air.
- b. Rendahnya kinerja penyedia jasa
- c. Faktor cuaca dengan curah hujan yang tinggi sehingga melambatnya pelaksanaan pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Upaya yang dilakukan antara lain:

a. Peningkatan kinerja layanan infrastruktur irigasi

Salah satu infrastruktur sumber daya air adalah irigasi. Pada tahun 2019 luas Daerah Irigasi (DI) fungsional kewenangan Provinsi adalah 49.528,48 ha atau mengalami peningkatan sebesar 4.858,48 ha dibandingkan luas irigasi fungsional tahun 2018 (44.670 Ha). Untuk mencapai peningkatan tersebut di tahun 2019 telah dilakukan rehabilitasi pada 31 Daerah Irigasi (DI) dengan total penanganan 10.415,57 meter saluran pembawa, rehabilitasi 4 unit bendung, 4 unit bangunan ukur, 2 unit bangunan penguras, 7 unit bangunan bagi, 2 unit bangunan sadap, pembuatan 253 m penahan tebing, 23 m talang dan 10 unit pintu air. Rincian DI yang direhabilitasi diuraikan pada tabel 3.3.51.

Tabel 3.3. 51 Daerah Irigasi yang direhabilitasi di tahun 2019

No	Nama Daerah Irigasi
1	Rehabilitasi D.I Bandar Ipuh Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman
2	Rehabilitasi D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam-Kota Bukittinggi
3	Rehabilitasi D.I Gunung Nago Kota Padang
4	Rehabilitasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota-Kota Payakumbuh
5	Rehabilitasi D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar
6	Rehabilitasi D.I Batang Lampasi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
7	Rehabilitasi D.I Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman
8	Rehabilitasi D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan
9	Rehabilitasi D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
10	Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan
11	Rehabilitasi D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan
12	Pendamping Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP) DI. Lubuk Gobing
13	Rehabilitasi D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok
14	Rehabilitasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan
15	Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam
16	Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang II Paninjauan Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
17	Rehabilitasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar
18	Rehabilitasi D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
19	Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
20	Rehabilitasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
21	Rehabilitasi D.I Kapar Ampu Kab. Pasaman Barat
22	Rehabilitasi D.I Koto Tuo Kota Padang
23	Rehabilitasi D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan
24	Rehabilitasi D.I Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan
25	Rehabilitasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok
26	Rehabilitasi D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam
27	Rehabilitasi D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok-Kota Solok
28	Rehabilitasi D.I Bintungan Kabupaten Solok
29	Rehabilitasi DI Batang Partupangan Kab. Pasaman Barat
30	Rehabilitasi DI Batang Tingkarang Kab.Pasaman
31	Rehabilitasi DI Batang Rimbo Tampurung Kab.Pasaman Barat

Sumber data : DPSDA Provinsi Sumbar

b. Peningkatan kawasan terlindungi dari daya rusak air

Pada tahun 2019, luas kawasan terlindungi dari daya rusak air adalah 1.999,495 Ha atau meningkat sebesar 129,365 Ha dibandingkan luas kawasan terlindungi dari daya rusak air di tahun 2018 (1.870,13 Ha). Untuk meningkatkan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2019 telah dilakukan pembangunan infrastruktur sebanyak 12.936,5 meter pada 34 lokasi pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Infrastruktur perlindungan dari daya rusak air yang dibangun di tahun 2019 diuraikan pada tabel 3.3.52.

Tabel 3.3. 52 Pembangunan infrastruktur Perlindungan dari daya rusak air tahun 2019

No	Pembangunan Infrastruktur Perlindungan Dari Daya Rusak Air
1	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Inderopuro Kabupaten Pesisir Selatan
2	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Palangki Kabupaten Solok - Kabupaten Sijunjung
3	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan
4	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi Kota Padang
5	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Lawas Kabupaten Solok
6	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Belimbing Kota Padang
7	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Agam Kota Payakumbuh
8	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Kambang-Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
10	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Palangai Kabupaten Pesisir Selatan
11	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Kaloko Kabupaten Sijunjung
12	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Punago Kabupaten Lima Puluh Kota
13	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Sumani Kabupaten Solok
14	Pengendalian Pantai/Muara Batang Maligi Kabupaten Pasaman Barat
15	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Lembang Kota Solok dan Kabupaten Solok
16	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Sungai Kumpai Anak Batang Sukam Kabupaten Sijunjung
18	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Suo Kabupaten Solok
19	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman
20	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Muaro Sungai Batang Kandis Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan
21	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Kapur Sembilan Kabupaten Lima Puluh Kota
22	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Lakitan Kabupaten Pesisir Selatan
23	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan
24	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Sumpur Kabupaten Pasaman
25	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Hulu Masang Kabupaten Pasaman
26	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan
27	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan
28	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Sungai Batang Sungai Sariak Malai Kabupaten Padang Pariaman
29	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Sungai Antokan Kabupaten Agam
30	Pembangunan Prasarana Sungai Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
31	Pengamanan Pantai Bungus Kota Padang
32	Rehabilitasi Checkdam Batang Malana Kabupaten Tanah Datar
33	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Aia Katiak Kab. Agam
34	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Bunut Kabupaten Pasaman Barat

Sumber data : DPSDA Provinsi Sumbar

c. Peningkatan kapasitas tampungan sumber – sumber air

Selain peningkatan kinerja irigasi, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diperlukan peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air. Pada tahun 2019, kapasitas tampungan sumber-sumber air adalah 304.167 m³ atau meningkat 16.880 m³ dibandingkan kapasitas tampungan di tahun 2018 (282.287 m³). Untuk meningkatkan kapasitas tampungan sumber-sumber air telah dilakukan revitalisasi Embung Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam dan Embung Kandih Bukik Kandung Kabupaten Solok.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

1. Lebih selektif memilih penyedia jasa konstruksi dan konsultasi sehingga kegiatan fisik/pembangunan infrastruktur terlaksana sesuai jadwal.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik/pembangunan infrastruktur.
3. Meningkatkan kapasitas SDM terkait penyelenggaraan kegiatan fisik/pembangunan infrastruktur.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air adalah Rp. 128.764.694.983,-, terealisasi sebesar Rp. 120.299.667.430,- atau 93,43%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 102,48% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,43% (tingkat efisiensi 9,05%).

Anggaran sebesar Rp. 128.764.694.983,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (6 kegiatan), program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan provinsi lainnya (52 kegiatan), program penyediaan dan

pengolahan air baku (4 kegiatan), program pengendalian banjir dan pengamanan pantai (48 kegiatan), dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (11 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

**Sasaran
Strategis
5.1.4**

***Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur
Layanan Dasar Masyarakat***

Infrastruktur layanan dasar masyarakat antara lain mencakup akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, terjangkau, pengelolaan air tanah dan air baku aman berkelanjutan, akses air minum dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur layanan dasar tersebut bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah agar ketimpangan antar wilayah dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat sebagai sasaran yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat. Penetapan persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat diukur berdasarkan rata-rata cakupan air minum, cakupan sanitasi dan persentase penurunan rumah tidak layak huni.

Untuk tahun 2019, persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat ditetapkan sebesar 53,67% atau mengalami peningkatan sebesar 1,33% dari persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat di tahun 2018 (52,34%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2018 juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastuktur layanan dasar masyarakat tergambar pada tabel 3.3.53.

Tabel 3.3. 53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.4



Indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat target 53,67% terealisasi 55,23% dengan tingkat capaian 102,91% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari rata-rata cakupan air minum, cakupan sanitasi dan persentase penurunan rumah tidak layak huni berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat} = \frac{78,65\% + 79,78\% + 7,25\%}{3} = 55,23\%$$

Ket: Cakupan air minum= 78,65%
Cakupan sanitasi= 79,78%
persentase penurunan rumah tidak layak huni = 7,25%

Capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat sebesar 102,91% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.54.

Tabel 3.3. 54 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat	55,23	52,34	102,91	101,97	56,33

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2019 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja ini menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan sebesar 2,89% dan 0,94% di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat ditargetkan sebesar 56,33% atau meningkat 1,1% dari realisasi tahun 2019. Realisasi tahun 2019 sebesar 55,23% menunjukkan pencapaian sebesar 98,05% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Hambatan/kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat antara lain:

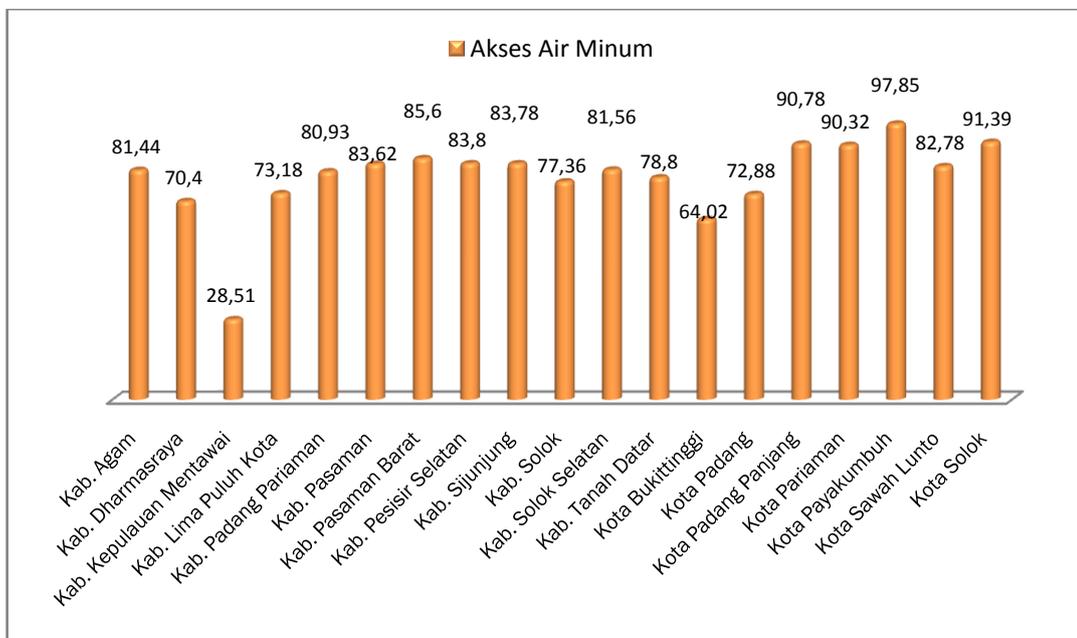
1. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota.
2. Masih terdapatnya jalur pipa distribusi yang lahannya belum bebas.
3. Kurangnya komitmen kab/kota khususnya terkait pendanaan kegiatan pendukung.
4. Penolakan dari masyarakat terkait tanah hibah yang digunakan untuk pengolahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
5. Belum adanya payung hukum yang memperbolehkan Pemerintah Provinsi melakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni.
6. Belum finalnya data yang valid tentang jumlah rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni, karena data bersifat dinamis dan selalu berubah setiap tahunnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat antara lain:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum

Akses masyarakat terhadap air minum mengalami peningkatan sebesar 2,61% dibandingkan dengan akses air minum di tahun 2018 (76,04%). Dari jumlah penduduk Sumatera Barat 5.060.063 jiwa, sebanyak 3.979.882 jiwa (78,65%) sudah memiliki akses air minum aman. Akses penyediaan air minum berasal dari PDAM 37,74%, Non PDAM 11,09% dan Non Perpipaan 29,82%. Akses air minum sebesar 78,65% merupakan akumulasi akses air minum dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Rincian akses air minum 19 kabupaten/kota tergambar pada grafik 38.

Grafik 38 Akses air minum 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019

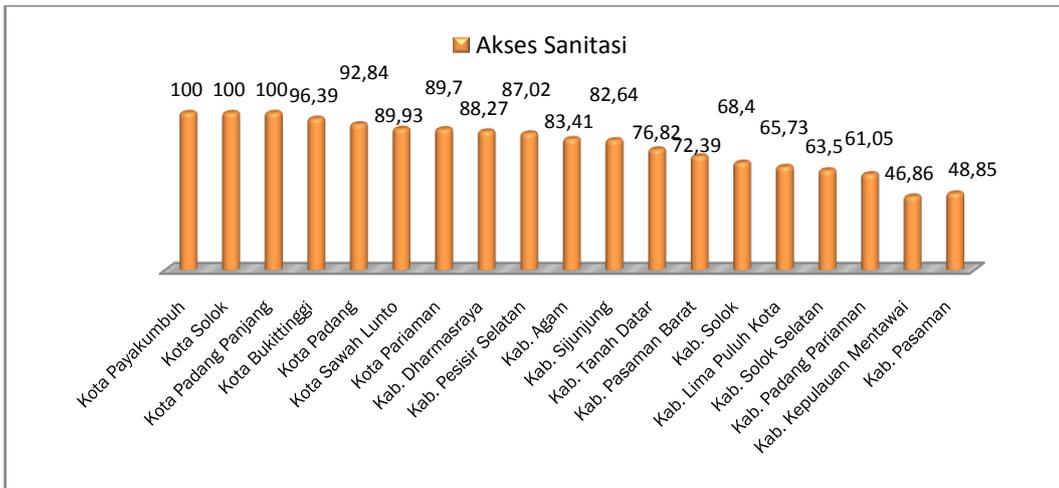


Sumber Data: Dinas PUPR

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi

Akses masyarakat terhadap sanitasi di tahun 2019 meningkat sebesar 4,59% dibandingkan dengan tahun 2018 (75,19%). Akses progres terhadap sanitasi sebesar 79,78% merupakan rata-rata persentase akses progres sanitasi dari 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Rincian akses sanitasi kabupaten/kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik 39.

Grafik 39 Akses sanitasi 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2019

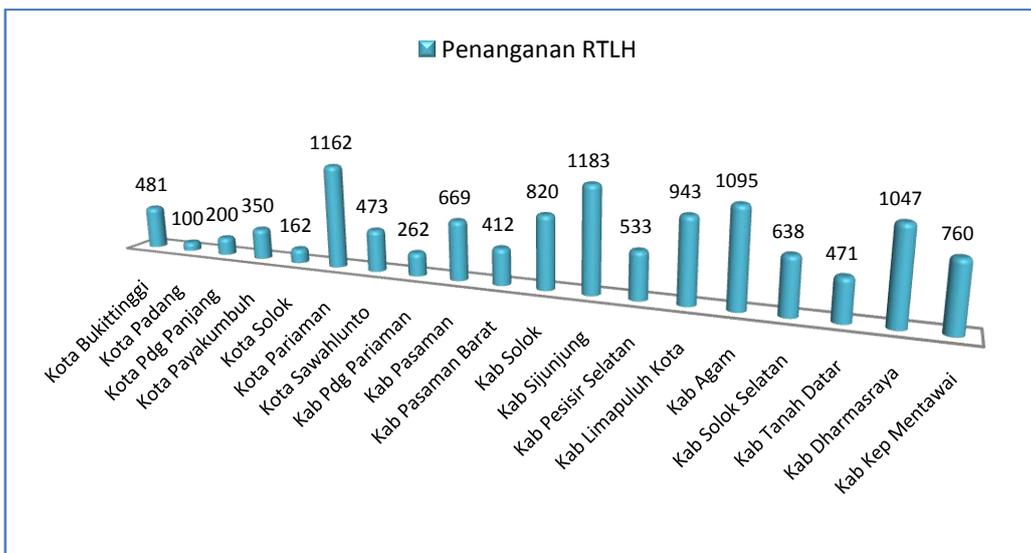


Sumber Data: Dinas PUPR

3. Penurunan rumah tidak layak huni

Penurunan rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2019 tercapai sebesar 7% atau sebanyak 11.761 unit rumah ditangani yang tersebar pada 19 kabupaten/kota. Sehingga jumlah rumah layak huni sampai dengan 2019 adalah sebanyak 1.128.371 unit rumah (88,24%). Penanganan rumah tidak layak huni di tahun 2019 dari 19 kabupaten/kota tergambar pada grafik 40.

Grafik 40 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni kabupaten/kota Tahun 2019



Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk peningkatan cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota.
2. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya sanitasi dalam mendukung pola hidup sehat.
3. Menyusun payung hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur untuk penangan rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat
4. *Update* data secara rutin setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat adalah Rp. 21.822.878.577,- terealisasi sebesar Rp. 18.593.914.101,- atau 85,20%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Hal ini dilihat dari capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 85,20% (tingkat efisiensi 17,71%).

Anggaran sebesar Rp. 21.822.878.577,- tersebar pada 7 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (6 Kegiatan), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (3 Kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (4 Kegiatan), Program Pengembangan Perumahan (6 Kegiatan), program pengelolaan, pengembangan dan konservasi air tanah (7 kegiatan) dan program pengelolaan pertanahan (7 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis.

Tujuan 5.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup bermanfaat sebagai penyedia unsur-unsur penting seperti air, udara dan mineral yang dibutuhkan makhluk hidup untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, lingkungan hidup harus dipelihara dan dilestarikan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penetapan IKLH diukur berdasarkan metode yang dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan indikator indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks tutupan lahan (IKTL). IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan daerah terkait kondisi lingkungan sebagai bahan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk tahun 2019, IKLH ditargetkan 69,518 (kategori cukup) lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan IKLH tahun 2018 (meningkat 0,03 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan IKLH. Perkembangan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2019 diuraikan pada tabel 3.3.55.

Tabel 3.3. 55 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.2



Berdasarkan tabel 3.3.55 diketahui :

1. Pada tahun 2019, indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan 69,518 (kategori cukup), terealisasi 77,082 (kategori baik) dengan tingkat capaian 110,88% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Hal ini berarti tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik.
2. Realisasi IKLH dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKLH = (30\% \times 77,37) + (30\% \times 89,45) + (40\% \times 67,59) = 77,082$$

Ket: Indeks Kualitas Air tahun 2018 = 77,37
Indeks Kualitas Udara tahun 2018 = 89,45
Indeks tutupan hutan/indeks kualitas tutupan hutan= 67,59

3. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi IKLH menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,35.
4. Dilihat dari sisi capaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2018-2019 juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,73%.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menemukan kendala sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup misalnya masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
2. Belum banyak kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang mempunyai pengelolaan limbah cair dan teknologi reduksi gas buang.
3. Tingginya kegiatan penambangan emas alluvial yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada polusi udara.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tahun 2019 antara lain:

1. Pengembangan bank sampah yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Di tahun 2019 sebanyak 39 bank sampah aktif dari 124 unit bank sampah yang terdata.
2. Normalisasi dan pemulihan sempadan sungai sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kualitas sungai.
3. Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
4. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan lahan kritis melalui kegiatan penanaman pohon. Dari hasil penanaman tahun 2014, memberikan kontribusi penambahan penutupan hutan tahun 2019 seluas 6.552 ha.
5. Pengendalian jumlah *hotspot* (titik panas) melalui pengawasan dan pencegahan dini serta pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk:

1. Meningkatkan jumlah bank sampah yang aktif pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan jumlah usaha/industri kecil yang mempunyai pengelolaan limbah cair dan teknologi reduksi gas buang.
3. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi vertikal untuk mengelola lingkungan dan mengendalikan faktor-faktor yang menjadi pencemarnya.
4. Penanaman pohon yang berkelanjutan dan meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau.
5. Meningkatkan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 5.2.1

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Air dan udara merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas air dan udara akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, begitupun sebaliknya. Agar air dan udara dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air dan udara. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas air dan udara sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Capaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara tergambar pada tabel 3.3.56.

Tabel 3.3. 56 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Air	65,65	77,37	117,85
Indeks Kualitas Udara	83,05	89,45	107,71
		Rata-rata Capaian	112,78

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar 112,78% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air



Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Untuk mengetahui kualitas air ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air. Penetapan indikator Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan pemantauan sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.

Untuk tahun 2019, Indeks Kualitas Air (IKA) ditargetkan 65,65 (kategori kurang) lebih rendah 11,64 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (77,29). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan IKA tahun 2018 (meningkat 1,6 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta mempertimbangan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi IKA.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Air target 65,65, terealisasi 77,37 dengan tingkat capaian 117,85% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Nilai Indeks Kualitas Air sebesar 77,37 menunjukkan kualitas air di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori Baik sebagaimana tergambar pada tabel 3.3.57.

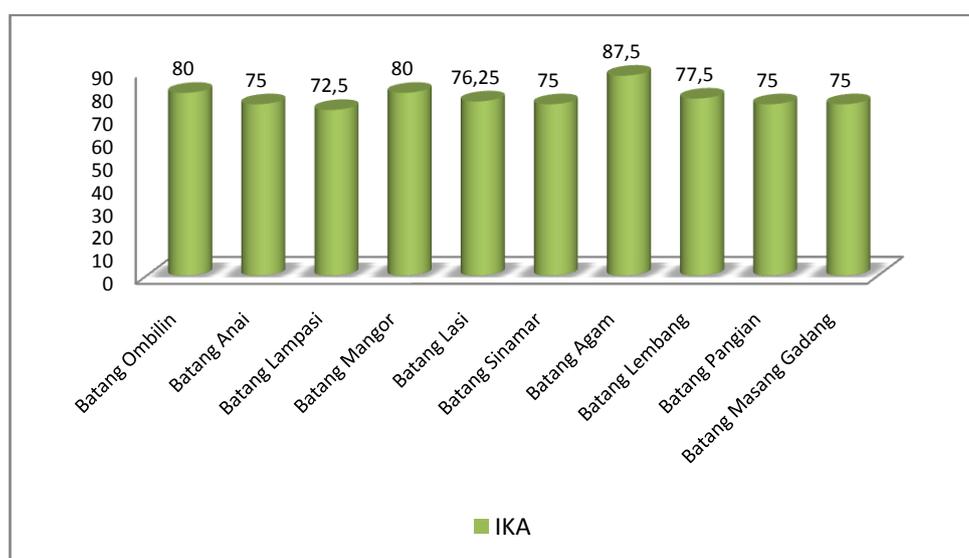
Tabel 3.3. 57 Kategori dan Kisaran Indeks Kualitas Air

No	Kategori	Kisaran Nilai IKA
1	Unggul	$IKA > 90$
2	Sangat Baik	$82 < IKA \leq 90$
3	Baik	$74 < IKA \leq 82$
4	Cukup	$66 < IKA \leq 74$
5	Kurang	$58 < IKA < 66$
6	Sangat Kurang	$50 < IKA < 58$
7	Waspada	$IKA < 50$

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari hasil pemantauan 10 (sepuluh) sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin, Sungai Pangian, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Masang Gadang dan Sungai Batang Lasi berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Nilai Indeks Kualitas Air 10 sungai yang dipantau di tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 41.

Grafik 41 Nilai Indeks Kualitas Air 10 Sungai yang dipantau



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas air sebesar 117,85% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.58.

Tabel 3.3. 58 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Indeks Kualitas Air	77,37	77,29	117,85	117,77	65,98

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indeks kualitas air tercapai >100%.

Dibandingkan dengan tahun 2018, indeks kualitas air menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,08 di tahun 2019. Dilihat dari jumlah sungai yang dipantau, jumlah sungai yang dipantau di tahun 2019 sebanyak 10 sungai, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018 (11 sungai).

Dibandingkan dengan tahun 2021, indeks kualitas air tahun 2019 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait akan berupaya secara optimal untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Indeks kualitas air Sumatera Barat tahun 2016 s/d 2018 masih di atas indeks kualitas air nasional dengan selisih tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 17,01. Dalam kurun waktu tersebut, indeks kualitas air Sumatera Barat menunjukkan tren positif. Untuk tahun 2019, indeks kualitas air Sumatera Barat tidak dapat dibandingkan dengan Nasional karena belum tersedianya data indeks kualitas air Nasional. Perbandingan indeks kualitas air Sumatera Barat dengan Nasional tergambar pada grafik 42.

Grafik 42 Perbandingan indeks kualitas air Sumatera Barat dengan Nasional



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Dalam meningkatkan indeks kualitas air, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala berikut ini:

- a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga masih banyak yang membuang sampah ke sungai.

- b. Belum terkelolanya limbah cair domestik sehingga limbah domestik masuk ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas air adalah:

- a. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal untuk mengelola sungai dan sumber pencemar sungai.
- b. Peningkatan tutupan vegetasi pada daerah hulu yang dapat menurunkan parameter TSS serta sedimentasi di sungai.
- c. Normalisasi dan pemulihan sempadan sungai sebagai upaya pencegahan dan pemulihan kualitas sungai.

Untuk meningkatkan kualitas air di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan pada sumber air untuk menjaga kualitas air.
- b. Melakukan pemulihan sungai yang tercemar oleh sampah.
- c. Pengerukan dan pengangkutan sedimen sampah plastik yang dilakukan secara periodik.
- d. Penguatan bantaran/tebing sungai secara alami ataupun buatan untuk menjaga kualitas air.
- e. Pemulihan terhadap *catchment* area (daerah tangkapan air) melalui peningkatan tutupan vegetasi.

2. Indeks Kualitas Udara

Selain air, udara juga sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Untuk mengetahui kualitas udara ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara. Penetapan indikator Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan pemantauan kualitas udara

ambien metode passive sampler di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter NO₂ dan SO₂.

Untuk tahun 2019, Indeks Kualitas Udara (IKU) ditargetkan 83,05 (kategori sangat baik) menurun 5,32 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (88,37). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan IKU tahun 2018 (menurun 1,5 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta pertimbangan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi IKU.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Udara target 83,05, terealisasi 89,45 dengan tingkat capaian 107,71% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 89,45 menunjukkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori Sangat Baik sebagaimana tergambar pada tabel 3.3.59.

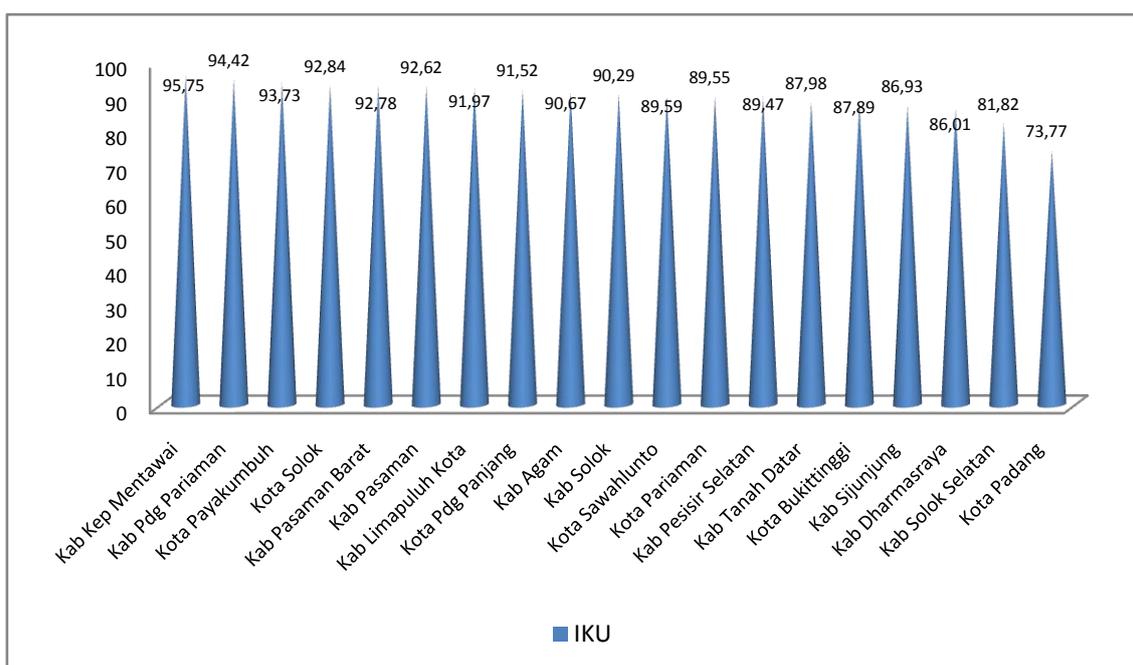
Tabel 3.3. 59 Kategori dan Kisaran Indeks Kualitas Udara

No	Kategori	Kisaran Nilai IKU
1	Unggul	IKU > 90
2	Sangat Baik	82 < IKU ≤ 90
3	Baik	74 < IKU ≤ 82
4	Cukup	66 < IKU ≤ 74
5	Kurang	58 < IKU < 66
6	Sangat Kurang	50 < IKU < 58
7	Waspada	IKU < 50

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari hasil pemantauan kualitas udara ambien kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan metode *passive sampler* dan metode otomatis kontinu. Masing-masing kabupaten/kota diwakili 4 lokasi dengan karakteristik aktivitas yang dominan berupa padat transportasinya, kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan perkantoran. Nilai Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat sebesar 89,45 merupakan kontribusi dari kualitas udara ambien di 19 kabupaten/kota. Indeks kualitas udara 19 kabupaten/kota tergambar pada grafik 43.

Grafik 43 Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, sebanyak 13 kabupaten/kota yang mempunyai indeks kualitas udaranya melebihi indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat. Dari 13 kabupaten tersebut sebanyak 10 kabupaten/kota kualitas udaranya berada pada kategori unggul. Kualitas udara terbaik berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kualitas udara terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah kategori cukup yang berada di Kota Padang.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 107,71% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.60.

Tabel 3.3. 60 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara

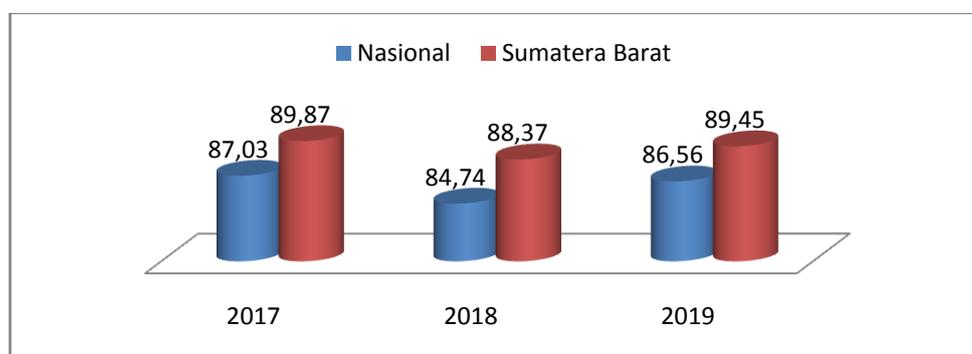
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Indeks Kualitas Udara	89,45	88,37	107,71	106,6	83,58

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2019 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator indeks kualitas udara tercapai >100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaian kinerja indeks kualitas udara menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 1,08 dan 1,21% di tahun 2019.

Dibandingkan dengan tahun 2021, indeks kualitas udara tahun 2019 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait akan berupaya secara optimal untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Indeks kualitas udara Sumatera Barat tahun 2017 s/d 2019 masih di atas indeks kualitas udara nasional dengan selisih tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 3,63. Akan tetapi, IKU dari tahun 2017-2019 menunjukkan tren yang berfluktuatif, menurun di tahun 2018 dan kembali naik di tahun 2019. Perbandingan indeks kualitas udara Sumatera Barat dengan Nasional tergambar pada grafik 44.

Grafik 44 Perbandingan IKU Sumatera Barat dan Nasional 2017-2019



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Hambatan/kendala untuk meningkatkan indeks kualitas udara adalah:

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terutama pada daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan kegiatan industri dan jumlah penduduk.
3. Faktor cuaca ekstrim seperti jumlah hari hujan dan kabut asap.

Selama tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk meningkatkan indeks kualitas udara dengan:

1. Melaksanakan *car free day* untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor.
2. Penggunaan transportasi publik seperti pemakaian trans padang.
3. Penambahan ruang terbuka hijau di Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan kualitas udara.

Untuk meningkatkan kualitas udara di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mempertahankan kondisi udara.
2. Melaksanakan Gerakan penanaman pohon di lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Melaksanakan *car free day* secara rutin dan berkelanjutan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah Rp. 9.571.795.031,- terealisasi sebesar Rp. 9.140.092.996,- atau 95,49%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara. Hal ini dilihat dari persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara sebesar 112,78% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,49% (tingkat efisiensi 17,29%).

Anggaran sebesar Rp. 9.571.795.031,- tersebar pada 6 Program yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (2 kegiatan), program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (11 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (5 kegiatan), program tata lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam (8 kegiatan), program pentaatan dan penegakan hukum lingkungan (3 kegiatan), program pengembangan kinerja pengolahan persampahan (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara.

**Sasaran
Strategis
5.2.2**

**Meningkatnya Kualitas Hutan
dan Lahan**

Kualitas hutan dan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas hutan dan lahan juga akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara. Terhadap kualitas air, kualitas hutan dan lahan dapat mengurangi potensi erosi yang pada akhirnya akan mengurangi kadar TSS (*Total Suspended Solid*) di badan air. Untuk kualitas udara, fungsi dari vegetasi yang ada akan berkontribusi menyerap dan menangkap polutan tertentu di udara ambien. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks tutupan hutan (ITH). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terminologi ITH berubah menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan perbandingan antara luas tutupan hutan (hutan primer dan hutan sekunder) di seluruh wilayah provinsi dengan luas wilayah provinsi.

Untuk tahun 2019, IKTL ditargetkan 69,52 atau mengalami peningkatan 2,02 dibandingkan dengan IKTL di tahun 2018. Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan nilai IKTL tahun 2018 juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan tergambar pada tabel 3.3.61.

Tabel 3.3. 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Tutupan Hutan/IKTL	69,52	67,59	97,22

Indikator kinerja indeks tutupan hutan/IKTL target 69,52% terealisasi 67,59% dengan tingkat capaian 97,22% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja IKTL diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84.3 - (0.491 \times 100)) \times \frac{50}{54.3}) = 67.59$$

Ket: ITH tahun 2019 = 0.491

$$ITH = \frac{1.910.373,56 + ((177.221,49 + 54.575,27 + 113,11 + 41,907,91 + 28,5) \times 0,6)}{4.224.728,28} = 0.491$$

Ket: Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat = 4.224.728,28 Ha
 Luas Hutan Kondisi Baik = 1.910.373,56
 Luas Belukar Dalam Kawasan Hutan = 177.221,49 Ha
 Luas Belukar Fungsi Lindung = 54.575,27 Ha
 Kebun Raya = 113,11 Ha
 Ruang Terbuka Hijau = 41.907,91 Ha
 Taman Kehati = 28,5 Ha

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 97,22% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks tutupan hutan/IKTL tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.62.

Tabel 3.3. 62 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Tutupan Hutan/IKTL

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Indeks tutupan hutan/IKTL	67,59	67,5	97,22	107,67	61,41

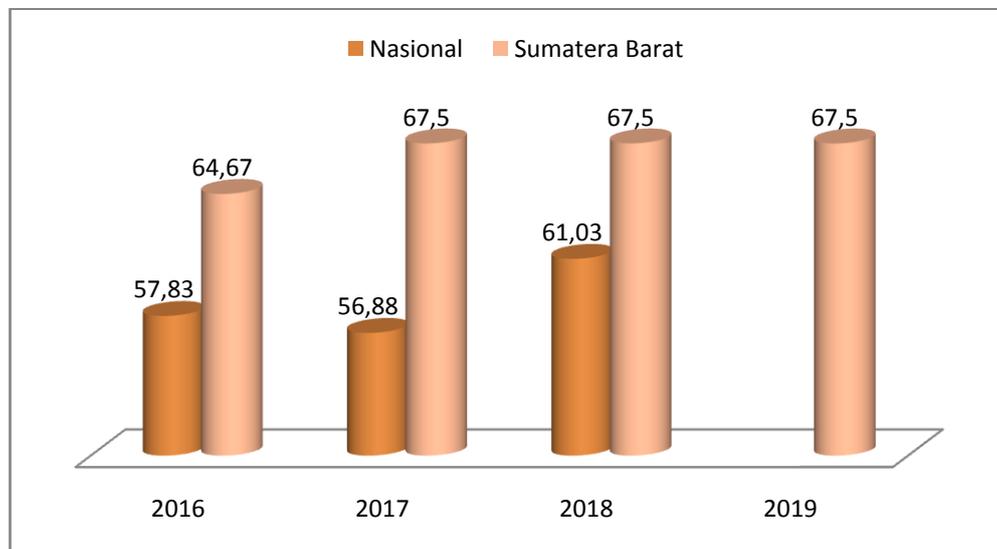
Indikator indeks tutupan hutan/IKTL di tahun 2019 tercapai di bawah target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja indeks tutupan hutan/IKTL tercapai <100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi indeks tutupan hutan/IKTL menunjukkan peningkatan 0,09. Perubahan nilai IKTL yang tidak signifikan dikarenakan di tahun 2019, data perhitungan IKTL ditambahkan dengan data luas belukar fungsi lindung (ha), kebun raya (ha), Ruang terbuka hijau (ha) dan taman

kehati. Dari sisi capaian kinerja, menunjukkan tren negatif dengan penurunan 10,45% di tahun 2019.

Dibandingkan dengan tahun 2021, indeks tutupan lahan tahun 2019 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait akan berupaya secara optimal untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Indeks tutupan lahan/IKTL Sumatera Barat tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan nilai IKTL tingkat Nasional. Hal ini dikarenakan informasi IKTL Nasional belum tersedia. Akan tetapi, dari tahun 2016-2018, IKTL Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dari IKTL nasional dengan selisih tertinggi terjadi di tahun 2017. IKTL Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan tren yang berfluktuatif, meningkat di tahun 2017, tetap di tahun 2018 dan meningkat kembali di tahun 2019. Perbandingan Indeks tutupan lahan/IKTL Sumatera Barat dengan Nasional tergambar pada grafik 45.

Grafik 45 Perbandingan Indeks tutupan lahan/IKTL Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2016-2019



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Untuk meningkatkan kualitas hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala sebagai berikut:

1. Perambahan lahan untuk areal pertanian dan ladang masyarakat.

2. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan (jalan, tambang).
3. Penebangan terencana pada IUPHHK HTI/HA (penebangan tahunan).
4. Kebakaran hutan dan lahan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan antara lain:

1. Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Hal ini dilakukan agar unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk hutan nagari, hutan Kemasyarakatan dan hutan Tanaman Rakyat sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
2. Menurunkan laju kerusakan hutan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan lahan kritis melalui kegiatan penanaman pohon. Dari hasil penanaman tahun 2014, memberikan kontribusi penambahan penutupan hutan tahun 2019 seluas 6.552 ha.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA berupa penguatan dan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam perlindungan hutan.
4. Pengendalian jumlah *hotspot* (titik panas) melalui pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Damkarhutla) dan pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan kualitas hutan dan lahan di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.

3. Meningkatkan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan adalah Rp. 45.587.191.800,- terealisasi sebesar Rp. 34.249.873.785,- atau 75,13%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan. Hal ini dilihat dari capaian strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebesar 97,22% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 75,13% (tingkat efisiensi 22,09%).

Anggaran sebesar Rp. 45.587.191.800,- tersebar pada 7 program yaitu program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (29 kegiatan), program pengendalian kebakaran hutan (18 kegiatan), program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam (14 kegiatan), program pemanfaatan potensi sumber daya hutan (32 kegiatan), program perhutanan sosial dan kemitraan (34 kegiatan), program pemantapan kawasan hutan (14 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan.



Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai bencana alam. Hal ini dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus berupaya untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan menurunnya risiko bencana sebagai salah satu sasaran strategis dengan indikator kinerjanya persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan

bencana. Penetapan indikator kinerja ini diukur berdasarkan perbandingan jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun n dengan jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2019, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 74% atau mengalami peningkatan 1% dibandingkan dengan persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana di tahun 2018 (73%). Penetapan target tahun 2019 selain mempertimbangkan persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 (meningkat 1% dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja sasaran strategis menurunnya risiko bencana tergambar pada tabel 3.3.63.

Tabel 3.3. 63 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.3



Indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana target 74% terealisasi 74% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana}}{\text{Target}} = \frac{322 \text{ kejadian}}{435 \text{ kejadian}} \times 100\% = 74\%$$

Ket: Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana = 322 kejadian
Jumlah kejadian bencana yang terjadi = 435 kejadian

Dari 435 kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, bencana banjir, kebakaran lahan dan longsor menjadi bencana yang sering terjadi sepanjang tahun 2019 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3.64.

Tabel 3.3. 64 Kejadian bencana tahun 2019 di Sumatera Barat

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Abrasi Pantai	4
2	Abrasi Sungai	0
3	Amruknya kubah mesjid	0
4	Banjir	155
5	Banjir Bandang	13
6	Banjir Rob	0
7	Erupsi gunung api	0
8	Gelombang Pasang	0
9	Gempa Bumi	12
10	Hanyut tenggelam	3
11	Kebakaran	18
12	Kebakaran lahan	99
13	Kecelakaan Laut	0
14	Ledakan Tambang	0
15	Longsor	90
16	Orang Hilang	3
17	Orang Terdampar	0
18	Pergerakan Tanah	2
19	Puting Beliung	36
20	Tersambar Petir	0
21	Tuba Belerang	0
Total		435

Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 100% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.65.

Tabel 3.3. 65 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2019 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2019	2018	2019	2018	2021
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	73	100	100	75

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai 100%. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 1%. Jika dilihat dari total kejadian bencana, jumlah kejadian bencana di tahun 2019 menurun 671 kejadian bencana dibandingkan dengan tahun 2018.

Dibandingkan dengan target 2021, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75% atau meningkat 1% dari realisasi tahun 2019. Dengan mempertimbangkan tren peningkatan capaian di tahun 2019, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dalam penanganan kejadian bencana ditemukan beberapa hambatan/kendala antara lain:

1. Aparatur yang ahli dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana belum memahami tugas dan fungsi pekerjaannya.
2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana yang belum memadai.
3. Keterlambatan informasi kejadian bencana yang dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penanganan kejadian bencana adalah:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana melalui pencegahan pasif (penelitian/pengkajian karakteristik bencana, analisis risiko bencana pembuatan pedoman/standar/prosedur, pembuatan peta rawan bencana dan pembuatan brosur/leaflet/poster) dan pencegahan aktif (pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaua dan larangan memasuki daerah rawan bencana, simulasi, penyediaan tempat evaluasi sementara dan pembentukan daerah rawan bencana).
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan relawan penanggulangan bencana.
3. Pengadaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan berupa rambu-rambu evakuasi gunung api, baliho peta tempat evaluasi sementara, rambu-rambu tempat evakuasi sementara dan alat vertikal *rescue*.

Untuk meningkatkan penanganan kejadian bencana di masa yang akan datang, perlu mengupayakan untuk:

1. Pembinaan tertib administrasi dan pelaporan kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD kabupaten/kota ke Pusdalops Penanggulangan Bencana
2. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana

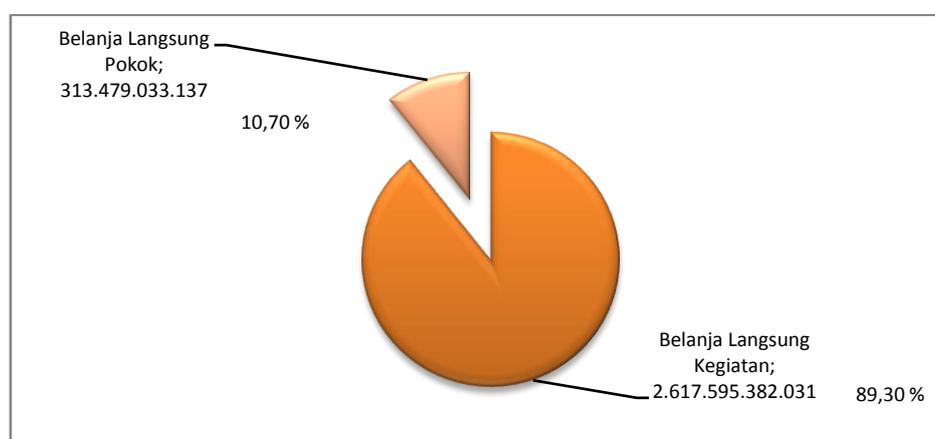
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana adalah Rp. 22.059.640.839,- terealisasi sebesar Rp. 20.701.383.996,- atau 93,84%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran menurunnya risiko bencana. Hal ini dilihat dari persentase capaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,84% (tingkat efisiensi 6,16%).

Anggaran sebesar Rp. 22.059.640.839,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan mitigasi bencana (4 kegiatan), program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana (7 kegiatan), program pemulihan daerah pasca bencana (4 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan (2 kegiatan), program peningkatan penanganan tanggap darurat bencana (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019, anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.931.074.415.168,- terealisasi sebesar Rp. 2.662.674.164.482,14 atau sebesar 90,84%. Anggaran belanja langsung terbagi atas belanja langsung kegiatan dan belanja langsung pokok, dengan rincian pada grafik 46.

Grafik 46 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019



Sumber data: Data diolah

Berdasarkan grafik 46 diketahui:

1. Sebesar 89,30% dari total anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 215 program yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Anggaran dan realisasi belanja langsung Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2019 diuraikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	30.454.818.195	26.355.224.598	86,54
2	Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	11.674.715.334	10.964.676.039	93,92
3	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	43.634.927.833	40.578.169.638	92,99
4	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	38.109.750.333	35.772.038.088	93,87
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97.715.160.173	92.347.622.315	94,51
6	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	815.978.690.288	789.146.740.714	96,71
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	569.386.085.305	494.117.935.137,68	86,78
8	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	161.993.952.798	149.849.121.502,17	92,50
9	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	8.661.492.580	8.524.915.857	98,42
10	Meningkatnya Nilai Ekspor	9.809.125.600	7.851.776.701	80,05
11	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	132.289.568.343	122.656.552.056	92,72
12	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	462.723.573.931	378.850.706.533,01	81,87
13	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	7.357.320.088	6.668.822.828	90,64
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	128.764.694.983	120.299.667.430,67	93,43
15	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat	21.822.878.577	18.593.914.101	85,20

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
16	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	9.571.795.031	9.140.092.996	95,49
17	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	45.587.191.800	34.249.873.785	75,13
18	Menurunnya resiko bencana	22.059.640.839	20.701.383.996	93,84
TOTAL		2.617.595.382.031	2.366.669.234.315,53	90,41

- Total Anggaran sebesar Rp. **2.617.595.382.031** sudah efisien mendukung pencapaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Hal ini dilihat dari persentase rata-rata capaian 18 sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 111,06% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 90,41% (tingkat efisiensi 20,65%).
- Sebesar 10,70% dari total anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 5 program yang mendukung pemenuhan kebutuhan internal organisasi yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Bab 4 **PENUTUP**

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam laporan ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 yang dilihat dari pencapaian target 23 indikator kinerja yang mengukur 7 tujuan dan 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
2. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 18 sasaran strategis di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.617.595.382.031,- terealisasi Rp. 2.366.669.234.315,53,- atau 90,41%.
3. Anggaran sebesar Rp. Rp. 2.617.595.382.031,- sudah efisien mendukung pencapaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Hal ini dilihat dari persentase rata-rata capaian 18 sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 111,06% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 90,41% (tingkat efisiensi 20,65%).
4. Rincian pencapaian 18 sasaran strategis di tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. 8 sasaran strategis (44,44%) mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 9 sasaran strategis (50%) mencapai keberhasilan dengan kategori *sangat baik* dan 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori *cukup*.
 - b. Sasaran strategis dengan capaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan capaian 342,29% dan yang terendah adalah sasaran meningkatnya nilai ekspor (68,06%).

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP, diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai *stakeholders*. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
2. Mempertimbangkan hambatan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target di tahun 2019 sebagai dasar merumuskan strategi pencapaian kinerja di masa yang akan datang.
3. Meningkatkan peran Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 untuk mengawal implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan Bappeda untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan.
5. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
6. Mengintegrasikan aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.
7. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk menilai kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Mengoptimalkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



HASIL PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA					
I	MISI 1				
	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis. agamis. beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah"				
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1.1 Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83
	1.1 Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	67,2	64,4	95,83
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.2 Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	33	100,00
	1.2 Meningkatkan Pelestarian nilai-nilai Budaya	1.2.1 Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	33	100,00
II	MISI 2				
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik. bersih dan profesional				
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	71	65,63	92,44
	1.1 Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
	1.2 Meningkatkan Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	70	76,69	109,56
		1.2.2 Indeks e-Government	2,8	2,78	99,29
	1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	80	84,47	105,59

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
III	MISI 3 Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas. sehat. beriman. berkarakter. dan berkualitas tinggi				
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,7	71,73	100,04
	1.1 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1.2.1 Harapan lama sekolah 1.2.2 Rata-rata lama sekolah	14,63 8,79	13,95 8,76	95,35 99,66
	1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.1.1 Angka harapan hidup	69,22	69,01	99,70
IV	MISI 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh. produktif. dan berdaya saing regional dan global. dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah				
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Indeks Gini	5,83 0,328	5,05 0,307	86,62 106,40
	1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	45,44	45,29	99,67
	1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	1.2.1 Persentase Pertumbuhan investasi	4,02	13,76	342,29
	1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1967,38	1339,03	68,06
	1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan 1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,15 6,03	6,29 5,33	97,72 111,61
V	MISI 5 Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 1.2 Rasio elektrifikasi	37 99,17	40 95,82	108,11 96,62
	1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	40	108,11
	1.2 Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio elektrifikasi	99,17	95,82	96,62
	1.3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1 Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	62,40	63,95	102,48
	1.4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	53,67	55,23	102,91

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,518	77,082	110,88
	2.1 Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air	65,65	77,37	117,85
		2.1.2 Indeks Kualitas Udara	83,05	89,45	107,71
	2.2 Meningkatkan Kualitas Hutan & Lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	69,52	67,59	97,22
	2.3 Menurunnya resiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	74	100,00
Rata-rata Capaian					111,07

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA				
I MISI I				
Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis. agamis. beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah"				
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1.1 Indeks Kerukunan	67,2	Satpol PP, Badan Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
	1.1 Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	67,2	Satpol PP, Badan Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.2 Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	Dinas Kebudayaan
	1.2 Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	1.2.1 Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	Dinas Kebudayaan
II MISI 2				
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik. bersih dan profesional				
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	71	OPD terkait 8 Area Perubahan
	1.1 Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Biro AP2BMD
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Biro Organisasi
	1.2 Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	70	Badan Kepegawaian Daerah
		1.2.2 Indeks e-Government	2,8	Dinas KOMINFO
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	80	Biro Organisasi

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III	MISI 3 Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas. sehat. beriman. berkarakter. dan berkualitas tinggi			
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,7	Lintas Perangkat Daerah
	1.1 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1.2.1 Harapan lama sekolah 1.2.2 Rata-rata lama sekolah	14,63 8,79	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
	1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.1.1 Angka harapan hidup	69,22	Dinas Kesehatan, RSUD
IV	MISI 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh. produktif. dan berdaya saing regional dan global. dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah			
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Indeks Gini	5,83 0,328	
	1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	45,44	Lintas Perangkat Daerah
	1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	1.2.1 Persentase Pertumbuhan investasi	4,02	Dinas Penanaman Modal & PTSP
	1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ juta)	1.967,38	Disperindag
	1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan 1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,15 6,03	Lintas Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah
V	MISI 5 Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 1.2 Rasio elektrifikasi	37 99,17	
	1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.2 Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio elektrifikasi	99,17	Dinas ESDM
	1.3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1 Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Dava Air	62,40	Dinas PSDA

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
	1.5 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	53,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,518	
	2.1 Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air	65,65	Dinas Lingkungan Hidup
		2.1.2 Indeks Kualitas Udara	83,05	Dinas Lingkungan Hidup
	2.2 Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	69,52	Dinas Kehutanan
	2.3 Menurunnya resiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	BPBD

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
A	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	30.454.818.195,00	
	1 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.546.443.599,00	B. Kesbangpol
	2 Pendidikan Politik Masyarakat	811.612.700,00	
	3 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	310.708.000,00	
	4 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.294.461.200,00	
	5 Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	173.503.823,00	
	6 Peningkatan Perlindungan Masyarakat	195.341.750,00	Satpol PP dan Damkar
	7 Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	3.160.171.853,00	
	8 Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	100.000.000,00	
	9 Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	460.000.000,00	
	10 Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	56.063.500,00	
	11 Pemetaan daerah rawan kebakaran	87.218.779,00	
	12 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.032.937.312,00	Biro Bina Mental dan Kesra
	13 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	17.235.531.779,00	
	14 Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	2.990.823.900,00	
B	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	11.674.715.334,00	
	1 Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya	1.371.368.046,00	D. Kebudayaan
	2 Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	900.797.650,00	
	3 Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	2.710.333.229,00	
	4 Pengelolaan Kekayaan Budaya	4.080.914.160,00	
	5 Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	2.611.302.249,00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
C	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	43.634.927.833,00	
1	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400,00	Inspektorat Provinsi
2	Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum	7.154.165.985,00	
3	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.302.805.543,00	Biro Adm. P2 BMD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.570.754.265,00	Biro Umum, D. Perindag, D. Nakertrans dan D. PU PR
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.910.726.370,00	B. Keuangan Daerah
6	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	735.504.800,00	
7	Peningkatan Pendapatan Daerah	6.940.473.189,00	
8	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	435.920.000,00	Bappeda
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.003.481.839,00	
10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.073.417.468,00	
11	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	490.296.880,00	Biro Pemerintahan
12	Pengelolaan Otonomi Daerah	3.814.543.100,00	Biro Pemerintahan
13	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda	1.383.067.150,00	Biro Adm. P2 BMD
14	Kerjasama Pembangunan	2.036.882.197,00	Biro Rantau
15	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	435.081.000,00	Biro Rantau
16	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	351.799.160,00	Biro Rantau
17	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Prov Sumatera Barat	372.031.400,00	Biro Organisasi
18	Manajemen Perubahan	325.396.800,00	Biro Organisasi
19	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	441.258.416,00	Biro Organisasi
20	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	1.716.327.871,00	Biro Perekonomian
D	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	38.109.750.333,00	
1	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	11.899.892.100,00	BKD, BPSDM dan Biro Organisasi
2	Pendidikan Kedinasan	10.272.161.150,00	
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	801.544.650,00	
4	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	1.008.647.410,00	
5	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	2.571.402.400,00	D. Komunikasi dan Informatika
6	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	171.488.000,00	
7	Informasi dan Komunikasi Publik	842.587.650,00	
8	Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah	7.253.646.823,00	
9	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	190.108.000,00	
10	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan	498.590.650,00	
11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.599.681.500,00	Biro Humas
E	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	97.715.160.173,00	
1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2.152.313.028,00	Biro Adm. P2 BMD dan Biro Umum
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	111.602.850,00	Biro Organisasi,
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379,00	Set DPRD
4	Penguatan Inovasi Daerah	2.028.916.900,00	Balitbang
5	Pengembangan Data Dan Informasi	379.594.060,00	B. Penghubung
6	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.073.589.012,00	B. Penghubung
7	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	16.412.958.722,00	B. Penghubung, Biro Umum

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
8	Penataan Administrasi Kependudukan	3.081.886.150,00	D. Pengendalian Penduduk, KB, kependudukan dan
9	Peningkatan Pelayanan Publik	3.213.194.226,00	B. Keuangan Daerah dan B. Penghubung
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	485.934.620,00	D. Kearsipan dan
11	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	565.689.400,00	Perpustakaan
12	Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan	1.597.643.976,00	Balitbang
13	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	304.844.600,00	Biro Hukum
14	Pembangunan Materi Hukum	1.103.757.350,00	Biro Hukum
15	Sarana Dan Informasi Hukum	114.015.000,00	Biro Hukum
16	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	696.615.900,00	Biro Hukum
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	815.978.690.288,00	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	3.746.183.056,00	D. Pendidikan
2	Pendidikan Berkarakter	497.377.280,00	
3	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	22.584.536.710,00	
4	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	12.221.301.390,00	
5	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	146.461.176.868,00	
6	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	629.555.097.828,00	
7	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	22.884.680,00	Biro Bina Mental
8	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	890.132.476,00	D. Kearsipan dan Perpustakaan
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	569.386.085.305,00	
1	Obat dan Pembekalan Kesehatan	4.375.643.100,00	D. Kesehatan, 4 RSUD
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	8.936.426.725,00	
3	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.848.573.470,00	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	1.683.388.540,00	
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	501.786.000,00	
6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	498.950.600,00	
7	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	169.746.883.131,00	
8			
9	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	854.581.100,00	
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	75.000.000,00	
11			
12	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	258.682.400,00	
13	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	39.234.695.485,00	
14	Peningkatan Pelayanan BLUD	312.782.469.710,00	
15	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	535.642.000,00	D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Peningkatan Kualitas Keluarga	115.560.000,00	
17	Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	157.799.600,00	
18	Peningkatan Perlindungan Perempuan	708.861.900,00	
19	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak	417.173.516,00	
20	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	959.509.825,00	
21	Diversifikasi Pangan	1.486.893.800,00	D. Pangan
22	Peningkatan Ketahanan Pangan	6.641.971.055,00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
23	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja	39.120.000,00	D. Pengendalian Penduduk, KB, kependudukan dan capil
24	Keluarga Berencana	317.466.000,00	
25	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	69.600.000,00	
26	Peningkatan Pengendalian Penduduk	350.500.000,00	
27	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.313.486.111,00	D. Pemuda Olahraga
28	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.191.884.317,00	
29	Pengembangan Organisasi Pemuda Dan Manajemen Olahraga	1.367.344.400,00	
30	Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	766.192.520,00	
31	Peningkatan wawasan dan kreatifitas seni budaya pemuda	150.000.000,00	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	161.993.952.798,00	
1	Pengamanan Sumber Daya Hewani	3.156.290.970,00	D. Peternakan dan Keswan
2	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1.673.231.900,00	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	5.033.000.000,00	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	152.900.000,00	
5	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	16.297.707.505,00	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	230.101.000,00	
7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	999.114.400,00	D. Perindustrian dan Perdagangan
8	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	5.915.406.470,00	
9	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	1.868.714.150,00	
10	Peningkatan Kualitas Produk Industri	2.717.669.850,00	D. Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perkebunan
11	Pemberdayaan Penyuluhan	90.000.000,00	
12	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1.335.000.000,00	
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana	17.220.264.734,00	
14	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.958.643.140,00	
15	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	7.288.412.700,00	
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	7.620.396.000,00	D. Pariwisata
17	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	13.114.817.840,00	
18	Pengembangan Ekonomi Kreatif	14.367.334.900,00	
19	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.555.058.500,00	
20	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	3.290.590.800,00	
21	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	1.941.553.000,00	D. Kelautan dan Perikanan
22	Pengembangan Ekonomi Maritim	15.654.137.016,00	
23	Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	7.668.101.364,00	
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana	925.098.060,00	
25	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	729.262.200,00	
26	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	1.110.133.125,00	
27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	3.886.890.120,00	D. Koperasi dan UKM
28	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3.105.455.404,00	
29	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1.736.090.150,00	
30	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM	6.521.529.500,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
31	Peningkatan SDM Pertanian	995.000.000,00	
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan	5.836.048.000,00	
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	8.661.492.580,00	
1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	4.442.420.010,00	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.219.072.570,00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	9.809.125.600		
1	Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	9.809.125.600,00	D. Perindag	
K	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	132.289.568.343,00		
1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	293.159.750,00	D. Sosial	
2	Pembinaan Anak Terlantar	6.907.798.435,00		
3	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.267.522.575,00		
4	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	2.760.876.034,00		
5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	904.957.700,00	D. Sosial	
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.815.873.972,00		
7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	54.095.239.520,00		
8	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	801.444.180,00		
9	Pemberdayaan Fakir Miskin	9.392.123.209,00		
10	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	287.410.800,00		
11	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	706.528.960,00		Biro Bina Mental
12	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	258.980.000,00		D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	9.229.389.380,00		
14	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha	570.000.000,00		
15	Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	14.351.512.300,00		
16	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	4.258.380.000,00		
17	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	908.800.000,00		
18	Pembangunan Kawasan Perdesaan	659.000.000,00		
19	Penanggulangan Kemiskinan	861.771.700,00		
20	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.757.486.800,00	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
21	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha	1.805.085.000,00		
22	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	688.056.300,00		
23	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	948.585.350,00		
24	Pengadaan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	111.200.000,00		
25	Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal	648.386.378,00		
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	462.723.573.931,00		
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	184.577.512.989,00	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	48.377.347.200,00		
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	3.735.168.000,00		
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	214.708.096.624,00		
5	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	773.788.000,00	D. Perhubungan	
6	Perencanaan Penataan Ruang	4.733.380.000,00		
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	182.620.000,00		
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	449.759.450,00		
9	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	132.733.975,00		
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	992.838.116,00		
11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	252.829.960,00		
12	Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.364.690.106,00		
13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.442.809.511,00		

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
M	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ECTL	7.357.320.088,00	
1	Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	6.424.221.060,00	D. Energi Sumber Daya Mineral
2	Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi	261.122.700,00	
3	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	515.518.000,00	
4	Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	156.458.328,00	
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	128.764.694.983,00	
1	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	860.000.000,00	D. Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	51.636.579.465,00	
3	Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3.362.985.000,00	
4	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	66.552.274.253,00	
5	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	6.352.856.265,00	
O	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	21.822.878.577,00	
1	Pengembangan Perumahan	1.803.496.500,00	D. Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.725.355.630,00	
3	Pengelolaan Pertanahan	487.638.847,00	
4	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	1.638.277.400,00	Dinas Pekerjaan umum
5	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	4.805.000.000,00	
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	913.790.000,00	
7	Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah	449.320.200,00	D. Energi Sumber Daya Mineral
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	9.571.795.031,00	
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.359.764.000,00	D. Lingkungan Hidup
2	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.384.969.098,00	
3	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	885.849.520,00	
4	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	1.286.403.513,00	
5	Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	599.372.900,00	
6	Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	1.055.436.000,00	
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	45.587.191.800,00	
1	Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	4.542.761.000,00	D. Kehutanan
2	Pengendalian Kebakaran Hutan	9.942.943.200,00	
3	Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	17.114.808.050,00	
4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	8.179.028.950,00	
5	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	4.623.977.000,00	
6	Pemantapan Kawasan Hutan	707.766.000,00	
7	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	475.907.600,00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
R	Menurunnya Risiko Bencana	22.059.640.839,00	
1	Peningkatan Mitigasi Bencana	3.195.190.194,00	BPBD
2	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	9.200.956.867,00	
3	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	4.210.750.000,00	
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan	4.993.691.178,00	
5	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	459.052.600,00	
TOTAL		2.617.595.382.031,00	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 IRWAN PRAYITNO